



**RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJ PID)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**



H. Herman Deru

H. Cik Ujang

Gubernur Sumatera Selatan

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun sebagai pedoman strategis untuk memperkuat arah pengembangan IPTEK secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan RIPJ PID ini menjadi instrumen penting dalam mendukung percepatan pencapaian visi kepala daerah periode 2025–2029, yaitu “Sumsel Maju Terus untuk Semua.”

Tema Prioritas pada dokumen ini adalah “100.000 Sultan Muda Sumsel,” yang menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong munculnya generasi pengusaha muda, pelaku ekonomi kreatif, dan inovator muda yang memiliki daya saing tinggi. Tema ini diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta perluasan ekosistem inovasi yang adaptif. Seluruh arah pengembangan tersebut selaras dengan semangat Revolusi Industri 5.0, yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi dan menekankan integrasi teknologi cerdas dengan nilai kemanusiaan. Selain itu, penyusunan RIPJ PID Provinsi Sumatera Selatan ini juga mengacu pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang menekankan penguatan SDM, hilirisasi industri, kewirausahaan, pembangunan ekonomi hijau-biru, serta pemerataan pembangunan menuju kemandirian dan keberlanjutan.

Penyusunan dokumen ini melibatkan kolaborasi antara perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kontribusi dan masukan dari berbagai pihak sangat berarti dalam memperkaya analisis dan memastikan arah kebijakan yang disusun mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada dan berharap kritik serta saran yang konstruktif untuk penyempurnaan ke depan. Semoga RIPJ PID Provinsi Sumatera Selatan ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendorong pemajuan IPTEK, memperkuat daya saing, dan mewujudkan Sumatera Selatan yang semakin maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Palembang, September 2025
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	8
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	10
1.4 Sistematika Dokumen	11
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DAERAH	12
2.1 Gambaran Umum Daerah	12
2.1.1 Aspek Geografi.....	12
2.1.2 Aspek Kependudukan.....	15
2.1.3 Aspek Ketenagakerjaan.....	22
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	30
2.1.5 Produk Unggulan Daerah.....	49
2.1.6 Permasalahan Utama Daerah.....	55
2.2 Kondisi Riset dan Inovasi Daerah	62
2.2.1 Kondisi Saat ini kemampuan menghasilkan <i>evidence based policy</i>	62
2.2.2 Penentuan Tema Prioritas	68
2.3 Kondisi Saat ini Ekosistem Berdasarkan Tema Prioritas	70
BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DAERAH	87
3.1 Tantangan Dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Mendatang	87
3.2 Peluang Dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Mendatang	91
3.3 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Diharapkan	92
BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH	115
4.1 Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>) Kemampuan Melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (<i>evidence based policy</i>)	115
4.2 Analisis Kesenjangan Tema Prioritas melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi	128
BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH	159

5.1 Strategi Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (<i>evidence based policy</i>)	159
5.2 Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Melalui Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) dan/atau Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah	162
BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DAERAH	166
6.1 Rencana Aksi Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel	181
BAB VII PENUTUP	198
REFERENSI.....	200

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Prioritas Pembangunan	5
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan....	14
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, 2024 ,2025	16
Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk per km ² Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, 2024, 2025	17
Tabel 2. 4 Populasi Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	20
Tabel 2. 5 Populasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	21
Tabel 2. 6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kategori Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	23
Tabel 2. 7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kategori Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	25
Tabel 2. 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	26
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	28
Tabel 2. 10 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (ribu rupiah)	34
Tabel 2. 11 Laju Pertumbuhan PRDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (%)	35
Tabel 2. 12 Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	39
Tabel 2. 13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024	44
Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024	48
Tabel 2. 15 Kondisi Saat ini Kemampuan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (evidence based policy).....	63
Tabel 2. 16 Tabel Kondisi Saat ini Kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi Berdasarkan Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel.....	74
Tabel 3. 1 Kondisi yang Diharapkan Kemampuan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (evidence based policy)	93
Tabel 3. 2 Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi yang Diharapkan Pada Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda	98
Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan Kemampuan Dalam Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (evidence based policy)	117
Tabel 4. 2 Tabel Analisis Kesenjangan Kondisi Saat ini dan Kondisi yang diharapkan Berdasarkan Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel	129

Tabel 5. 1 Strategi Daerah dan Arah Kebijakan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti	159
Tabel 5. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	162
Tabel 5. 3 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah.....	164
Tabel 6. 1 Langkah-Langkah Strategis Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel.....	168
Tabel 6. 2 Matriks Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah 100.000 Sultan Muda Sumsel.....	184

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan	13
Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (%).....	19
Gambar 2. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024	28
Gambar 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (Triliun Rupiah).....	30
Gambar 2. 5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (%)	31
Gambar 2. 6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Miliar Rupiah)	32
Gambar 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (%)	37
Gambar 2. 8 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi.....	40
Gambar 2. 9 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera	41
Gambar 2. 10 Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan	42
Gambar 2. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	45
Gambar 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2024	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari tujuan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara global, arah pembangunan kini bergeser dari eksploitasi sumber daya alam menuju pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Riset dan inovasi memegang peranan strategis, tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga dalam menyediakan solusi kreatif untuk tantangan pembangunan (Rohmah, 2025). Kolaborasi antara riset, pengembangan IPTEK, dan perumusan kebijakan daerah akan menghasilkan kebijakan yang berdasarkan bukti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hidayat, 2024). Misalnya, penelitian di bidang pertanian dapat mendorong kemajuan teknologi yang memperkuat ketahanan pangan, sementara riset energi terbarukan berperan dalam mendukung peralihan menuju energi ramah lingkungan. Penguatan riset dan IPTEK di tingkat lokal adalah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan (Firdaus, 2022).

Walaupun demikian, hingga saat ini, pengembangan riset dan IPTEK di daerah sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antar-pemangku kepentingan, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang riset (Suhardi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan peta jalan pemajuan riset dan IPTEK daerah yang mampu menjadi panduan strategis dalam merumuskan kebijakan, menyinergikan program, serta mengarahkan sumber daya yang tersedia secara efektif.

Penguatan kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di tingkat daerah memegang peranan penting dalam menghasilkan pengetahuan serta inovasi yang aplikatif untuk mendukung proses pembangunan (Alam et al., 2022). Melalui hasil penelitian di bidang agrikultur, misalnya, dapat dikembangkan teknologi pertanian presisi yang berkontribusi

pada peningkatan produktivitas panen. Di sisi lain, inovasi pada sektor energi terbarukan berpotensi mendorong pengembangan sumber energi yang berkelanjutan di wilayah-wilayah tertentu. Integrasi antara hasil riset dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Akbar et al., 2023).

Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi pemerintahan dengan dukungan perangkat daerah sebagai bagian dari pelaksanaan sistem desentralisasi. Mandat menjalankan pemerintahan tersebut bertujuan untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perumusan kebijakan publik yang responsif serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran (Taufiqurokhman, 2014). Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah; dan (3) Memiliki hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal telah mempertegas posisi strategis Pemerintah Daerah sebagai entitas pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat (Hasanah et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, perumusan kebijakan pembangunan di tingkat daerah menuntut perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang terarah, serta evaluasi yang berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi komunitas lokal. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang berbasis pada riset dan inovasi (Handini et al., 2025). Pendekatan berbasis pengetahuan ini memungkinkan perencanaan yang lebih fokus, berdampak signifikan, serta efisien dalam penggunaan sumber daya fiskal. Dengan demikian, pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar dalam

perumusan kebijakan publik diyakini dapat mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Transformasi kebijakan riset dan inovasi di Indonesia memasuki babak baru dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2021. BRIN diharapkan berperan sebagai motor penggerak dalam memperkuat ekosistem riset, termasuk mendorong pengembangan kapasitas riset di daerah. Dalam kerangka penguatan kelembagaan tersebut, Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah menegaskan bahwa riset dan inovasi di daerah diselenggarakan dan disinergikan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 2 Ayat (3) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 juga menyebutkan bahwa penyelenggaraannya dapat disinergikan dengan kemitraan bersama lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan/atau lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi riset dan inovasi di daerah mencakup serangkaian aktivitas, termasuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Penelitian bertujuan untuk: (1) peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah; (3) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (4) peningkatan daya saing daerah; dan (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penelitian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Pengkajian melibatkan proses analisis dan rekayasa yang mencakup: (1) pengujian; (2) pengembangan teknologi; (3) rancang bangun; dan (4) pengoperasian. Program penerapan mencakup: (1) alih teknologi; (2) intermediasi teknologi; (3) difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) komersialisasi teknologi.

Berdasarkan Perpres nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah

secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan telah mulai menjalankan fungsi strategis dalam bidang riset dan inovasi sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah. Peran ini semakin mendapat penguatan melalui arahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BRIN, yang mendorong agar seluruh proses perumusan kebijakan pembangunan dilandasi oleh hasil riset dan inovasi yang relevan. Penguatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem riset yang lebih kokoh dan adaptif, seiring dengan upaya perbaikan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID) ini disusun sebagai salah satu dokumen turunan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Substansi utama yang termuat di dalamnya mencakup arah perbaikan ekosistem riset dan inovasi, baik dalam merespons kebutuhan pengembangan produk unggulan daerah, maupun dalam menjawab isu-isu strategis yang menjadi permasalahan utama pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada periode tersebut serta sebagai akselerasi program strategis kepala daerah terpilih.

Penyusunan dokumen RIPJ PID diseuaikan dengan penetapan prioritas pembangunan daerah periode 2025–2029 yang berfokus pada program strategis “100.000 Sultan Muda Sumsel.” Program ini merupakan agenda prioritas Gubernur terpilih yang diarahkan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha muda, memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor ekonomi kreatif dan UMKM, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Riset dan inovasi memiliki peran fundamental dalam mendukung pencapaian program tersebut melalui penyediaan basis data kewirausahaan yang komprehensif, pengembangan model bisnis inovatif, pemetaan potensi sektor unggulan, serta peningkatan kapasitas 100.000 Sultan Muda melalui pemanfaatan teknologi informasi, layanan inkubasi, maupun pengembangan inovasi produk daerah. Dengan demikian, penyusunan RIPJ PID bukan hanya merupakan pemenuhan amanat regulasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembangunan daerah berjalan secara terarah, berbasis bukti, dan selaras dengan agenda prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun agar dapat menjadi panduan strategis dalam mengarahkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, penyusunan kebijakan berbasis bukti, penguatan ekosistem riset dan inovasi, serta peningkatan daya saing daerah. Identifikasi permasalahan utama yang menjadi fokus pembangunan diperoleh melalui proses *Focus Group Discussion (FGD)* dengan pemangku kepentingan, serta didukung oleh temuan riset terdahulu yang dirangkum dan disajikan dalam Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Prioritas Pembangunan

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
Kerentanan dan risiko kondisi geografi	Penguatan ketahanan wilayah melalui pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kerentanan dan risiko akibat kondisi geografi.
Pengelolaan sumber daya air belum berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air melalui konservasi, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk

	mendukung ketersediaan air yang berkelanjutan bagi masyarakat dan sektor ekonomi.
Tingginya alih fungsi lahan dan gambut	Pengendalian alih fungsi lahan dan perlindungan ekosistem gambut melalui penegakan regulasi, penerapan tata ruang berkelanjutan, serta penguatan program restorasi dan rehabilitasi lahan
Pengembangan potensi ekonomi daerah belum optimal	Peningkatan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui hilirisasi produk unggulan, pemberdayaan UMKM, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong daya saing daerah
Kerentanan ketahanan pangan	Penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi produksi, peningkatan infrastruktur pertanian, serta dukungan teknologi dan akses pasar guna memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan berkelanjutan
Kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih tinggi	Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah untuk memperkuat integrasi ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan publik
Kualitas sumber daya manusia masih rendah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang merata, pengembangan keterampilan vokasi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global
Transformasi ekonomi belum optimal	Percepatan transformasi ekonomi melalui penguatan sektor unggulan, digitalisasi, dan inovasi berbasis teknologi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan
Ancaman stabilitas daerah masih tinggi	Penguatan stabilitas daerah melalui peningkatan kualitas keamanan, harmonisasi sosial, serta

	penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif
Inovasi daerah masih belum optimal	Peningkatan inovasi daerah melalui penguatan ekosistem riset dan teknologi, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, serta dukungan terhadap pengembangan inovasi berbasis potensi lokal
Reformasi birokrasi yang belum optimal	Percepatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja

Berdasarkan uraian prioritas pembangunan pada tabel diatas, maka dapat diusulkan permasalahan utama pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Kemiskinan dan stunting yang masih tinggi
2. Produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditi unggulan belum optimal
3. Layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal
4. Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas belum optimal
5. Mitigasi bencana kebakaran hutan lahan, banjir, dan tanah longsor belum optimal
6. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi belum optimal
7. Rendahnya kapasitas fiskal dalam mendorong pengembangan wilayah
8. Transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan
9. Reformasi birokrasi

Adapun beberapa Produk Unggulan Daerah (PUD) yang akan dikembangkan tahun 2025-2029 antara lain:

1. Padi
2. Jagung
3. Cabai
4. Bawang Merah

5. Kelapa Sawit
6. Karet
7. Kopi
8. Kelapa
9. Sapi
10. Aneka Ikan (Ikan Patin, Lele, Nila, Mas, Gurame, dan Gabus)
11. Udang
12. Wisata Alam
13. Kerajinan dan Produk Kreatif

1.2 Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- B. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148).
- D. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- E. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

- F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- G. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- H. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52) yang direvisi terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan.
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
- J. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- K. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)

- L. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
- M. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1.3 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di wilayah tersebut. Dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam menyelaraskan agenda riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan, guna mencapai integrasi, keberlanjutan, dan ketepatan dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Adapun tujuan utama dari dokumen ini meliputi:

- 1.) Mengkaji kondisi umum dan riset di Provinsi Sumatera Selatan;
- 2.) Mengidentifikasi tema-tema prioritas dalam riset dan inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 3.) Menganalisis tantangan serta peluang pengembangan riset dan inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 4.) Menelaah kesenjangan antara kebijakan berbasis bukti dengan ekosistem riset dan inovasi di daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 5.) Merumuskan strategi untuk memperkuat dan meningkatkan ekosistem riset dan inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.) Menyusun peta jalan program prioritas riset dan inovasi daerah yang relevan, terintegrasi, dan selaras dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 7.) Merancang strategi berupa rencana aksi dalam mencapai dan mengembangkan tema prioritas 100.000 Sultan Muda Provinsi Sumatera Selatan

1.4 Sistematika Dokumen

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 terdiri atas:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi Daerah
- Bab III. Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi Daerah
- Bab IV. Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah
- Bab V. Strategi Riset dan Inovasi Daerah
- Bab VI. Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah
- Bab VII. Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah
- Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di wilayah selatan Pulau Sumatera yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di kawasan barat Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palembang, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Secara geografis, Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan beberapa provinsi yang meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 17 daerah otonom, yang meliputi 13 kabupaten dan 4 kota.

Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan, yang diundangkan pada tanggal 4 Mei 2023. Undang-undang ini mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950" serta Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Di Sumatera.

2.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi meliputi batas wilayah, administrasi wilayah yang terdiri atas kecamatan, kelurahan/desa dan luas wilayah berdasarkan data geografis. Secara astronomis Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1°25'13"-4°55'17" Lintang Selatan dan 102°3'52"-106°19'45" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi yang strategis dengan berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut ini:

- a) Sebelah Utara : Provinsi Jambi

- Gambar 2. 1** Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan



Dokumen RIPJ PID Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Ogan Komering Ulu	3.774,497	13	14	143
2.	Ogan Komering Ilir	17.068,99	18	13	314
3.	Muara Enim	6.763,912	22	10	245
4.	Lahat	4.333,065	24	18	360
5.	Musi Rawas	6.122,588	14	13	186
6.	Musi Banyuasin	14.550,788	15	13	229
7.	Banyuasin	12.262,756	21	25	288
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	4.369,252	19	7	305
9.	Ogan Komering Ulu Timur	3.412,716	20	7	252
10.	Ogan Ilir	2.302,858	16	14	227
11.	Empat Lawang	2.234,097	10	9	147
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	1.842,563	5	6	65
13.	Musi Rawas Utara	5.937,803	7	7	82
14.	Palembang	352,506	18	107	0
15.	Prabumulih	447,311	6	33	12
16.	Pagar Alam	625,913	5	35	0
17.	Lubuk Linggau	367,726	8	72	0
Sumatera Selatan		86.769,34	241	403	2.855

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Berdasarkan data luas wilayah daratan menurut kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan wilayah dengan daratan terluas, yaitu mencapai 17.068,99 km². Kabupaten Musi Banyuasin berada pada posisi kedua dengan luas wilayah 14.550,788 km².

Kemudian diikuti Kabupaten Banyuasin seluas 12.262,756 km². Adapun wilayah dengan luas daratan terkecil di Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Kota Palembang dengan luas 352,506 km² dan Kota Lubuk Linggau seluas 367,726 km².

Dari segi jumlah kecamatan, Kabupaten Lahat memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yakni sebanyak 24 kecamatan, diikuti oleh Kabupaten Muara Enim sebanyak 22 kecamatan. Sementara itu, jumlah kelurahan terbanyak terdapat di Kota Palembang sebanyak 107 kelurahan, disusul oleh Kota Lubuk Linggau sebanyak 72 kelurahan. Untuk jumlah desa, Kabupaten Lahat menempati urutan tertinggi dengan 360 desa, disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 314 desa.

2.1.2 Aspek Kependudukan

Penduduk suatu wilayah merupakan elemen fundamental dalam proses pembangunan, tidak hanya sebagai sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan pembangunan, tetapi juga sebagai penerima manfaat dari hasil pembangunan tersebut (Hasibuan & Rukiah, 2023). Dalam konteks pengembangan wilayah, keberadaan penduduk sebagai potensi SDM memiliki peran strategis dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya lokal secara arif dan berkelanjutan. Kontribusi penduduk dalam pembangunan mencakup dua dimensi utama, yaitu sebagai subjek yang menggerakkan pembangunan dan sebagai objek yang merasakan dampaknya. Penduduk dapat menjadi aset pembangunan apabila didukung oleh kualitas SDM yang memadai. Sebaliknya, tanpa kualitas yang memadai, keberadaan penduduk justru dapat menjadi tantangan yang menghambat kemajuan. Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menjadi faktor krusial agar jumlah penduduk yang besar dapat memberikan kontribusi nyata dan positif terhadap percepatan pembangunan wilayah secara menyeluruh.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, 2024 ,2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2020	2024	2025
1.	Ogan Komering Ulu	367.603	383.039	386.816
2.	Ogan Komering Ilir	769.348	807.085	816.505
3.	Muara Enim	612.900	640.962	647.936
4.	Lahat	430.071	450.281	455.581
5.	Musi Rawas	395.570	411.787	415.744
6.	Musi Banyuasin	622.206	651.950	659.302
7.	Banyuasin	836.914	885.902	897.425
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	408.981	429.535	434.789
9.	Ogan Komering Ulu Timur	649.853	674.184	680.094
10.	Ogan Ilir	416.549	436.141	441.183
11.	Empat Lawang	333.622	345.641	348.974
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	194.900	205.384	208.032
13.	Musi Rawas Utara	188.861	198.413	200.799
14.	Palembang	1.668.848	1.718.440	1.729.843
15.	Prabumulih	193.196	203.312	205.905
16.	Pagar Alam	143.844	149.199	150.533
17.	Lubuk Linggau	234.166	246.046	249.054
Sumatera Selatan		8.467.432	8.837.301	8.928.515

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa Kota Palembang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 1.718.440 jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 1.729.843 jiwa pada tahun 2025. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Banyuasin dengan jumlah penduduk sebanyak 885.902 jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 897.425 jiwa pada tahun 2025. Sementara itu, Kabupaten Ogan Komering Ilir menempati urutan ketiga,

dengan jumlah penduduk sebanyak 807.085 jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 816.505 jiwa pada tahun 2025.

Sebaliknya, Kota Pagar Alam merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni 149.199 jiwa pada tahun 2024 dan 150.533 jiwa pada tahun 2025. Jumlah penduduk terendah kedua terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan populasi sebesar 198.413 jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 200.799 jiwa pada tahun 2025. Temuan ini menunjukkan adanya variasi jumlah penduduk yang signifikan antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan, dengan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk secara umum dari tahun 2024 ke tahun 2025.

Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk per km² Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, 2024, 2025

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan penduduk per (Jiwa/km ²)		
		2020	2024	2025
1.	Ogan Komering Ulu	76,63	101,48	102,48
2.	Ogan Komering Ilir	41,91	47,28	47,83
3.	Muara Enim	83,00	94,76	95,79
4.	Lahat	80,97	103,92	105,14
5.	Musi Rawas	62,29	67,26	67,90
6.	Musi Banyuasin	43,61	44,81	45,31
7.	Banyuasin	70,73	72,24	73,18
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	74,44	125,86	127,40
9.	Ogan Komering Ulu Timur	192,83	154,30	155,65
10.	Ogan Ilir	156,24	189,39	191,58
11.	Empat Lawang	147,85	154,71	156,20
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	105,92	111,47	112,90
13.	Musi Rawas Utara	31,43	33,42	33,82
14.	Palembang	4.519,93	4.874,87	4.907,22
15.	Prabumulih	766,83	454,52	460,32
16.	Pagar Alam	227,01	238,37	240,50

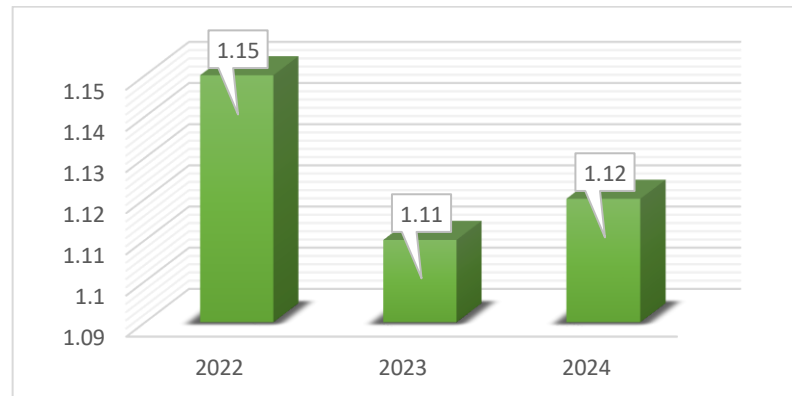
No	Kabupaten/Kota	Kepadatan penduduk per (Jiwa/km ²)		
		2020	2024	2025
17.	Lubuk Linggau	583,23	669,09	677,27
Sumatera Selatan		92,45	101,85	102,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah. Kota Palembang menempati urutan pertama sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 4.874,87 jiwa/km² pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 4.907,22 jiwa/km² pada tahun 2025. Kepadatan tertinggi kedua terdapat di Kota Lubuk Linggau, yang mencatatkan angka sebesar 669,09 jiwa/km² pada tahun 2024 dan 677,27 jiwa/km² pada tahun 2025. Selanjutnya, Kota Prabumulih berada pada posisi ketiga, dengan kepadatan penduduk sebesar 454,52 jiwa/km² pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 460,32 jiwa/km² pada tahun 2025.

Di sisi lain, Kabupaten Musi Rawas Utara tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu 33,42 jiwa/km² pada tahun 2024 dan 33,82 jiwa/km² pada tahun 2025. Kabupaten Musi Banyuasin menempati posisi kedua dengan kepadatan terendah, yakni sebesar 44,81 jiwa/km² pada tahun 2024 dan meningkat sedikit menjadi 45,31 jiwa/km² pada tahun 2025. Data ini mencerminkan adanya konsentrasi penduduk yang lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah kabupaten yang memiliki wilayah geografis lebih luas dan populasi yang tersebar.

Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator demografis yang menggambarkan persentase peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu, biasanya dihitung per tahun. Indikator ini mencerminkan dinamika perubahan jumlah penduduk sebagai hasil dari proses kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Laju pertumbuhan yang stabil dan terukur penting untuk mendukung perencanaan pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan tercatat sebesar 1,15 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 1,11 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut mengalami peningkatan kembali menjadi 1,12 persen. Perubahan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di wilayah ini masih berada dalam kisaran moderat, yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan sumber daya dan penyediaan layanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 2. 4 Populasi Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Ogan Komering Ulu	197.773	189.043	386.816
2.	Ogan Komering Ilir	418.678	397.827	816.505
3.	Muara Enim	330.191	317.745	647.936
4.	Lahat	232.641	222.940	455.581
5.	Musi Rawas	212.339	203.405	415.744
6.	Musi Banyuasin	338.072	321.230	659.302
7.	Banyuasin	459.026	438.399	897.425
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	224.464	210.325	434.789
9.	Ogan Komering Ulu Timur	347.480	332.614	680.094
10.	Ogan Ilir	223.544	217.639	441.183
11.	Empat Lawang	179.062	169.912	348.974
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	105.028	103.004	208.032
13.	Musi Rawas Utara	102.266	98.533	200.799
14.	Palembang	866.246	863.597	1.729.843
15.	Prabumulih	103.479	102.426	205.905
16.	Pagar Alam	76.979	73.554	150.533
17.	Lubuk Linggau	125.355	123.699	249.054
Sumatera Selatan		4.542.623	4.385.892	8.928.515

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 menunjukkan variasi jumlah yang cukup signifikan di antara wilayah kabupaten/kota. Secara keseluruhan jumlah laki-laki di Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak dengan jumlah 4.542.623 jiwa dibandingkan perempuan yang mencapai 4.385.892 jiwa. Kota Palembang tercatat sebagai

wilayah dengan jumlah penduduk laki-laki terbanyak, yaitu sebanyak 866.246 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Banyuasin dengan 459.026 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk laki-laki paling sedikit terdapat di Kota Pagar Alam, yaitu sebesar 76.979 jiwa.

Di sisi lain, Kota Palembang juga menempati posisi tertinggi dalam jumlah penduduk perempuan, yakni sebanyak 863.597 jiwa. Kabupaten Banyuasin kembali menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 438.399 jiwa. Jumlah penduduk perempuan paling sedikit juga tercatat di Kota Pagar Alam, yaitu sebanyak 73.554 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi memiliki konsentrasi penduduk tertinggi untuk kedua jenis kelamin, sedangkan Kota Pagar Alam merupakan wilayah dengan populasi terendah secara relatif, baik laki-laki maupun perempuan

Tabel 2. 5 Populasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	371.212	356.111	727.323
2.	5-9	392.076	374.017	766.093
3.	10-14	395.667	377.841	773.508
4.	15-19	363.980	342.168	706.148
5.	20-24	356.996	336.412	693.408
6.	25-29	361.648	343.685	705.333
7.	30-34	356.097	339.293	695.390
8.	35-39	351.885	336.331	688.216
9.	40-44	331.601	318.300	649.901
10.	45-49	307.232	296.719	603.951
11.	50-54	268.862	261.613	530.475
12.	55-59	221.929	218.726	440.655
13.	60-64	176.078	176.317	352.395
14.	65-69	129.859	131.491	261.350

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
15.	70-74	86.172	90.068	176.240
16.	75+	71.329	86.800	158.129
Jumlah		4.542.623	4.385.892	8.928.515

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Struktur penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan dominasi penduduk usia muda. Kelompok umur 10–14 tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni sebesar 773.508 jiwa, terdiri atas 395.667 laki-laki dan 377.841 perempuan. Kelompok usia terbanyak kedua adalah usia 5–9 tahun dengan jumlah 766.093 jiwa, terdiri atas 392.076 laki-laki dan 374.017 perempuan.

Sementara itu, kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah usia 75 tahun ke atas, yaitu sebanyak 158.129 jiwa, yang terdiri dari 71.392 laki-laki dan 86.800 perempuan. Diikuti oleh kelompok umur 70–74 tahun, yang mencatatkan jumlah 176.240 jiwa, dengan rincian 86.172 laki-laki dan 90.068 perempuan. Distribusi ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak dan remaja, sedangkan proporsi penduduk lansia relatif lebih kecil

2.1.3 Aspek Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah (Suhandi et al., 2020). Aspek ini mencakup berbagai indikator penting, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, kompetensi serta keterampilan tenaga kerja, dan kondisi kerja yang meliputi aspek upah, durasi kerja, hingga perlindungan keselamatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan proporsi penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai tenaga kerja aktif maupun pencari kerja. Di sisi lain, tingkat pengangguran merepresentasikan jumlah individu yang belum memperoleh

pekerjaan meskipun secara aktif mencarinya. Kondisi kerja yang layak, adil, dan aman turut menentukan tingkat kesejahteraan tenaga kerja serta berkontribusi terhadap peningkatan motivasi dan produktivitas. Oleh karena itu, perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan tidak hanya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2. 6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kategori Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja				
		Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja
			Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	
1.	Ogan Komering Ulu	192.425	5.113	3.007	8.120	200.545
2.	Ogan Komering Ilir	408.918	4.383	9.942	14.325	423.243
3.	Muara Enim	328.288	3.371	10.624	13.995	342.283
4.	Lahat	238.301	2.563	5.096	7.659	245.960
5.	Musi Rawas	224.946	1.334	3.106	4.440	229.386
6.	Musi Banyuasin	322.577	4.235	2.797	7.032	329.609
7.	Banyuasin	419.360	8.560	5.497	14.057	433.417
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	257.318	806	3.912	4.718	262.036
9.	Ogan Komering Ulu Timur	379.157	5.288	8.256	13.544	392.701
10.	Ogan Ilir	244.614	2.777	3.886	6.663	251.277
11.	Empat Lawang	205.549	2.067	3.940	6.007	211.556
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	111.755	1.005	3.308	4.313	116.068
13.	Musi Rawas Utara	97.329	1.740	3.289	5.029	102.358
14.	Palembang	744.367	28.027	27.825	55.852	800.219
15.	Prabumulih	98.550	885	4.240	5.125	103.675

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja				
		Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja
			Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	
16.	Pagar Alam	85.100	1.131	904	2.035	87.135
17.	Lubuk Linggau	121.546	3.497	3.298	6.795	128.341
Sumatera Selatan		4.480.100	76.782	102.927	179.709	4.659.809

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang tergolong sebagai angkatan kerja, yaitu penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat sebanyak 4.659.809 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.480.100 jiwa, sedangkan sisanya, yaitu 179.709 jiwa, termasuk dalam kategori pengangguran. Kota Palembang merupakan wilayah dengan jumlah angkatan kerja terbanyak, yakni sebanyak 800.219 jiwa, yang terdiri atas 744.367 jiwa penduduk bekerja dan 55.852 jiwa pengangguran. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Banyuasin dengan total angkatan kerja sebanyak 433.417 jiwa (419.360 bekerja dan 14.057 pengangguran), diikuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 423.243 jiwa (408.918 bekerja dan 14.325 pengangguran).

Sementara itu, jumlah angkatan kerja paling sedikit terdapat di Kota Pagar Alam, yakni sebanyak 87.135 jiwa, dengan rincian 85.100 jiwa bekerja dan 2.035 jiwa pengangguran. Disusul oleh Kabupaten Musi Rawas Utara dengan total angkatan kerja sebanyak 102.358 jiwa (97.329 bekerja dan 5.029 pengangguran). Data ini memberikan gambaran mengenai sebaran potensi tenaga kerja antarwilayah serta menunjukkan dominasi jumlah angkatan kerja di wilayah perkotaan dan padat penduduk, seperti Kota Palembang. Informasi ini penting untuk mendukung perencanaan program ketenagakerjaan dan pengurangan pengangguran secara tepat sasaran di tingkat kabupaten/kota.

Tabel 2. 7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kategori Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Bukan Angkatan Kerja			
		Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
1.	Ogan Komering Ulu	17.487	56.742	6.535	80.764
2.	Ogan Komering Ilir	37.435	124.677	21.098	183.210
3.	Muara Enim	30.909	80.360	18.126	129.395
4.	Lahat	22.798	52.087	16.281	91.166
5.	Musi Rawas	20.677	48.110	9.127	77.914
6.	Musi Banyuasin	34.915	92.901	14.481	142.297
7.	Banyuasin	42.436	159.632	27.088	229.156
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	19.847	39.058	6.894	65.799
9.	Ogan Komering Ulu Timur	37.276	64.246	15.005	116.527
10.	Ogan Ilir	17.788	39.569	13.533	70.890
11.	Empat Lawang	19.523	27.632	12.580	59.735
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	11.652	15.695	3.471	30.818
13.	Musi Rawas Utara	11.023	26.368	6.060	43.451
14.	Palembang	95.848	305.560	77.821	479.229
15.	Prabumulih	12.270	26.092	5.022	43.384
16.	Pagar Alam	8.000	12.930	3.446	24.376
17.	Lubuk Linggau	14.205	27.138	10.470	51.813
Sumatera Selatan		454.089	1.198.797	267.038	1.919.924

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan

bervariasi antar kabupaten/kota. Kota Palembang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah bukan angkatan kerja terbanyak, yaitu sebesar 479.229 jiwa. Dari jumlah tersebut, 95.848 jiwa merupakan penduduk yang masih bersekolah, 305.560 jiwa mengurus rumah tangga, dan 77.821 jiwa termasuk dalam kategori lainnya. Kabupaten Banyuasin menempati urutan kedua dengan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 229.156 jiwa, yang terdiri atas 42.436 jiwa bersekolah, 159.632 jiwa mengurus rumah tangga, dan 27.088 jiwa lainnya.

Kemudian jumlah bukan angkatan kerja paling sedikit terdapat di Kota Pagar Alam, yaitu sebanyak 24.376 jiwa, dengan rincian 8.000 jiwa masih bersekolah, 12.930 jiwa mengurus rumah tangga, dan 3.446 jiwa lainnya. Disusul oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan total sebanyak 30.818 jiwa, yang terdiri dari 11.652 jiwa bersekolah, 15.695 jiwa mengurus rumah tangga, dan 3.471 jiwa lainnya. Data ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan seperti Kota Palembang memiliki jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang tinggi, yang didominasi oleh aktivitas mengurus rumah tangga.

Tabel 2. 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	TPAK (%)
1.	Ogan Komering Ulu	71,29
2.	Ogan Komering Ilir	71,29
3.	Muara Enim	72,57
4.	Lahat	72,96
5.	Musi Rawas	74,65
6.	Musi Banyuasin	69,85
7.	Banyuasin	65,41
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	79,93
9.	Ogan Komering Ulu Timur	77,12
10.	Ogan Ilir	78,00
11.	Empat Lawang	77,98
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	79,02

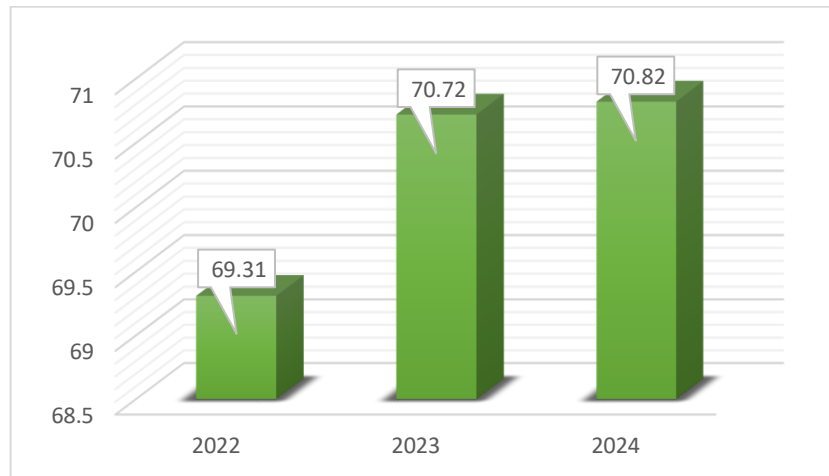
No	Kabupaten/Kota	TPAK (%)
13.	Musi Rawas Utara	70,20
14.	Palembang	62,54
15.	Prabumulih	70,50
16.	Pagar Alam	78,14
17.	Lubuk Linggau	71,24
Sumatera Selatan		70,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana potensi tenaga kerja dimanfaatkan dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencatatkan TPAK tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebesar 79,93 persen. Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan tingkat partisipasi sebesar 79,02 persen, disusul oleh Kota Pagar Alam dengan TPAK sebesar 78,14 persen. Tingginya angka TPAK di wilayah-wilayah tersebut mencerminkan keterlibatan yang relatif tinggi dari penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi.

Sebaliknya, Kota Palembang mencatatkan TPAK terendah di provinsi ini, yaitu sebesar 62,54 persen. Kabupaten Banyuasin menyusul di posisi kedua terendah dengan TPAK sebesar 65,41 persen. Rendahnya tingkat partisipasi ini mengindikasikan adanya potensi angkatan kerja yang belum sepenuhnya terserap atau berpartisipasi dalam pasar kerja secara optimal.

Gambar 2. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, TPAK tercatat sebesar 69,31 persen, kemudian mengalami kenaikan menjadi 70,72 persen pada tahun 2023. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan angka TPAK mencapai 70,82 persen. Kenaikan TPAK ini mengindikasikan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, semakin meningkat. Peningkatan ini dapat mencerminkan membaiknya kondisi pasar kerja, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, serta membaiknya akses terhadap lapangan pekerjaan

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	2.868.429	1.791.380	4.659.809
a. Bekerja	2.760.733	1.719.367	4.480.100
b. Pengangguran Terbuka	107.696	72.013	179.709

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Bukan Angkatan Kerja	474.978	1.444.946	1.919.924
a. Sekolah	211.563	242.526	454.089
b. Mengurus Rumah Tangga	86.630	1.112.167	1.198.797
c. Lainnya	176.785	90.253	267.038
Jumlah	3.343.407	3.236.326	6.579.733

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Struktur penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 4.659.809 jiwa, yang terdiri dari 2.286.429 laki-laki dan 1.791.380 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.480.100 jiwa merupakan penduduk yang bekerja, dengan rincian 2.760.733 laki-laki dan 1.719.367 perempuan. Sementara itu, pengangguran terbuka mencapai 179.709 jiwa, terdiri atas 107.696 laki-laki dan 72.013 perempuan.

Selain itu, jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja sebanyak 1.919.924 jiwa, yang mencakup 474.978 laki-laki dan 1.444.946 perempuan. Kelompok ini terdiri dari penduduk yang masih sekolah sebanyak 454.089 jiwa (211.563 laki-laki dan 242.526 perempuan), penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak 1.198.797 jiwa (86.630 laki-laki dan 1.112.167 perempuan), serta penduduk dalam kategori lainnya sebanyak 267.038 jiwa. Distribusi ini mencerminkan adanya perbedaan signifikan dalam peran dan keterlibatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam kategori bukan angkatan kerja, yang sebagian besar diisi oleh perempuan yang mengurus rumah tangga.

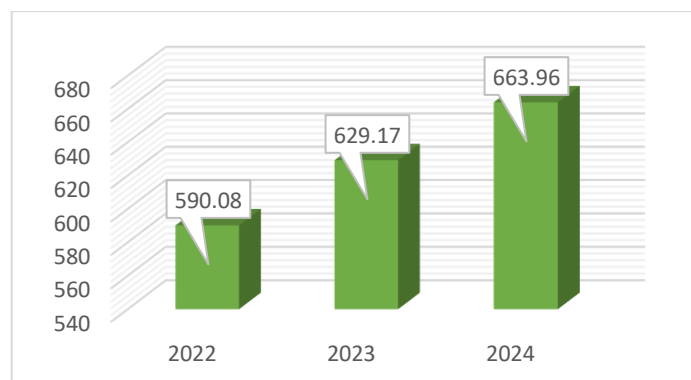
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Produl Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter penting dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Indikator ini menggambarkan kapasitas suatu daerah dalam meningkatkan output barang dan jasa, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup penduduk. Umumnya, pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu akumulasi nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh pelaku usaha di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

PDRB memiliki peran yang penting sebagai indikator utama dalam mencerminkan kondisi perekonomian daerah (Marcal et al., 2024). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengidentifikasi struktur dan dinamika ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dimanfaatkan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil, tanpa pengaruh inflasi. Selain itu, PDRB merupakan parameter yang digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi suatu daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB Provinsi Sumatera Selatan atas dasar harga berlaku menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, nilai PDRB tercatat sebesar Rp454,61 triliun dan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai Rp663,96 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan sekitar 46,05 persen selama periode tersebut.

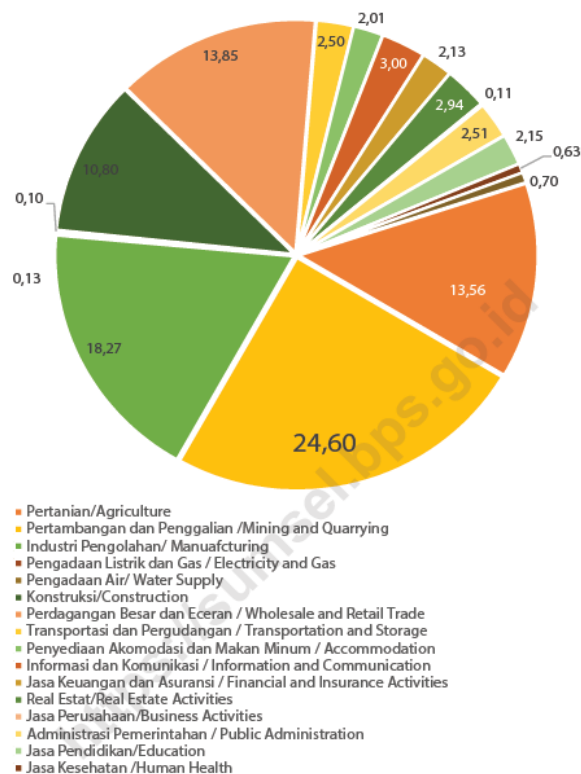
Gambar 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (Triliun Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren pertumbuhan positif selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, nilai PDRB tercatat sebesar Rp590,08 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp629,17 triliun pada tahun 2023, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi Rp663,96 triliun. Pertumbuhan nilai PDRB ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier.

Gambar 2. 5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (%)



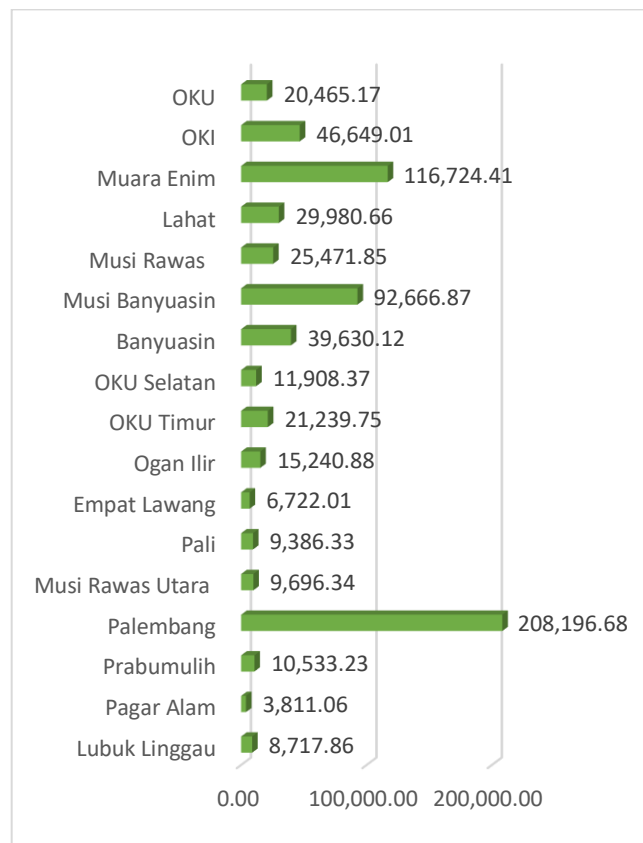
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertambangan dan penggalian menjadi sektor dengan sumbangan tertinggi, yakni sebesar 24,60 persen, menegaskan peran penting sektor ekstraktif dalam aktivitas ekonomi daerah. Kemudian yang

kedua industri pengolahan dengan kontribusi 18,27 persen, yang menunjukkan bahwa kegiatan manufaktur masih menjadi penggerak utama perekonomian regional.

Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, menyumbang 13,85 persen, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,56 persen. Sementara itu, sektor konstruksi turut memberikan andil sebesar 10,80 persen, mencerminkan pertumbuhan pembangunan fisik dan infrastruktur yang cukup signifikan. Pola distribusi ini memperlihatkan ketergantungan ekonomi daerah pada sektor sumber daya alam, namun juga mulai menunjukkan dinamika dari sektor-sektor non-ekstraktif.

Gambar 2. 6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Pada tahun 2024, capaian PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antar wilayah. Kota Palembang mencatatkan nilai PDRB tertinggi, yakni sebesar Rp208.196,68 miliar, mencerminkan posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan jasa di provinsi ini. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Muara Enim dengan PDRB sebesar Rp116.724,42 miliar, yang didukung oleh sektor energi dan pertambangan yang kuat. Sementara itu, Kabupaten Musi Banyuasin berada di urutan ketiga dengan nilai PDRB sebesar Rp92.666,87 miliar, yang juga ditopang oleh kekayaan sumber daya alam, terutama di sektor migas dan perkebunan.

Kemudian kontribusi ekonomi terkecil berasal dari Kota Pagar Alam, yang hanya mencatatkan PDRB sebesar Rp3.811,06 miliar, disusul oleh Kabupaten Empat Lawang dengan nilai Rp6.722,01 miliar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kapasitas ekonomi antar wilayah yang dapat menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pemerataan pembangunan daerah di Sumatera Selatan

B. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap individu di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Nilai ini diperoleh dengan membagi total PDRB wilayah dengan jumlah penduduknya. PDRB per kapita memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi dan produktivitas rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, umumnya dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta standar hidup yang lebih tinggi. Namun demikian, indikator ini tidak mencerminkan sebaran pendapatan secara merata, karena tidak memperhitungkan tingkat ketimpangan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, analisis PDRB per kapita sebaiknya dilengkapi dengan indikator lain seperti tingkat kemiskinan dan indeks ketimpangan untuk memperoleh

pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kesejahteraan ekonomi suatu daerah.

Tabel 2. 10 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (ribu rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Ogan Komering Ulu	46.956,97	50.033,94	53.428,43
2.	Ogan Komering Ilir	50.036,05	53.879,82	57.799,38
3.	Muara Enim	181.316,34	187.001,31	182.108,16
4.	Lahat	63.324,37	65.825,28	66.582,12
5.	Musi Rawas	55.375,46	57.706,40	61.856,86
6.	Musi Banyuasin	129.485,96	132.949,92	142.138,01
7.	Banyuasin	39.591,78	43.052,03	44.734,20
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	24.664,95	26.144,88	27.723,86
9.	Ogan Komering Ulu Timur	26.951,67	29.137,58	31.504,38
10.	Ogan Ilir	31.101,86	33.033,38	34.944,85
11.	Empat Lawang	17.200,95	18.363,83	19.447,96
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	40.987,66	43.018,71	45.701,35
13.	Musi Rawas Utara	44.188,87	46.269,54	48.869,47
14.	Palembang	105.749,96	114.025,38	121.154,47
15.	Prabumulih	46.471,27	49.005,76	51.808,22
16.	Pagar Alam	22.235,85	23.611,51	25.543,50
17.	Lubuk Linggau	32.052,19	33.886,94	35.431,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2022 hingga 2024 memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antar kabupaten/kota. Kabupaten Muara Enim secara konsisten mencatat nilai PDRB per kapita tertinggi, yakni sebesar Rp181.316,34 pada tahun

2022, meningkat menjadi Rp187.001,31 pada 2023, dan mencapai Rp182.108,16 ribu pada 2024. Posisi ini mengindikasikan dominasi sektor energi dan pertambangan di wilayah tersebut. Pada posisi kedua, Kabupaten Musi Banyuasin mencatat PDRB per kapita sebesar Rp129.485,96 ribu pada 2022, naik menjadi Rp132.949,92 ribu pada 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp142.138,01 ribu pada tahun 2024. Sementara itu, Kota Palembang menempati urutan ketiga dengan tren pertumbuhan yang stabil, dari Rp105.749,96 ribu pada 2022 menjadi Rp114.025,38 ribu pada 2023, dan Rp121.154,47 ribu pada 2024.

Sementara itu Kabupaten Empat Lawang tercatat sebagai wilayah dengan nilai PDRB per kapita terendah, meskipun menunjukkan tren peningkatan, yakni dari Rp17.200,95 ribu pada tahun 2022 menjadi Rp18.363,83 ribu pada 2023, dan Rp19.447,96 ribu pada tahun 2024. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan produktivitas ekonomi per individu yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah provinsi.

Tabel 2. 11 Laju Pertumbuhan PRDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (%)

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Ogan Komering Ulu	4,43	3,99	3,99
2.	Ogan Komering Ilir	18,26	3,98	3,88
3.	Muara Enim	7,42	7,32	4,70
4.	Lahat	5,65	5,43	3,87
5.	Musi Rawas	2,93	2,95	3,91
6.	Musi Banyuasin	2,96	3,25	3,73
7.	Banyuasin	3,85	3,64	3,76
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	3,47	2,84	3,28
9.	Ogan Komering Ulu Timur	4,39	4,05	4,16
10.	Ogan Ilir	3,73	3,45	3,59
11.	Empat Lawang	3,83	3,18	3,40
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	2,96	3,24	3,59

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2022	2023	2024
13.	Musi Rawas Utara	3,09	3,00	3,23
14.	Palembang	4,43	4,33	4,39
15.	Prabumulih	3,62	3,41	3,65
16.	Pagar Alam	3,82	3,35	4,09
17.	Lubuk Linggau	3,12	3,10	3,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Pada tabel 2.11 diatas menunjukkan bahwa selama periode 2022 hingga 2024, pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan fluktuasi antar wilayah. Pada tahun 2022, Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,26 persen, disusul oleh Kabupaten Muara Enim sebesar 7,42 persen, dan Kabupaten Lahat sebesar 5,65 persen. Lonjakan pertumbuhan di Ogan Komering Ilir mencerminkan peningkatan signifikan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2023, posisi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Muara Enim dengan pertumbuhan 7,32 persen, sementara Kabupaten Lahat kembali menempati posisi kedua dengan 5,43 persen, dan Kota Palembang berada di urutan ketiga dengan 4,33 persen. Kinerja positif Kota Palembang mengindikasikan stabilnya ekspansi sektor jasa dan perdagangan di ibu kota provinsi. Kemudian pada tahun 2024, Kabupaten Muara Enim tetap mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 4,70 persen, diikuti oleh Kota Palembang sebesar 4,39 persen, serta Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 4,16 persen. Data ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi sektoral, investasi, serta kebijakan pembangunan daerah masing-masing.

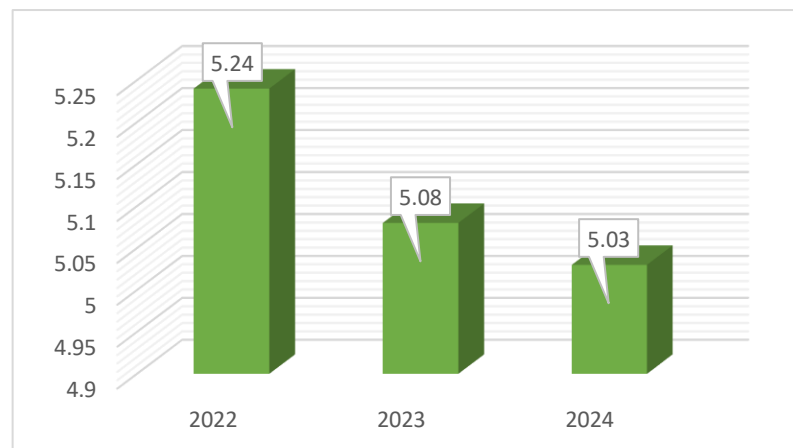
C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mengalami sedikit perlambatan dengan capaian sebesar 5,03 persen. Meskipun

demikian, perekonomian daerah tetap menunjukkan dinamika yang cukup positif di tengah berbagai tantangan nasional dan global. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, terdapat tiga wilayah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total PDRB provinsi. Ketiga wilayah tersebut adalah Kota Palembang dengan kontribusi sebesar 30,75 persen, disusul oleh Kabupaten Muara Enim sebesar 17,24 persen, dan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 13,69 persen.

Sementara itu, dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Muara Enim mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 4,70 persen, diikuti oleh Kota Palembang sebesar 4,39 persen, dan Kota Pagar Alam sebesar 4,09 persen. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Palembang menjadi pusat utama aktivitas ekonomi, wilayah lain seperti Muara Enim dan Pagar Alam juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan.

Gambar 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren melambat, meskipun tetap berada pada tingkat yang stabil. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,24 persen, kemudian menurun menjadi 5,08 persen pada tahun 2023, dan kembali sedikit melambat menjadi 5,03 persen pada tahun 2024. Penurunan laju pertumbuhan

ini mencerminkan tantangan struktural dan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian daerah, termasuk fluktuasi harga komoditas unggulan, dinamika ekonomi global, serta proses pemulihan pasca-pandemi. Kendati demikian, capaian tersebut masih tergolong positif karena mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di atas angka lima persen secara konsisten. Stabilitas pertumbuhan ini menunjukkan adanya resiliensi dalam struktur ekonomi Sumatera Selatan. Ke depan, diperlukan strategi penguatan sektor produktif, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan daya saing daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

D. Pendapatan dan Belanja Daerah

Selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp9.278.520.060.062 dan meningkat menjadi Rp9.871.340.904.349 pada tahun 2023. Secara rata-rata, pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 2,09 persen per tahun. Namun, peningkatan ini berlangsung relatif lambat dan belum cukup untuk menutup defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2022–2023, yang sebagian besar ditutupi melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun-tahun sebelumnya.

Lambatnya pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dari sisi ekonomi, terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap beberapa komoditas unggulan seperti batubara, karet, kelapa sawit, dan kopi, yang harganya sangat fluktuatif dan berdampak langsung terhadap pendapatan daerah. Selain itu, pelemahan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan geopolitik turut menekan permintaan ekspor dari Sumatera Selatan. Gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya logistik selama masa pandemi juga memperburuk kondisi sektor perdagangan dan industri. Faktor-faktor ini secara keseluruhan berkontribusi pada penurunan kinerja pendapatan, sehingga menuntut upaya intensif dari pemerintah daerah

untuk mencari dan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Tabel 2. 12 Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

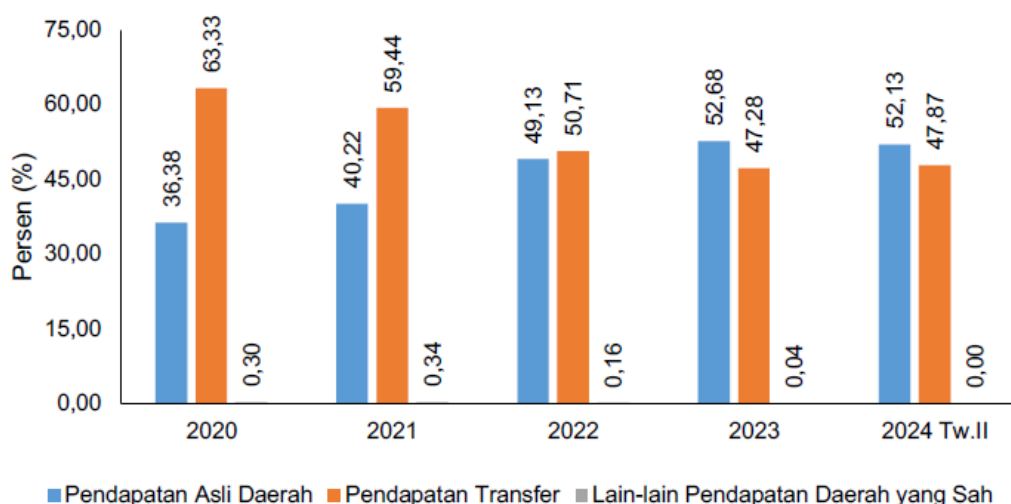
Uraian	Tahun					Pertumbuhan 2020-2023
	2020	2021	2022	2023	2024 Tw.II	
I. PENDAPATAN DAERAH	9.278.520.060.062	9.611.291.244.667	10.036.955.961.133	9.871.340.904.349	4.687.788.699.398	2,09
1. Pendapatan Asli Daerah	3.375.100.984.842	3.865.463.033.085	4.930.954.855.678	5.199.841.748.586	2.443.560.523.016	15,50
1.1. Pendapatan Pajak Daerah	3.081.800.984.700	3.523.785.342.246	4.461.152.465.008	4.649.349.674.256	2.122.460.418.317	14,69
1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	8.234.552.913	9.313.749.306	12.185.155.716	13.182.254.856	3.711.970.177	16,98
1.3. Hasil Kekayaan Daerah Dipisahkan	82.836.132.370	65.714.183.659	153.032.882.582	223.885.947.856	127.787.209.197	39,30
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	202.229.314.860	266.649.757.874	304.584.352.371	313.423.871.618	189.600.925.325	15,73
2. Pendapatan Transfer	5.875.896.342.538	5.712.683.072.712	5.090.093.999.526	4.667.616.469.087	2.244.228.176.382	-7,39
2.1. Transfer Pemerintah Pusat	5.835.674.693.538	5.712.683.072.712	5.029.223.442.526	4.667.616.469.087	2.244.228.176.382	-7,17
a. DBH-Pajak dan Bukan Pajak	1.933.269.369.100	1.891.734.449.581	2.442.737.296.896	1.854.967.347.879	939.676.066.826	-1,37
b. DAU	1.568.602.615.000	1.563.041.287.000	1.563.041.287.000	1.653.766.188.000	1.062.769.464.650	1,78
c. DAK	203.718.863.552	220.514.359.267	188.860.939.022	261.641.344.656	241.782.644.906	8,70
d. DAK Non Fisik	2.130.083.845.886	2.037.392.976.864	834.583.919.608	897.571.247.002	0,00	-25,03
2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	40.221.649.000	0,00	60.870.557.000	0,00	0,00	0,00
a. Dana Penyesuaian	40.221.649.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	60.870.557.000	0,00	0,00	0,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.522.732.682	33.145.138.870	15.907.105.929	3.882.686.676	0,00	-47,94
3.1. Pendapatan Hibah	26.967.232.682	33.145.138.870	15.907.105.929	3.882.686.676	0,00	-47,59
3.2. Pendapatan Lainnya	555.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. BELANJA	9.517.763.493.966	10.060.730.280.979	9.663.575.726.751	9.653.373.230.507	6.260.996.576.416	0,47
1. Belanja Operasi	5.038.670.309.776	5.365.031.503.749	4.499.276.793.174	4.913.125.539.886	4.432.689.636.066	-0,84
1.1. Belanja Pegawai	1.771.524.397.218	1.923.290.549.742	2.092.571.068.579	2.158.618.753.463	2.429.936.814.511	6,81
1.2. Belanja Barang dan Jasa	1.392.760.537.519	1.811.885.209.417	2.042.275.862.382	2.297.732.037.188	1.272.510.439.766	18,16
1.3. Belanja Bunga	0,00	382.096.916	13.227.699.524	8.817.133.280	452.418.195.060	0,00
1.4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.701.935	0,00
1.5. Belanja Hibah	1.873.445.636.521	1.629.473.647.674	351.202.162.689	447.957.615.955	0,00	-37,93
1.6. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	265.694.434.794	0,00
1.7. Belanja Biaya Provisi	939.738.518	0,00	0,00	0,00	9.981.050.000	0,00
2. Belanja Modal	1.664.700.767.364	1.836.834.114.022	1.536.370.414.095	1.239.943.154.569	427.183.992.957	-9,35
2.1. Belanja Tanah	14.597.408.000	70.853.405.527	8.708.743.955	1.743.753.503	213.591.996.478	-50,75
2.2. Belanja Peralatan/Mesin	181.062.816.387	288.834.883.969	342.811.302.542	363.526.584.860	236.077.103	26,15
2.3. Belanja Bangunan/Gedung	201.564.960.985	289.050.835.757	361.568.165.910	266.557.790.089	50.208.969.533	9,76
2.4. Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	904.310.171.568	1.107.398.086.860	747.812.255.898	541.178.479.004	24.081.215.704	-15,73
2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya	53.768.783.085	80.696.301.908	75.469.945.790	65.940.480.613	137.054.711.868	7,04
2.6. Belanja Modal Aset Lainnya	215.967.588.497	0,00	0,00	996.066.500	1.448.631.298	-83,35
2.7. Belanja Modal BLUD	12.330.403.046	0,00	0,00	0,00	562.390.972	0,00
2.8. Belanja Modal BOS	81.098.635.795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Belanja Tak Terduga	197.104.066.605	14.055.098.162	19.553.804.801	0,00	100.000.000.000	0,00
3.1. Belanja Tak Terduga	197.104.066.605	14.055.098.162	19.553.804.801	0,00	100.000.000.000	0,00
4. Belanja Transfer Bantuan Keuangan	2.617.288.350.222	2.844.809.545.046	3.608.374.714.680	3.500.304.536.052	1.401.122.947.393	10,18
4.1. Belanja BH-Pajak ke Pem. Kab/Kota/Desa	1.455.636.933.603	1.579.375.912.864	1.914.984.234.446	2.179.118.758.571	882.576.184.120	14,40
4.2. Belanja Bantuan Keuangan ke Kab/Kota/Desa	1.161.651.416.619	1.265.433.632.182	1.693.390.480.234	1.321.185.777.481	518.546.763.273	4,38
III. PEMBIAYAAN	589.092.782.358	701.159.551.423	354.251.259.039	708.750.674.543	174.519.154.887	6,36
1. Penerimaan Pembiayaan	474.977.880.806	615.159.551.423	151.894.033.565	322.795.834.055	154.808.667.410	-12,08
1.1. Penggunaan S/LPA	349.234.370.470	121.593.374.660	79.713.949.496	322.795.834.055	0,00	-2,59
1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah	125.743.510.336	493.566.176.763	72.180.084.070	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	114.114.901.552	86.000.000.000	202.357.225.474	385.954.840.488	19.710.487.477	50,11
2.1. Penyertaan Modal Daerah	114.114.901.552	86.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0,00	0,00	202.357.225.474	385.954.840.488	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	360.862.979.254	529.159.551.423	- 50.463.191.909	-63.159.006.433	135.098.179.933	-155,94
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN	121.619.545.351	79.720.535.111	322.917.042.473	154.808.667.410	0,00	8,38

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov. Sumatera Selatan 2020-2024

Pendapatan Daerah terbagi ke dalam tiga sumber utama, yakni: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komposisi ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Berdasarkan data pada Gambar 2.8 terlihat bahwa kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah

selama periode tersebut berasal dari Pendapatan Transfer, dengan rata-rata sebesar 53,73 persen. Posisi kedua ditempati oleh Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang rata-rata 46,10 persen terhadap total pendapatan. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi yang relatif kecil, yaitu rata-rata sebesar 0,17 persen. Pola ini menunjukkan ketergantungan fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang masih cukup tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat, meskipun kontribusi PAD menunjukkan tren yang cukup signifikan dalam mendukung pembiayaan daerah.

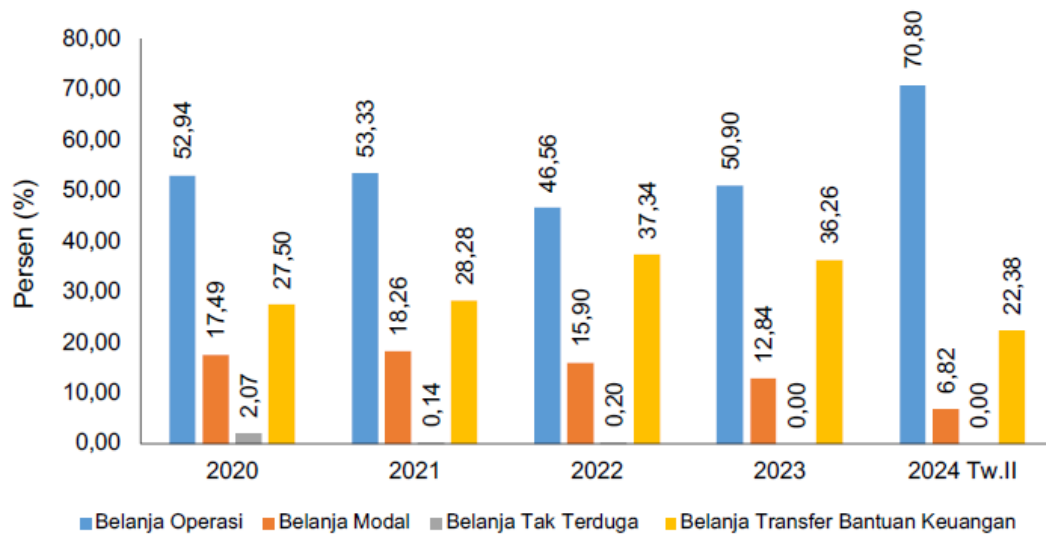
Gambar 2. 8 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah dibandingkan dengan komponen Pendapatan Transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti (a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum (DAU), (c) Dana Alokasi Khusus (DAK), serta (d) Dana Insentif Daerah (DID). Ketergantungan ini menjadi tantangan bagi kepala daerah maupun pemerintahan untuk meningkatkan PAD melalui eksplorasi potensi sumber pendapatan baru guna mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal

Gambar 2. 9 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Prov, Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

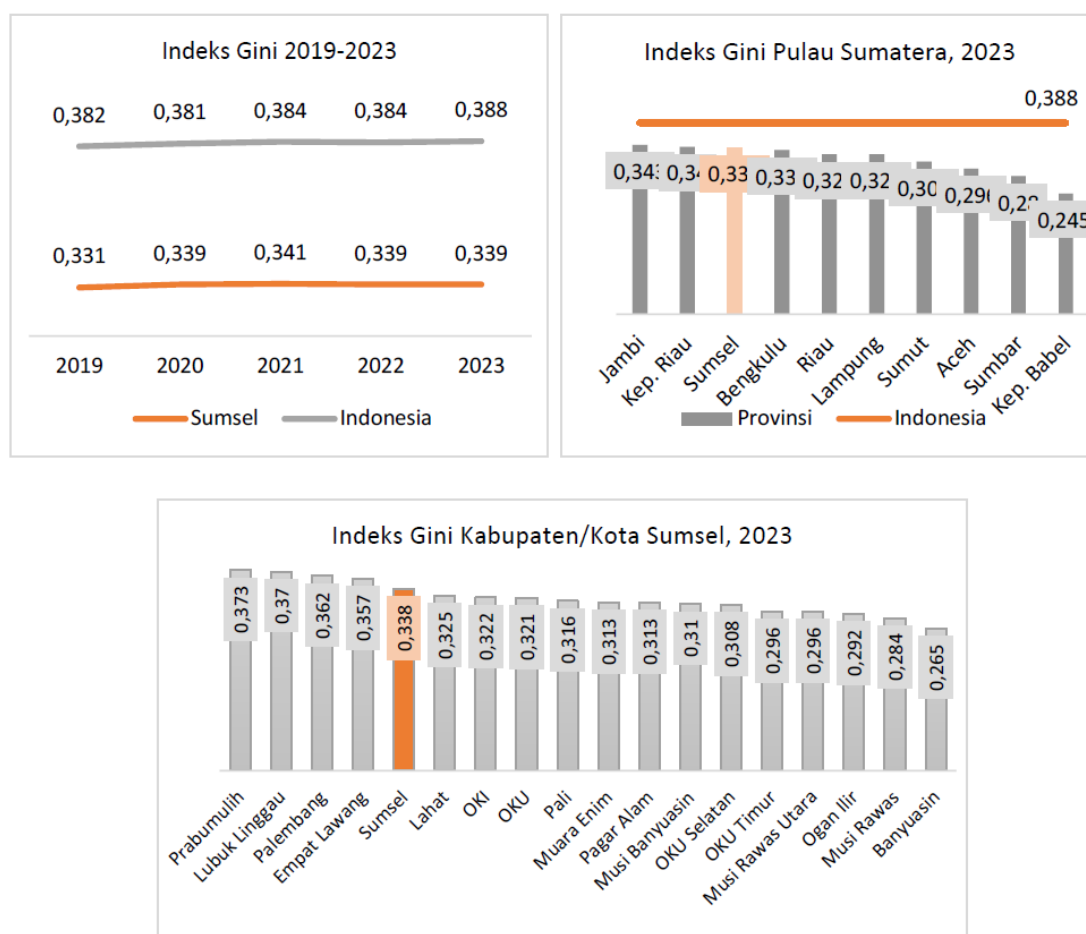
Gambar 2.9 diatas menunjukkan distribusi proporsi realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020 hingga Triwulan II tahun 2024, yang mencakup empat kategori belanja: (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, (iii) Belanja Tak Terduga, dan (iv) Belanja Transfer dalam bentuk Bantuan Keuangan. Dari data yang tersedia, Belanja Operasi tercatat sebagai komponen terbesar dalam total belanja daerah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 54,90 persen. Selanjutnya, Belanja Transfer Bantuan Keuangan menyumbang rata-rata 30,35 persen, diikuti oleh Belanja Modal dengan rata-rata 14,26 persen, dan terakhir Belanja Tak Terduga sebesar 0,48 persen selama periode tersebut.

E. Indeks Gini

Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019–2023 konsisten berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2019, Indeks Gini Sumatera Selatan tercatat sebesar 0,331 dan mengalami kenaikan menjadi 0,339 pada tahun 2023. Sementara itu, Indeks Gini nasional naik dari 0,382 pada tahun

2019 menjadi 0,388 pada tahun 2023. Peningkatan ketimpangan nasional tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan Indeks Gini di wilayah perkotaan yang meningkat dari 0,402 menjadi 0,409, sedangkan di perdesaan relatif stagnan pada angka 0,313. Secara umum, tren ketimpangan pendapatan baik di Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional menunjukkan pola yang berfluktuasi sepanjang periode tersebut.

Gambar 2. 10 Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota pada tahun 2023, terdapat empat daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki nilai Indeks Gini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, yaitu Kota Prabumulih (0,373), Kota Lubuklinggau (0,370), Kota Palembang (0,362), dan Kabupaten Empat Lawang (0,357). Sementara itu, nilai Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan tercatat

sebesar 0,338. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di keempat daerah tersebut masih relatif tinggi, atau dengan kata lain, tingkat pemerataan pendapatan belum tercapai secara optimal.

Sebaliknya, terdapat tiga belas kabupaten/kota lain yang memiliki nilai Indeks Gini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Nilai terendah tercatat di Kabupaten Banyuasin sebesar 0,265, yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di wilayah tersebut lebih merata dibandingkan daerah lainnya. Keadaan ini didukung oleh struktur ekonomi yang lebih inklusif serta peran sektor pertanian yang dominan dalam melibatkan masyarakat secara luas pada kegiatan ekonomi. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat ketiga dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Jambi (0,343) dan Provinsi Kepulauan Riau (0,340). Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan semakin besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah.

F. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar guna mempertahankan kehidupan yang layak. Kebutuhan tersebut mencakup aspek pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. Dampak dari kemiskinan tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial serta menghambat proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor agar penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024

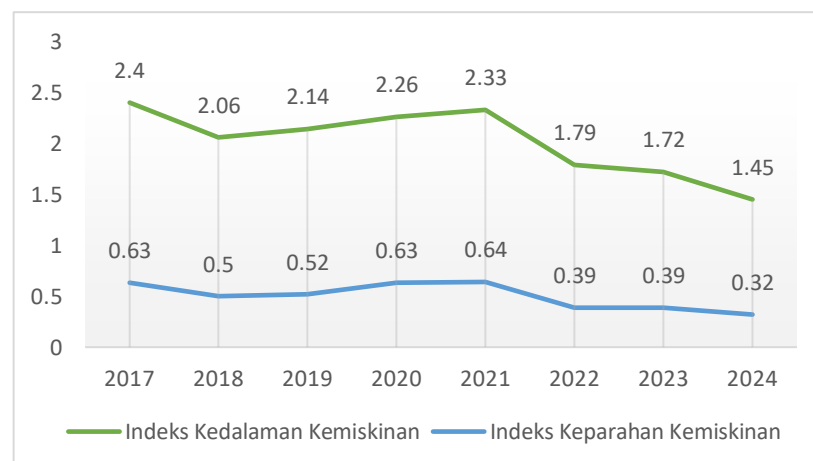
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase (%)	
		2023	2024	2023	2024
1.	Ogan Komering Ulu	44,11	41,54	11,46	10,68
2.	Ogan Komering Ilir	114,48	106,37	13,15	12,08
3.	Muara Enim	73,24	66,42	10,93	9,79
4.	Lahat	63,36	60,19	15,00	14,14
5.	Musi Rawas	59,75	57,44	14,13	13,44
6.	Musi Banyuasin	101,63	88,94	14,90	12,88
7.	Banyuasin	85,88	84,36	9,58	9,31
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	39,30	37,81	10,36	9,86
9.	Ogan Komering Ulu Timur	69,91	68,74	9,99	9,75
10.	Ogan Ilir	59,33	55,49	13,28	12,3
11.	Empat Lawang	30,78	28,42	11,80	10,78
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	21,72	19,79	10,91	9,82
13	Musi Rawas Utara	36,67	35,29	18,26	17,38
14.	Palembang	179,45	173,59	10,22	9,77
15.	Prabumulih	22,33	20,41	11,23	10,13
16.	Pagar Alam	12,73	11,82	8,88	8,18
17.	Lubuk Linggau	31,02	27,65	12,65	11,14
Sumatera Selatan		1.045,68	984,24	11,78	10,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan penurunan selama periode 2023–2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 tercatat sebesar 1.045,68 ribu jiwa atau 11,78 persen dari total populasi, dan menurun menjadi 984,24 ribu jiwa atau 10,97 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

Dari sisi sebaran wilayah, jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2024 masih tercatat di Kota Palembang dengan 173,59 ribu jiwa (9,77 persen), diikuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 106,37 ribu jiwa (12,08 persen), dan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 88,94 ribu jiwa (12,88 persen). Meskipun Kota Palembang mencatat angka absolut tertinggi, persentase penduduk miskin justru lebih tinggi di beberapa wilayah kabupaten. Secara umum, capaian penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan mengindikasikan arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang cukup efektif, namun masih diperlukan perhatian khusus pada daerah dengan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang relatif tinggi, terutama di wilayah dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata provinsi.

Gambar 2. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Selama periode 2017 hingga 2024, Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perbaikan signifikan dalam aspek kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini tercermin dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan yang menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2017, indeks ini berada di angka 2,40, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 1,45 pada tahun 2024. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang mencerminkan

ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini menurun dari 0,63 pada tahun 2017 menjadi 0,32 pada tahun 2024. Penurunan kedua indikator ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi juga kondisi kemiskinan itu sendiri semakin tidak ekstrem, baik dari sisi jarak terhadap garis kemiskinan maupun tingkat ketimpangan antarpenduduk miskin.

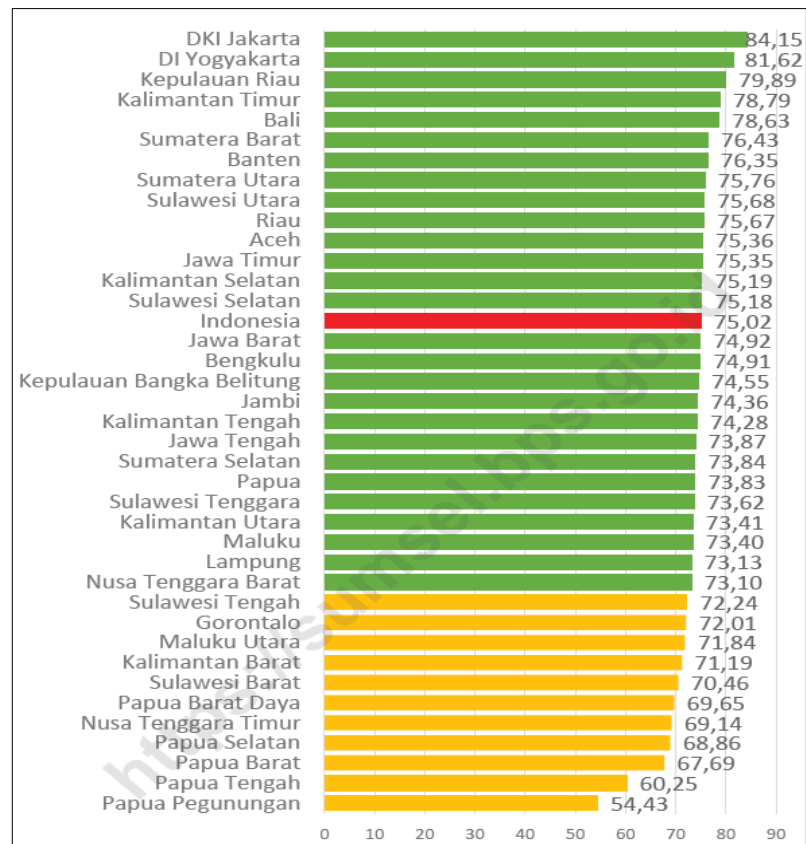
Perbaikan indikator ini merupakan sinyal positif bagi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah. Namun demikian, keberlanjutan dan perluasan cakupan program, khususnya bagi kelompok rentan, tetap menjadi kunci untuk mendorong pencapaian target pengurangan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kemampuan penduduk suatu wilayah dalam mengakses manfaat pembangunan di berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan hingga kini secara rutin diterbitkan dalam Human Development Report setiap tahunnya.

IPM bertujuan menyajikan potret pembangunan manusia yang lebih menyeluruh dibandingkan pengukuran ekonomi semata, seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat tiga dimensi utama yang membentuk IPM dan saling berkaitan. Pertama, dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur melalui indikator harapan hidup saat lahir dan mencerminkan kondisi kesehatan serta akses terhadap layanan medis. Kedua, dimensi pendidikan, diukur dari rata-rata lama sekolah penduduk dewasa dan harapan lama sekolah anak-anak usia sekolah, yang menggambarkan kualitas dan keterjangkauan pendidikan. Ketiga, dimensi standar hidup yang layak, direpresentasikan oleh Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli, sebagai cerminan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses berbagai fasilitas penunjang kesejahteraan.

Gambar 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan mencatat skor sebesar 73,84, menempatkannya pada peringkat ke-21 dari seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 75,02, namun masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua yang mencatat IPM sebesar 73,83, dan sedikit lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki IPM sebesar 73,87.

Pencapaian ini mencerminkan kemajuan pembangunan manusia di Sumatera Selatan yang relatif stabil, namun masih menyisakan ruang untuk peningkatan, khususnya dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dengan posisi yang cukup kompetitif di tingkat nasional, penguatan kebijakan pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci untuk mendorong kenaikan IPM secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi

Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Ogan Komering Ulu	71,79	72,41	73,17	73,70
2.	Ogan Komering Ilir	69,33	70,17	70,80	71,48
3.	Muara Enim	70,95	71,52	72,33	73,10
4.	Lahat	70,62	71,45	72,15	72,83
5.	Musi Rawas	69,26	70,04	70,52	71,21
6.	Musi Banyuasin	70,25	70,73	71,30	72,27
7.	Banyuasin	69,15	69,95	70,67	71,55
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	67,85	68,33	69,05	70,00
9.	Ogan Komering Ulu Timur	71,68	72,33	73,05	73,64
10.	Ogan Ilir	70,40	71,20	72,01	72,67
11.	Empat Lawang	67,77	68,39	69,07	69,63
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	67,03	67,89	68,78	69,63
13.	Musi Rawas Utara	67,94	68,76	69,63	70,45
14.	Palembang	80,46	81,19	81,72	82,29
15.	Prabumulih	76,30	77,14	78,07	78,68
16.	Pagar Alam	71,47	72,40	73,25	74,00
17.	Lubuk Linggau	77,09	77,71	78,36	78,98
	Sumatera Selatan	71,83	72,48	73,18	73,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, IPM tercatat sebesar 71,83, meningkat menjadi 72,48 pada tahun 2022, 73,18 pada tahun 2023, dan mencapai 73,84 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Pada tahun 2024, Kota Palembang mencatat IPM tertinggi di provinsi ini, yaitu sebesar 82,29, diikuti oleh Kota Lubuk Linggau dengan 78,98, dan Kota Prabumulih sebesar 78,68. Sebaliknya, IPM terendah tercatat di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang keduanya memiliki skor IPM sebesar 69,63. Ketimpangan antarwilayah ini menandakan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terfokus pada wilayah-wilayah dengan capaian IPM rendah, agar pembangunan manusia dapat berlangsung secara lebih merata dan inklusif di seluruh Sumatera Selatan.

2.1.5 Produk Unggulan Daerah

Produk Unggulan Daerah (PUD) merujuk pada komoditas atau jasa khas yang mencerminkan keunikan suatu wilayah, memiliki daya saing tinggi, serta mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat (Budiyanto, 2023). Produk ini dikembangkan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan orientasi pasar yang mencakup skala lokal, nasional, hingga regional. Dalam konteks otonomi daerah, upaya pengembangan dan pemberdayaan PUD sebagai bagian dari potensi ekonomi daerah tidaklah sederhana, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan komitmen politik Pemerintah Daerah (Alfitri & Nawangsari, 2025). Secara umum, PUD bisa dihasilkan oleh koperasi serta pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), dan dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Proses pengembangan tersebut menuntut pemanfaatan optimal terhadap sumber daya lokal, baik itu alam, manusia, maupun budaya. Produk unggulan yang berhasil dikembangkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, tetapi juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan keunggulan kompetitif, nilai jual yang tinggi, serta potensi untuk menembus pasar global. Berikut ini beberapa Produk Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Sumatera Selatan:

1. Padi : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor tanaman pangan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap ketahanan pangan

daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2024 total produksi padi mencapai 2.909.411,67 ton. Kabupaten Banyuasin menjadi penyumbang produksi terbesar dengan 948.088,97 ton, disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 731.587,52 ton, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 578.805,35 ton. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung padi di wilayah Sumatera.

2. Jagung : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor tanaman pangan yang memiliki potensi strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, total produksi jagung mencapai 826.836,19 ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 369.468,68 ton. Capaian ini menunjukkan peran penting jagung sebagai komoditas andalan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian.
3. Cabai : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang stabil sepanjang tahun. Komoditas cabai menjadi salah satu penopang ketahanan pangan dan pengendali inflasi daerah. Sentra produksi cabai tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Musi Banyuasin dengan masing-masing luas areal tanam mencapai sekitar 2 hektar. Produksi cabai di

Sumatera Selatan menunjukkan dukungan pemerintah daerah dalam penguatan rantai pasok dan pemasaran hasil pertanian.

4. Bawang Merah : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor hortikultura yang terus dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Total produksi bawang merah di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 8.965,03 kwintal, dengan Kota Pagar Alam sebagai penyumbang terbesar yaitu sebesar 5.776 kwintal. Pengembangan komoditas ini juga mendapat dukungan sarana dan prasarana produksi di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Musi Rawas Utara dengan masing-masing luas lahan sekitar 2 hektar.
5. Kelapa Sawit : Komoditas strategis bagi perekonomian Sumatera Selatan dengan produksi mencapai 3.370.529 ton. Penyumbang produksi terbesar berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 945.004 ton dan Kabupaten Banyuasin sebesar 530.137 ton. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki dasar kebijakan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, sebagai upaya menjaga keseimbangan antara produktivitas, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
6. Karet : Produk unggulan utama Provinsi Sumatera Selatan yang berperan penting dalam perekonomian daerah,

khususnya di sektor perkebunan rakyat. Produksi karet di Sumatera Selatan mencapai 1.003.780 ton, dengan penyumbang terbesar berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 211.366 ton dan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 191.296 ton. Komoditas ini menjadi salah satu andalan ekspor daerah dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil.

7. Kopi : Produk unggulan perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dengan total produksi mencapai 207.320 ton. Kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 61.616 ton dan Kabupaten Empat Lawang sebesar 53.194 ton. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendukung pengembangan komoditas ini melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan, yang berfokus pada peningkatan kualitas, daya saing, serta penguatan posisi kopi Sumatera Selatan di pasar nasional dan internasional.
8. Kelapa : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan di subsektor perkebunan yang berpotensi tinggi untuk pengembangan industri turunan. Produksi kelapa di Sumatera Selatan mencapai 61.564 ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Banyuasin sebesar 46.927 ton. Potensi pengembangan kelapa di daerah ini dapat diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui

diversifikasi produk olahan serta penguatan rantai pasok berbasis masyarakat.

9. Sapi : Produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor peternakan yang berperan penting dalam penyediaan daging dan penguatan ketahanan pangan daerah. Populasi sapi di Sumatera Selatan mencapai 276.812 ekor, dengan penyumbang terbanyak berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 64.549 ekor dan Kabupaten Banyuasin sebanyak 46.352 ekor. Pengembangan komoditas ini didukung oleh kebijakan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2018
10. Aneka Ikan (Patin, Lele, Nila, Mas, Gurame, Gabus) : Aneka ikan air tawar merupakan salah satu produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan pada subsektor perikanan budidaya yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat nasional yang membanggakan, dengan ikan patin peringkat 1 nasional dan produksi mencapai 91.935.179 kg, ikan lele peringkat 4 nasional dengan 100.917.788 kg, ikan nila peringkat 6 nasional dengan 68.936.768 kg, ikan mas peringkat 5 nasional dengan 23.992.625 kg, ikan gurame peringkat 7 nasional dengan 7.014.652 kg, serta ikan gabus peringkat 3 nasional dengan 6.171 ton. Capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi Sumatera Selatan dalam pengembangan komoditas perikanan budidaya, yang dapat terus ditingkatkan melalui inovasi teknologi, penguatan kelembagaan pembudidaya, dan pengembangan pasar hasil perikanan.

11. Udang : Produk unggulan subsektor perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi ekonomi tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Potensi besar ini menjadi peluang strategis bagi Sumatera Selatan untuk memperluas kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir
12. Wisata Alam : Wisata alam merupakan salah satu produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sektor andalan pariwisata daerah. Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam yang beragam, seperti Danau Ranau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan panorama pegunungan dan air jernihnya, Air Terjun Lematang Indah di Pagar Alam yang menjadi ikon wisata pegunungan. Pengembangan wisata alam ini terus diarahkan pada penguatan destinasi berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal guna mendukung pariwisata berkelanjutan dan peningkatan ekonomi daerah.
- 13 Kerajinan dan Produk Kreatif : produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Provinsi ini dikenal dengan berbagai hasil karya bernilai tinggi seperti songket Palembang yang telah mendunia, anyaman purun dari Ogan Komering Ilir, tenun jumputan, serta kerajinan kulit kayu dan rotan dari berbagai daerah. Selain itu, sektor ekonomi kreatif terus tumbuh melalui pengembangan kuliner khas, desain produk,

dan seni rupa lokal yang menjadi daya tarik wisata budaya Sumatera Selatan.

2.1.6 Permasalahan Utama Daerah

Isu-isu strategis daerah merupakan permasalahan prioritas yang memerlukan penanganan segera guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, tantangan-tantangan krusial muncul sebagai akibat dari berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks dan saling berkaitan. Permasalahan tersebut tidak hanya merefleksikan kondisi faktual di lapangan, tetapi juga menjadi landasan utama bagi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan dan menyusun program kerja yang tepat guna dan berbasis kebutuhan riil.

Identifikasi dan analisis isu-isu strategis daerah menjadi langkah penting dalam memastikan arah pembangunan yang selaras dengan potensi, permasalahan, serta peluang yang dimiliki oleh daerah. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemecahan masalah jangka pendek, tetapi juga pada upaya memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan global, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengedepankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang adaptif, inovatif, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan masa depan

Proses penentuan isu utama dilakukan secara sistematis melalui analisis data empiris, dialog partisipatif bersama masyarakat, serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan lintas sektor. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengidentifikasi dan memfokuskan perhatian

pada permasalahan-permasalahan yang paling mendesak dan relevan untuk ditangani dalam kerangka pembangunan daerah. Permasalahan ini meliputi kemiskinan dan stunting yang masih tinggi, produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditi unggulan belum optimal, layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas belum optimal, mitigasi bencana kebakaran hutan lahan, banjir, dan tanah longsor belum optimal, peningkatan daya saing dan realisasi investasi belum optimal, rendahnya kapasitas fiskal dalam mendorong pengembangan wilayah, transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan, serta reformasi birokrasi

Setiap isu strategis yang teridentifikasi memiliki keterkaitan erat satu sama lain dan menuntut pendekatan penyelesaian yang bersifat menyeluruh serta terintegrasi lintas sektor. Dengan menetapkan sebagai prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi berbagai hambatan struktural yang menghambat kemajuan daerah. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan wilayah dan mendorong terciptanya kualitas hidup yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat. Berikut ini masalah utama daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1.) Kemiskinan dan stunting yang masih tinggi

Kemiskinan dan stunting masih menjadi masalah prioritas di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat kemiskinan provinsi ini mencapai 11,9%, lebih tinggi dari rata-rata nasional dan tertinggi kedua di wilayah Sumatera bagian Selatan. Fenomena kemiskinan juga menunjukkan ketimpangan, di mana daerah dengan sumber daya alam melimpah justru memiliki tingkat kemiskinan tinggi, serta masih terdapat wilayah tertinggal dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang signifikan. Sementara itu, prevalensi stunting juga masih cukup tinggi, dengan kasus tertinggi di Kabupaten Musi Rawas dan terendah di Kota Pagar Alam. Permasalahan stunting berkaitan erat dengan gizi buruk, kecukupan gizi ibu hamil dan anak, serta dukungan bagi pekerja dan pengusaha perempuan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di Sumatera Selatan perlu difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan,

pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.

2.) Produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditi unggulan belum optimal

Produktivitas sektor pertanian dan hilirisasi komoditi unggulan di Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal sehingga berpotensi mengancam ketahanan pangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun ketersediaan pangan cukup melimpah, keterjangkauan dan pemanfaatannya masih rendah. Tantangan utama meliputi alih fungsi lahan, menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, rendahnya pendidikan petani, serta tingginya kehilangan pangan akibat minimnya teknologi pascapanen dan keterbatasan infrastruktur agrolistik. Selain itu, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta menurunnya produktivitas tanaman perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dan kakao turut memperparah kondisi ini. Hilirisasi komoditas unggulan juga belum berkembang optimal karena kegiatan ekonomi masih berfokus pada sektor primer dan kurangnya transformasi menuju industrialisasi pertanian. Nilai tambah produk perkebunan masih rendah akibat pengelolaan yang belum efisien dan terbatasnya inovasi di tingkat on-farm. Kondisi serupa terjadi pada sektor perikanan budidaya yang mengalami penurunan produksi di berbagai wilayah akibat faktor cuaca, kualitas bibit, teknologi, dan pengetahuan budidaya yang belum memadai. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan penguatan hilirisasi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat ketahanan pangan di Sumatera Selatan.

3.) Layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal.

Layanan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA masih sekitar 60 persen pada periode 2017–2022, menunjukkan banyak penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah, sementara mayoritas lapangan kerja mensyaratkan minimal pendidikan SMA. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan juga masih rendah, yaitu

70,90 pada tahun 2022, menempati posisi kedua terbawah di wilayah Sumbagsel. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan mutu pendidikan, penguatan kompetensi tenaga kerja, serta kemitraan antara dunia usaha dan dunia pendidikan (DUDI) agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, layanan kesehatan perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan perubahan struktur demografi dan meningkatnya populasi lanjut usia. Masih lemahnya hubungan industrial antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha turut berpengaruh terhadap daya saing tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan di Sumatera Selatan harus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, perluasan akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

4.) Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas belum optimal.

Kesenjangan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi tantangan utama. Meskipun kondisi jalan mantap telah mencapai 83,62%, sejumlah wilayah masih memiliki tingkat aksesibilitas rendah, sulit dijangkau transportasi, serta belum sepenuhnya terlayani oleh jaringan listrik, sinyal telepon, dan internet. Ketimpangan ini tercermin dari nilai indeks Entropi Theil sebesar 1,345, yang menunjukkan masih terpusatnya sumber daya ekonomi, tenaga kerja terampil, investasi, dan sarana prasarana di wilayah tertentu. Kondisi topografi yang sulit, seperti daerah pegunungan Bukit Barisan dan kawasan perairan di Pantai Timur, memperburuk keterbatasan konektivitas serta menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar. Upaya pemerataan infrastruktur perlu difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan transportasi darat dan digital, serta perluasan akses listrik dan jaringan komunikasi guna mendorong efisiensi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

5.) Mitigasi bencana kebakaran hutan lahan, banjir, dan tanah longsor belum optimal.

Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor di Provinsi Sumatera Selatan masih tinggi akibat menurunnya kualitas lingkungan dan dampak perubahan iklim. Peningkatan luas lahan kritis, laju deforestasi yang melonjak dari sekitar 2.800 hektar menjadi lebih dari 17.000 hektar per tahun, serta pemanfaatan area gambut yang rentan terhadap kebakaran menunjukkan lemahnya upaya mitigasi dan pengelolaan lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya polusi udara dan penurunan kualitas udara di berbagai wilayah. Selain itu, aktivitas pertambangan yang tidak direklamasi dengan baik turut memperburuk kerusakan lingkungan. Terdapat 359 tambang dengan izin putus yang menimbulkan risiko banjir, pencemaran, dan longsor, sekaligus berdampak sosial berupa pengangguran, kemiskinan, konflik, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan kebijakan mitigasi bencana berbasis ekosistem, rehabilitasi lahan kritis, pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut, serta penegakan regulasi pengelolaan tambang guna melindungi lingkungan dan menjamin keselamatan masyarakat Sumatera Selatan.

6.) Peningkatan daya saing dan realisasi investasi belum optimal.

Peningkatan daya saing ekonomi dan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai kendala struktural. Perekonomian daerah ini masih didominasi oleh sektor primer seperti pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 22,80 persen, diikuti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Ketergantungan pada sektor primer menunjukkan belum terjadinya transformasi ekonomi yang kuat menuju sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi industri. Hal ini tercermin dari posisi Provinsi Sumatera Selatan yang masih berada di peringkat kelima di Pulau Sumatera dengan skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) 5,97 dan skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 3,36 pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Daya saing daerah masih dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, keterampilan SDM, serta iklim investasi dan inovasi yang belum optimal. Untuk itu, upaya peningkatan daya saing dan investasi perlu diarahkan pada

penguatan iklim usaha yang kondusif, percepatan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor industri dan jasa, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, serta pengembangan SDM yang kompeten dan inovatif agar Sumatera Selatan mampu menarik investasi dan bersaing di tingkat nasional maupun global.

7.) Rendahnya kapasitas fiskal dalam mendorong pengembangan wilayah.

Kapasitas fiskal daerah di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah, ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai hampir 90% dari total pendapatan daerah. Hanya Kota Palembang yang termasuk kategori menuju mandiri, sementara 16 kabupaten/kota lainnya masih belum mandiri secara fiskal. Selain itu, tingginya proporsi belanja operasional sekitar 60% dari total pengeluaran membatasi ruang fiskal untuk belanja modal yang produktif dalam mendorong pembangunan wilayah. Keterbatasan pembagian pendapatan dari dana bagi hasil juga mempersempit peluang peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kreativitas dalam menggali sumber pendapatan baru serta memperkuat efisiensi dan kualitas belanja publik. Pemanfaatan pendanaan inovatif seperti skema pembayaran jasa lingkungan, pasar karbon, dan sertifikasi komoditas unggulan menjadi alternatif potensial untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Sumatera Selatan.

8.) Transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan.

Transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan di Provinsi Sumatera Selatan menghadapi tantangan besar akibat ketergantungan tinggi pada sumber daya alam, khususnya sektor pertanian dan pertambangan batubara. Pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder berjalan lambat, dengan kontribusi sektor manufaktur yang stagnan selama dua dekade terakhir. Kondisi ini menimbulkan kerentanan terhadap gejolak global, perubahan iklim, dan penurunan permintaan batubara di masa depan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Transformasi

menuju ekonomi hijau menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang cerdas iklim dan rendah emisi, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, dan panas bumi. Sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Energi Nasional, Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan melalui penerapan praktik agroforestri, pertanian berkelanjutan, serta perlindungan ekosistem gambut. Keberhasilan transformasi ekonomi dan transisi energi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi forum konsultasi multipihak sebagai ruang koordinasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi hijau yang adil, adaptif, dan berpihak pada masyarakat, terutama petani dan pelaku ekonomi lokal.

9.) Reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas. Indeks keterbukaan informasi dan integritas daerah masih berada di bawah rata-rata nasional, sementara hasil penilaian SPBE menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota masih berkategori rendah (C atau CC), dengan hanya Kabupaten Muara Enim yang mencapai kategori B. Kondisi ini menandakan perlunya percepatan transformasi digital dan penguatan sistem birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Reformasi birokrasi ke depan perlu diarahkan pada penguatan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan berbasis meritokrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, perlu ditingkatkan komitmen terhadap prinsip integritas dan akuntabilitas untuk mencegah praktik korupsi serta memperkuat kepercayaan publik.

2.2 Kondisi Riset dan Inovasi Daerah

2.2.1 Kondisi Saat ini kemampuan menghasilkan *evidence based policy*

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai kapasitas aktual Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada data, informasi, dan analisis ilmiah. Bagian ini mengevaluasi sejauh mana proses perumusan kebijakan telah ditopang oleh aktivitas riset, ketersediaan data yang valid dan andal, serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam analisis kebijakan. Evaluasi tersebut turut mencakup fungsi kelembagaan, mekanisme koordinasi, serta pemanfaatan instrumen kajian yang menjadi prasyarat bagi penerapan kebijakan berbasis bukti secara konsisten.

Sub bab ini juga memetakan faktor-faktor pendukung yang memengaruhi kemampuan daerah dalam menghasilkan EBP, sekaligus mengidentifikasi dua output utama yang perlu dipersiapkan. Pemahaman terhadap kondisi awal ini menjadi landasan strategis dalam upaya penguatan kapasitas riset dan inovasi daerah terkait penerapan Kebijakan Berbasis Bukti (EBP). Selain itu, bagian ini juga menyajikan kondisi aktual mengenai kapasitas daerah dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP) serta kinerja inovasi selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut diukur melalui jumlah rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan, capaian inovasi pada aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta berbagai bentuk inovasi yang berkembang di masyarakat, termasuk nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Pemaparan indikator-indikator tersebut memberikan gambaran empiris mengenai tingkat kemampuan riset dan inovasi Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi perumusan kebutuhan penguatan pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel 2. 15 Kondisi Saat ini Kemampuan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence based policy*)

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Keterangan
A. Faktor Pendukung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP)			
1.	Sumber daya manusia Iptek daerah	Masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang Iptek, terlihat dari adanya program pengembangan talenta digital.	Upaya peningkatan SDM Iptek melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan program pelatihan terus dilakukan.
2.	Fasilitas pendukung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan dan inovasi daerah	Fasilitas riset dan inovasi daerah didukung oleh kelembagaan Iptek yang sudah melembaga.	Pemerintah daerah terus mendorong fasilitas pendukung ini melalui berbagai inisiatif.
3.	Anggaran riset dan inovasi daerah	Anggaran riset dan inovasi daerah dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah. Rincian spesifik jumlah anggaran bervariasi setiap tahunnya.	Pendanaan penyelenggaraan inovasi daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
4.	Program-program riset dan inovasi daerah yang pernah dilaksanakan	Pada tahun 2025, terdapat program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah dilaksanakan setiap tahunnya dan tahun 2026 terdapat penambahan program baru yaitu Program Riset dan Inovasi	Implementasi kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan pada tahun 2022 Meraih skor IID 79,47 sebagai Peringkat 1 Tingkat Nasional sebagai Provinsi Sangat Inovatif, tahun 2023

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			terjadi peningkatan skor IID menjadi 84,79 dan kembali diakui sebagai Peringkat 1 Tingkat Nasional sebagai Provinsi Sangat Inovatif, tahun 2024 masuk dalam 5 besar tingkat Nasional dan mempertahankan predikat Provinsi Sangat Inovatif dengan skor IID 75,79.
5.	Kelembagaan Iptek di daerah	Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2020-2025 sebagai Provinsi Terinovatif Tingkat Nasional	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) berperan penting dalam pelaksanaan inovasi daerah.
6.	Jejaring Riset dan Inovasi Daerah (kerjasama dengan mitra)	Inovasi daerah di Sumatera Selatan didorong melalui kolaborasi model Pentahelix yang melibatkan akademisi, pebisnis, pemerintah, komunitas, dan media (ABGCM).	Kerjasama dengan mitra, termasuk perguruan tinggi, dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan Iptek.
B. Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP)			
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti	Dalam lima tahun terakhir, kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti masih tergolong rendah, dengan total 2	▪ Tahun 2024: Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	yang dihasilkan 5 tahun terakhir	rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2024 dan 2025. Kedua rekomendasi tersebut berbentuk naskah akademik rancangan peraturan daerah, yaitu terkait perubahan susunan perangkat daerah dan kebijakan riset dan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik <i>evidence based policy</i> belum berjalan secara konsisten dan masih terbatas pada isu-isu tertentu, sehingga pemanfaatan kajian berbasis data sebagai dasar perumusan kebijakan daerah belum optimal dan belum berkelanjutan	tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ▪ Tahun 2025: Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi
2.	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dimanfaatkan 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti masih terbatas, dengan 2 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti menjadi produk hukum daerah pada tahun 2024 dan 2025. Rekomendasi tersebut telah dimanfaatkan secara formal melalui penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan susunan perangkat daerah serta Peraturan Daerah tentang riset dan inovasi. Meskipun menunjukkan adanya keterhubungan antara kajian berbasis bukti dan keputusan kebijakan, tingkat pemanfaatannya masih belum konsisten dan belum mencerminkan praktik	▪ Tahun 2024: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ▪ Tahun 2025: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Riset dan Inovasi

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		<i>evidence based policy</i> yang kuat dan berkelanjutan dalam proses perumusan kebijakan daerah.	
3.	Jumlah inovasi tata kelola pemerintahan daerah 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang dihasilkan mencapai 152 inovasi, sebagaimana tercatat dalam Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri, serta paparan Gubernur. Capaian ini menunjukkan tingkat aktivitas inovasi yang cukup tinggi, namun masih berfluktuasi antar tahun, dengan penurunan pada 2023 dan lonjakan signifikan pada 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan inovasi tata kelola belum sepenuhnya berjalan stabil dan berkelanjutan, serta masih dipengaruhi oleh dinamika program dan dorongan administratif tahunan.	• Tahun 2021: 28 • Tahun 2022: 28 • Tahun 2023: 18 • Tahun 2024: 48 • Tahun 2025: 30 Jumlah Total: 152
4.	Jumlah inovasi pelayanan publik; 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi pelayanan publik yang dihasilkan mencapai 514 inovasi, berdasarkan pelaporan pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Innovative Government	• Tahun 2021: 123 • Tahun 2022: 123 • Tahun 2023: 104 • Tahun 2024: 91 • Tahun 2025: 73 Jumlah Total: 514

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri, serta paparan Gubernur. Meskipun secara kumulatif menunjukkan tingkat aktivitas inovasi yang tinggi, jumlah inovasi cenderung menurun dari tahun ke tahun, terutama sejak 2023 hingga 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan dan konsistensi pengembangan inovasi pelayanan publik masih menjadi tantangan, serta memerlukan penguatan strategi agar inovasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata.	
5.	Jumlah inovasi daerah lainnya (termasuk inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat), 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi daerah lainnya termasuk inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat mencapai 514 inovasi, sebagaimana tercatat dalam Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Innovative Government Award (IGA), serta paparan Gubernur. Capaian ini menunjukkan partisipasi dan aktivitas inovasi yang cukup tinggi, namun trennya cenderung menurun sejak 2024 setelah relatif stabil pada periode 2021–2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberlanjutan inovasi non-pemerintah dan inovasi berbasis masyarakat masih	• Tahun 2021: 116 • Tahun 2022: 116 • Tahun 2023: 118 • Tahun 2024: 81 • Tahun 2025: 83 Jumlah Total: 514

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		menghadapi tantangan, serta memerlukan penguatan ekosistem dan dukungan agar inovasi dapat berkembang secara konsisten dan berkelanjutan.	
6.	Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) 5 tahun terakhir (termasuk predikat)	Dalam lima tahun terakhir, Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) secara konsisten berada pada predikat Sangat Inovatif, dengan rentang nilai antara 75,79 hingga 83,28. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan inovasi daerah. Namun, fluktuasi nilai antar tahun terutama penurunan pada 2024 sebelum kembali meningkat pada 2025 mengindikasikan bahwa kualitas dan kinerja inovasi belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan konsistensi dan keberlanjutan inovasi agar capaian “Sangat Inovatif” dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan merata.	• Nilai 2021: 79,51 (Sangat Inovatif) • Nilai 2022: 79,47 (Sangat Inovatif) • Nilai 2023: 83,28 (Sangat Inovatif) • Nilai 2024: 75,79 (Sangat Inovatif) • Nilai 2025: 81,23 (Sangat Inovatif)

2.2.2 Penentuan Tema Prioritas

Penentuan tema prioritas dalam Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui proses penyelarasan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyelarasan ini penting dilakukan agar kebijakan dan program inovasi daerah tidak hanya berdiri sebagai inisiatif sektoral, melainkan memberikan kontribusi langsung terhadap

capaian pembangunan jangka menengah. Dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis daerah serta fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, tema prioritas dalam dokumen RIPJ PID diarahkan pada program strategis “100.000 Sultan Muda Sumsel.”

Program “100.000 Sultan Muda Sumsel” dipilih sebagai tema prioritas karena memiliki relevansi yang tinggi dengan agenda penguatan ekonomi daerah melalui penciptaan wirausaha muda yang kompetitif. Program ini merupakan upaya pemerintah provinsi untuk mendorong lahirnya seratus ribu pelaku usaha muda yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, pertanian, perdagangan, dan sektor usaha lainnya. Pemilihan tema ini tidak hanya mencerminkan orientasi pembangunan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi, tetapi juga menggambarkan kebutuhan daerah untuk memperluas basis pelaku ekonomi produktif melalui pengembangan kapasitas generasi muda.

Penetapan tema prioritas ini didasari oleh sejumlah pertimbangan strategis. Pertama, dinamika ketenagakerjaan dan transformasi ekonomi daerah menunjukkan perlunya akselerasi pertumbuhan pelaku usaha baru. Melalui fokus pada wirausaha muda, pemerintah provinsi berupaya meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas peluang kerja, serta memperkuat struktur ekonomi lokal yang sebelumnya masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional. Dengan demikian, kewirausahaan dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kedua, program “100.000 Sultan Muda Sumsel” memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan ekosistem inovasi daerah. Program ini menempatkan dukungan pembiayaan sebagai salah satu instrumen utama melalui fasilitasi permodalan yang melibatkan perbankan, BUMN, dan BUMD. Pendekatan ini penting karena meningkatkan akses pelaku usaha pemula terhadap sumber pendanaan yang sebelumnya sulit dijangkau. Ketersediaan akses pembiayaan yang lebih inklusif dipandang krusial untuk mendorong lahirnya inovasi, mengurangi tingkat kegagalan usaha pada tahap awal, serta memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi pilar lain dalam penetapan tema prioritas ini. Melalui program peningkatan keterampilan

yang bersifat teknis maupun non-teknis, pemerintah provinsi berupaya mencetak wirausaha muda yang tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga memiliki kompetensi untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Penguatan kapasitas melalui berbagai pelatihan tersebut diorientasikan pada kebutuhan dunia usaha dan industri serta perkembangan teknologi yang menuntut adaptasi cepat dari para wirausaha muda.

Keempat, tema ini turut menekankan pentingnya promosi dan pemasaran produk sebagai bagian dari strategi komprehensif dalam menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif. Melalui upaya meningkatkan eksposur UMKM dan startup, baik melalui media digital, pameran produk, maupun kemitraan multipihak, pemerintah provinsi berupaya memperluas akses pasar bagi para wirausaha muda. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan visibilitas produk unggulan lokal serta mendorong penetrasi pasar yang lebih luas, termasuk ke tingkat nasional dan internasional.

Secara keseluruhan, pemilihan tema “100.000 Sultan Muda Sumsel” dalam RIPJ PID mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi, pemberdayaan generasi muda, serta penguatan ekosistem kewirausahaan. Dengan orientasi tersebut, dokumen RIPJ PID berperan sebagai instrumen strategis yang mengarahkan pembangunan inovasi daerah yang selaras dengan RPJMD dan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing serta kemandirian ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Tema ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi munculnya generasi wirausaha muda yang inovatif, adaptif, dan mampu menjadi lokomotif pembangunan daerah dalam jangka panjang.

2.3 Kondisi Saat ini Ekosistem Berdasarkan Tema Prioritas

Bagian ini berisi kondisi saat ini ekosistem riset dan inovasi berdasarkan tema prioritas Provinsi Sumatera Selatan yang dianalisis dengan menggunakan 6 elemen berikut ini:

1.) Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

Kebijakan di bidang riset dan inovasi perlu diarahkan pada desentralisasi, sehingga daerah memiliki keleluasaan dalam merancang

strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Upaya ini harus didukung melalui sinergi antara dunia akademik, sektor swasta, dan pemerintah, dengan dukungan regulasi yang kondusif serta insentif yang mendorong kontribusi para peneliti dan inovator daerah. Selain itu, penting untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang mencakup pendanaan riset dan tenaga ahli yang kompeten demi memperkuat penelitian yang relevan dengan isu-isu lokal. Infrastruktur riset yang memadai menjadi elemen kunci dalam mempercepat perkembangan inovasi. Pendirian pusat riset di daerah, laboratorium inovasi, serta inkubator bisnis akan menjadi wadah untuk menciptakan solusi praktis dari hasil riset. Di sisi lain, infrastruktur digital yang mumpuni juga diperlukan guna mendukung kolaborasi serta keterhubungan dengan informasi global. Dengan tersedianya fasilitas riset yang modern dan selaras dengan kebutuhan daerah, produktivitas penelitian akan meningkat dan mendorong inovasi berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan daerah.

2.) Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Kapasitas kelembagaan serta dukungan terhadap riset dan inovasi dalam Peta Jalan Pemajuan Riset daerah mencakup penguatan peran lembaga penelitian lokal, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah daerah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi bagi peneliti dan tenaga profesional. Dukungan terhadap riset juga ditunjang oleh penyediaan anggaran yang memadai, penguatan jejaring kerja sama antara lembaga riset, pelaku industri, dan pemerintah, serta kemudahan akses terhadap sarana teknologi dan infrastruktur modern. Lembaga-lembaga tersebut dituntut memiliki kapasitas dalam mengelola, mengarahkan, dan mengembangkan kegiatan riset yang inovatif serta mampu membawa hasil riset ke tahap komersialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di daerah.

3.) Kemitraan Riset dan Inovasi

Kemitraan dalam riset dan inovasi merupakan bagian penting dari Peta Jalan Pemajuan Riset daerah untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, sektor industri, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dengan mendorong kerja sama antara universitas, lembaga penelitian, dan pelaku usaha guna menghasilkan riset terapan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai penghubung antar pihak, termasuk dalam menyediakan insentif bagi kegiatan riset bersama serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam inovasi berbasis komunitas. Selain itu, pembentukan konsorsium riset yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat proses alih teknologi, penciptaan produk baru yang inovatif, dan mendorong pemanfaatan hasil riset secara luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

4.) Budaya Riset dan Inovasi

Penguatan budaya riset dan inovasi di daerah perlu dilakukan secara sistematis melalui berbagai tahapan, mulai dari dunia pendidikan hingga keterlibatan masyarakat luas. Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran akan riset dan inovasi sebagai solusi atas permasalahan lokal. Hal ini dapat diwujudkan melalui integrasi riset ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, pemberian apresiasi bagi inovator lokal, serta penciptaan ekosistem yang mendukung kreativitas dan pemecahan masalah. Budaya riset ini juga membutuhkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan, mampu mendorong kolaborasi lintas sektor, dan memberi ruang bagi tumbuhnya ide-ide baru. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih siap menghadapi perubahan dan terlibat aktif dalam riset yang berdampak pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

5.) Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Keselarasan riset dan inovasi di tingkat daerah merupakan upaya membangun sinergi antara dunia pendidikan, pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem riset yang saling terhubung dan berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan agenda riset sejalan

dengan kebutuhan lokal melalui koordinasi yang kuat antar universitas, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah. Penyusunan prioritas riset yang sesuai dengan tantangan dan potensi wilayah menjadi langkah penting agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara nyata di berbagai sektor. Selain itu, penyelarasan antara riset dan kebutuhan dunia usaha maupun masyarakat akan mendorong lahirnya inovasi yang aplikatif dan solutif. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menyediakan arah kebijakan yang mendukung kolaborasi, sekaligus memperkuat kemitraan lintas sektor guna mendorong riset yang relevan dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan daerah.

6.) Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

Menyesuaikan arah pemajuan riset daerah dengan perkembangan global menjadi hal krusial agar daerah tidak tertinggal dalam hal inovasi dan teknologi. Daerah perlu secara aktif mengikuti tren riset dunia dengan mengadaptasi prioritas lokal pada isu-isu penting seperti perubahan iklim, digitalisasi, kesehatan, dan energi terbarukan yang tengah menjadi fokus internasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebaiknya membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan lembaga riset luar negeri, memfasilitasi akses ke jaringan global, serta mendorong penerapan teknologi dan metode riset terbaru. Selain itu, penguatan kapasitas peneliti lokal melalui pelatihan dan program pertukaran juga penting agar mereka mampu bersaing secara internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, daerah dapat memanfaatkan kemajuan global untuk mempercepat inovasi yang tepat guna dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah

Tabel 2. 16 Tabel Kondisi Saat ini Kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi Berdasarkan Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1.	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan dapat berupa Perda, Perkada/Perbup, dan sebagainya.	(a) Berikan gambaran, apakah (saat ini) ada kebijakan yang menghambat dan atau mendukung Pengembangan kewirausahaan di Sumsel ?	Dinas Koperasi dan UKM	(a) Sudah terdapat beberapa kebijakan daerah yang mendukung pengembangan kewirausahaan, Namun, implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi lintas sektor dan keterbatasan anggaran pembinaan. (b) Belum ada regulasi khusus yang mengatur ekosistem kewirausahaan secara menyeluruh di tingkat provinsi.	Fasilitas halal dan legalitas lainnya
		(b) Apakah sampai 5 tahun ke depan diperlukan kebijakan baru (berupa Perda atau Pergub atau peraturan jenis lain) untuk Pengembangan kewirausahaan di Sumsel?	Dinas Perdagangan	(a) Belum ada kebijakan yang mengatur pengembangan kewirausahaan (b) Belum ada Perda atau Pergub tentang pengembangan kewirausahaan	
			Dinas Perindustrian	(a) Belum ada kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Ya, perlunya Perda atau Pergub atau peraturan jenis lain untuk pengembangan kewirausahaan di Sumsel	
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(a) Terdapat kebijakan yang mendukung riset dalam aspek komoditas unggul setiap daerah untuk dibuat dalam bentuk kajian sampai pada peluang investasi yang siap dijual (b) Perlunya peraturan mengenai komoditas unggulan / potensi unggulan setiap kabupaten/kota.	Program pengembangan iklim penanaman modal

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Balitbangda	(a) Sudah ada kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan, namun implementasinya belum optimal (b) Iya, diperlukan kebijakan baru baik pergub maupun perda yang secara eksplisit mendukung pengembangan kewirausahaan khususnya terkait program 100.000 Sultan Muda	
			Bappeda	(a) Sudah ada kebijakan yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Sumsel (b) Perlu	1. Peraturan Daerah Prov Sumsel Nomor 2 Tahun 2025 Tanggal 29 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov Sumsel Tahun 2025-2029 2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 275/KPTS/DISKOP.UKM/2025 Tanggal 16 Mei 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Kerja Gubernur Sumatera Selatan Mencetak Sultan Wirausaha Muda Sumatera Selatan
		Apakah ada kebijakan (misalnya perda, pergub, keputusan OPD, dsb) yang mendukung Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Sumsel?	Bappeda	Sudah ada kebijakan yang mendukung untuk mengatasi permasalahan terbatasnya kemampuan keuangan kabupaten/kota /desa saat ini yaitu melalui kebijakan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 3 Tahun 2022 tanggal 3 Maret 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sudah ada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Sumsel	Belum ada revisi terhadap Pergub tersebut.
2.	Penataan basis data Riset dan Inovasi	(a) Apakah tersedia basis data yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel (b) Kalau tersedia, dalam bentuk apa basis data tsb (manual/form, tercatat dalam Excel, dsb). (c) Apakah data tsb sudah dalam bentuk digital dan terhubung dengan Satu Data Indonesia?	Dinas Koperasi dan UKM	(a) Ada (b) Excel (c) Belum	SIDT dan pendataan Sultan Muda melalui link di website sultan muda
			Dinas Perindustrian	(a) Belum tersedia (b) Data yang dimiliki adalah data industri kecil menengah yang menggambarkan jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan investasi. (manual, form excel) (c) Masih data manual belum terhubung dengan SDI	
			Bappeda	(a) Tidak ada data khusus terkait list kewirausahaan yang dikeluarkan oleh Bappeda, namun pada RPJMD Prov Sumsel Tahun 2025-2029 sudah diakomodir terkait target rasio kewirausahaan yang harus dicapai oleh Prov Sumsel. (b) Tidak tersedia (c) Belum	
			Balitbangda	(a) Sudah ada basis data namun pemanfaatannya masih kurang maksimal (b) Iya, tersedia dalam bentuk excel (c) Data belum terhubung atau terintegrasi dengan Satu Data Indonesia	
		(a) Apakah tersedia basis data yang mendukung kebijakan Bantuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(a) Tersedia, tetapi aplikasi masih dalam proses (b) Form Excel	Sudah ada dalam bentuk form manual

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Operasional Desa/Kelurahan? (b) Kalau tersedia, dalam bentuk apa basis data tsb (manual/form, tercatat dalam Excel, dsb).	Bappeda	(a) Tidak ada (b) Tidak ada	
3.	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	(a) Apakah di setiap kabupaten/kota di Propinsi Sumsel tersedia infrastruktur berikut: pusat inovasi, inkubator, creative center, kawasan sains dan teknologi (KST), ruang publik kreatif (RPK), PLUT, dsb ? (b) Bagaimana keberfungsian dari infrastruktur (di atas) yang tersedia di setiap Kabupaten/kota? (c) Bagaimana kondisi RTH (ruang terbuka hijau) di setiap kabupaten/kota: jumlah, lokasi, keberfungsian, dan apakah mungkin dikembangkan menjadi RPK (RTH yang dilengkapi WiFi, sarana pertemuan, dan kelembagaan pengelola)?	Balitbangda	(a) Sudah tersedia infrastruktur berupa pusat inovasi, inkubator dan lainnya, namun belum merata di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (b) Sebagian berfungsi dengan optimal, namun sebagian lagi pemanfaatannya belum efektif (c) Kondisi RTH sebagian terawat, namun sebagian lagi cenderung kurang terawat atau terjaga	
			Dinas Koperasi dan UKM	(a) Sudah terbentuk Inkubator bisnis di setiap kabupaten.kota melalui Dinas Koperasi & UKM. (b) Tetapi karena keterbatasan SDM maka lembaga tsb sebagian besar tidak berjalan. (c) -	Si Bice di Dinas Koperasi & UKM Sumsel
			Dinas Perindustrian	(a) Belum tersedia (b) - (c) -	
			Bappeda	(a) Tidak tersedia (b) Tidak tersedia (c) Tidak tersedia	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	(a) Apakah tersedia skema anggaran khusus untuk penumbuh kembangan kewirausahaan ? (b) Apakah ada upaya mencari sumber-sumber pendanaan non APBD propinsi Sumsel (dana CSR, APBD provinsi, APBN, sumber lain) untuk mendukung Pengembangan kewirausahaan ?	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(a) Tidak ada (b) Tidak ada	
			Bappeda	(a) Tidak tersedia (b) Tidak ada	
			Dinas Koperasi dan UKM	(a) Ada tapi belum maksimal (b) Ada dengan pihak terkait seperti lembaga keuangan non perbankan dan perbankan, kampus dan lembaga pelatihan kerja	(a) Entrepreneur Goes To Campus atau go to school (b) Entrepreneur Goes To Campus di Universitas PGRI tanpa anggaran tetapi bisa terlaksana kolaborasi dengan beberapa stakeholder seperti Pegadaian, Palembang Training Center dan Perusahaan Produk
			Dinas Perindustrian	(a) Tersedia (b) APBN	
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(a) Lebih kepada kerjasama/pembinaan UMKM melalui sistem OSS RBA (b) Sebagian kecil melalui sub kegiatan kewirausahaan	
			Balitbangda	(a) Belum tersedia anggaran khusus untuk pengembangan kewirausahaan (b) Ada, melalui program CSR baik dari perusahaan BUMN, BUMD, maupun swasta	
			Biro Perekonomian	(a) Tidak tersedia anggaran khusus untuk bidang kewirausahaan (b) Melakukan pembinaan terhadap BUMD untuk menyalurkan sebagian dana CSR kepada UMKM	
5.	Peningkatan perlindungan dan	Apakah saat ini ada kegiatan inventarisasi data kekayaan	Dinas Koperasi dan UKM	Ada tapi belum maksimal. Beberapa kegiatan inventarisasi dan fasilitasi Hak	SIDT (Sistem Informasi Data Tungga)

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pemanfaatan kekayaan intelektual.	intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel ?		Kekayaan Intelektual (merek, hak cipta, paten, Kekayaan Intelektual Komunal/ KIK, indikasi geografis, dsb.) sedang dan rutin dilakukan di Sumatera Selatan, khususnya oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan bersama perangkat daerah dan mitra (Dekranasda, Dinas Koperasi/UKM, perguruan tinggi, dsb.)	
			Dinas Perindustrian	Sudah pernah dilakukan fasilitasi terkait pendaftaran merk dagang tahun 2019. Untuk saat ini hanya pendampingan untuk NIB, PIRT.	
			Balitbangda	Sudah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual	
			Bappeda	Tidak ada	
			Dinas Perdagangan	Sudah terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
II	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
6.	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	(a) Bagaimana kondisi/ kesiapan Balitbangda atau OPD lain di Sumsel dalam mendukung Pengembangan kewirausahaan (anggaran, SDM, kemampuan melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan riset dan inovasi)?	Balitbangda	(a) Balitbangda siap mendukung penuh pengembangan kewirausahaan melalui kebijakan yang berlaku atau berdasarkan kajian perencanaan (b) Balitbangda bekerjasama dengan pihak akademisi perguruan tinggi dan BRIN dalam rangka pengembangan kewirausahaan	
			Bappeda	(a) Bappeda mendukung pengembangan kewirausahaan melalui perencanaan yang tertuang didalam dokumen perencanaan daerah	1. RPJPD Prov Sumsel 2025-2045; 2. RPJMD Prov Sumsel 2025-2029

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(b) Apakah Balitbangda atau OPD lain melakukan kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi, khususnya dalam rangka pengembangan kewirausahaan untuk menghasilkan 100.000 pengusaha muda ?		(b) Bappeda bekerjasama dengan akademisi melalui FGD, penyusunan kajian, buku Saku Investasi, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	
			Dinas Koperasi dan UKM	(a) Dinas Koperasi & UKM mendukung pengembangan kewirausahaan terkait dengan riset dan inovasi (b) Literasi dan edukasi untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur muda	(a) Mitra riset dengan komunitas Kopi dan Polsri (b) Entrepreneur Goes to Campus
			Dinas Perindustrian	(a) - (b) Ya	
			Dinas Pendidikan	(a) Dinas Pendidikan melalui Pendidikan Vokasi melaksanakan kegiatan kewirausahaan bagi siswa SMK (b) Dinas Pendidikan melalui pendidikan vokasi memiliki bursa kerja khusus (BKK) di 17 Kabupaten/Kota (c) Dinas Pendidikan melalaui pendidikan vokasi memiliki kerjasama dengan induastri	(a) Kegiatan Vokasi baru 1 kegiatan saja dalam 1 tahun (b) Sudah memiliki 291 SMK yang memiliki BKK (c) Ada 24 SMK yang menjalin kerjasama dengan industri
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(a) Disnakertrans memiliki UPTD BLKPPKT yang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi (b) Disnakertrans belum melakukan kerjasama denganBRIN/Swasta /PT untuk pengembangan kewirausahaan	Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi
7.	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan	Apakah di Propinsi Sumsel saat ini tersedia sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan	Balitbangda	Belum tersedianya sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dengan kemampuan daerah	kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda ?	Bappeda	Belum ada	
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	
			Dinas Perindustrian	Belum	
		Apakah di Propinsi Sumsel saat ini tersedia sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	Balitbangda	Sudah ada sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka Bantuan Operasional Desa/Kelurahan, namun pelaksanaannya belum optimal	
			Bappeda	Belum ada	
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tersedia, tetapi Aplikasi masih dalam on proses	Sudah ada dalam bentuk form manual
III	Kemitraan Riset dan Inovasi				
8.	Peningkatan difusi inovasi	Apakah Propinsi Sumsel melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/ penumbuhan kewirausahaan di kabupaten/kota?	Balitbangda	Sudah ada, namun transfer teknologi khusus dalam pengembangan kewirausahaan masih terbatas	
			Bappeda	Sudah dilakukan oleh OPD terkait	
			Dinas Koperasi dan UKM	Iya	Mitra riset dengan Komunitas Kopi dan Polsri
			Dinas Perindustrian	Belum	
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disnakertrans belum melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/penumbuhan kewirausahaan di Kab/Kota	
9.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Risetdan	Apakah Propinsi Sumsel memiliki kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi	Balitbangda	Sudah pernah dilakukan kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Inovasi kepada pelaku inovasi.	hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota?		setiap kabupaten/kota, namun dampaknya belum signifikan	
			Bappeda	Tidak ada	
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	
			Dinas Perindustrian	Belum	
		Apakah Propinsi Sumsel memiliki kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di setiap kabupaten/kota?	Balitbangda	Sudah pernah dilakukan kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tentang Bantuan Operasional, namun masih terbatas dan belum merata	
			Bappeda	Tidak ada	
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	
IV	Budaya Riset dan Inovasi				
10.	Promosi dan kampanye inovasi	Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang pogram 100.000 Sultan Muda ?	Balitbangda	Sudah pernah diselenggarakannya promosi dan kampanye melalui sosialisasi 12 program strategis kepala daerah, namun belum ada promosi secara khusus tentang 100.000 sultan muda sumsel	
		Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan?	Dinas Koperasi dan UKM	Sudah ada	Entrepreneur Goes to Campus dan Website serta Ig Sultan Muda
			Dinas Pemuda dan Olahraga	Melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda di Kabupaten/Kota	Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pemuda Kader Provinsi, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
			Balitbangda	Sudah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan	
		Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	Balitbangda	Belum pernah diselenggarakannya promosi dan kampanye tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	
11.	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan lomba inovasi? Apakah lomba inovasi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung Pengembangan 100.000 Sultan Muda ?	Balitbangda	Belum pernah menyelenggarakan secara khusus terkait lomba inovasi dalam mendukung 100.000 sultan muda sumsel	
			Dinas Koperasi dan UKM	Ada	UMKM Award, 24-25 November 2025
		Apakah ada penyelenggaraan innovation award tentang inovasi pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	Balitbangda	Belum pernah diselenggarakannya innovation award tentang inovasi pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	
12.	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha baru di setiap kabupaten/kota untuk	Balitbangda	Sudah ada, namun hanya sebatas penumbuhan wirausaha baru	
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	
			Dinas Perindustrian	Ada kegiatan terkait penumbuhan wirausaha baru	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda ?			
13.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah di Propinsi Sumsel ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan kewirausahaan pemuda ?	Balitbangda	Belum dilakukannya kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan kewirausahaan pemuda	
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tidak ada	
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	
		Inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	Balitbangda	Belum ada Inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tidak ada	
V	Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
14.	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi didaerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah di Propinsi Sumsel ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda?	Balitbangda	Belum ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	
			Dinas Perindustrian	belum mulai	
		Apakah ada prakarsa riset dan inovasi untuk pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	Balitbangda	Belum ada prakarsa riset dan inovasi untuk pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	
			Bappeda	Belum ada	
15.	Penyelenggaraan pengembangan	Apakah setiap kabupaten/kota di Propinsi	Balitbangda	Belum ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau sentra	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Sumsel dilakukan pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM berbasis kelompok usaha untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda ?		UKM berbasis kelompok usaha yang secara khusus untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda	
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	
16.	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Apakah program Pengembangan 100.000 Sultan Muda telah dikaitkan dengan kebijakan di masing-masing kabupaten/kota (koherensi kebijakan)?	Balitbangda	Iya, program pengembangan 100.000 Sultan muda merupakan salah satu dari 12 program strategis Gubernur Sumatera Selatan	
			Bappeda	12 Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan termasuk program 100.000 Sultan Muda sudah disosialisasikan ke 17 Kabupaten Kota	
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	
		Apakah ada kohensi/sinkronisasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	Bappeda	Belum ada	
VI Penyelarasan dengan perkembangan global					
17.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan	Apakah di Propinsi Sumsel ada program/ kegiatan fasilitasi kepada pelaku usaha muda dalam memenuhi Standarisasi produk masing-masing	Dinas Perdagangan	Terdapat Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan terkait Pengawasan Perijinan, Kemasan, Label, dsb	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
			Dinas Koperasi dan UKM	Sudah ada	Pendampingan Legalitas UMKM melalui Pojok Kito
			Dinas Perindustrian	Iya, Sudah ada	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	(seperti: perijinan (BPOM, PIRT, dsb), Kemasan, Label Halal, Komposisi/ingredient), Ukuran Berat Bersih, dsb) ?dalam mendukung tercapainya 100.000 Sultan Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terdapat program pelayanan penanaman modal untuk memfasilitasi perizinan UMKM untuk penerbitan NIB, dan kegiatan fasiltasi para UMKM mengenai sertifikasi halal,haki,dsb.	Kegiatan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik
18.	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional yang dilakukan Propinsi Sumsel untuk Pengembangan kewirausahaan pemuda dalam mencapai 100.000 Sultan Muda?	Balitbangda	Belum ada kerjasama internasional yang dilakukan Propinsi Sumsel untuk Pengembangan kewirausahaan pemuda dalam mencapai 100.000 Sultan Muda	
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DAERAH

3.1 Tantangan Dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Mendatang

Pengembangan daerah yang didorong oleh riset dan inovasi menjadi kunci percepatan dalam mewujudkan visi dan misi Sumatera Selatan untuk lima tahun ke depan. Meski demikian, dalam praktiknya, pemanfaatan riset dan inovasi masih menemui berbagai tantangan, yang tercermin dalam sejumlah isu penting berikut ini:

1.) Mutu kebijakan yang mendorong pengembangan riset dan inovasi

Mutu kebijakan yang mendorong pengembangan riset dan inovasi menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang maju untuk semua. Kebijakan yang ada sering kali belum sepenuhnya berbasis bukti ilmiah dan kurang memperhatikan hasil riset yang relevan dengan kebutuhan daerah. Akibatnya, arah pengembangan inovasi tidak selalu sejalan dengan prioritas pembangunan, sehingga potensi riset yang ada di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian belum termanfaatkan secara optimal. Selain itu, dinamika perubahan global dan tantangan lokal, seperti ketahanan pangan, energi, dan lingkungan, menuntut adanya kebijakan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Tanpa kebijakan yang bermutu, riset dan inovasi sulit menjadi pendorong utama peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah untuk merancang kebijakan berbasis data, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan hasil riset dan inovasi menjadi bagian integral dalam proses perumusan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

2.) Penerapan kebijakan serta pembangunan yang berbasis bukti

Penerapan kebijakan serta pembangunan yang berbasis bukti masih menghadapi tantangan besar di Sumatera Selatan. Selama ini, proses perumusan kebijakan kerap didominasi oleh pendekatan administratif dan politis, sementara hasil riset atau data ilmiah belum sepenuhnya menjadi landasan utama. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang tepat sasaran dan berpotensi tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Di sisi lain, keterbatasan akses dan integrasi data lintas sektor juga memperlemah praktik pembangunan berbasis bukti. Padahal, dengan pemanfaatan riset, data, dan inovasi, kebijakan dapat lebih akurat dalam merumuskan solusi untuk persoalan daerah seperti kemiskinan, ketahanan pangan, atau pembangunan infrastruktur. Ke depan, diperlukan komitmen untuk menguatkan budaya *evidence-based policy*, melalui penyediaan data yang terbuka, pemanfaatan hasil kajian akademik, serta kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset agar pembangunan benar-benar sesuai dengan visi “*Sumsel Maju Terus untuk Semua*.”

3.) Penguatan budaya riset dan inovasi

Penguatan budaya riset dan inovasi menjadi tantangan yang tidak kalah penting dalam mendukung pembangunan Sumatera Selatan. Saat ini, riset dan inovasi masih sering dipandang sebatas aktivitas akademik, belum sepenuhnya melekat sebagai budaya kerja maupun pola pikir dalam masyarakat dan birokrasi. Rendahnya minat riset, keterbatasan dukungan fasilitas, serta belum kuatnya penghargaan terhadap karya inovatif membuat potensi besar daerah belum tergali secara optimal. Budaya riset dan inovasi perlu ditumbuhkan sejak dini melalui pendidikan, penguatan ekosistem riset di perguruan tinggi, serta dukungan nyata pemerintah terhadap para peneliti dan inovator. Budaya ini harus melekat dalam berbagai sektor pembangunan, sehingga setiap kebijakan, program, maupun kegiatan daerah selalu berlandaskan pada ide-ide baru yang kreatif dan solutif. Dengan demikian, riset dan inovasi tidak hanya menjadi sarana peningkatan daya saing, tetapi juga motor utama dalam membangun masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi.

4.) Sinergi *pentahelix* dalam mendukung riset dan inovasi

Sinergi *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media menjadi faktor krusial dalam pengembangan riset dan inovasi. Namun, tantangan yang muncul adalah koordinasi antar unsur ini belum berjalan optimal. Pemerintah sering bergerak sendiri dengan kebijakan, sementara dunia usaha mencari keuntungan tanpa selalu melibatkan hasil riset lokal. Akademisi menghasilkan banyak kajian, tetapi belum terhubung kuat

dengan kebutuhan masyarakat atau pasar. Akibatnya, potensi kolaborasi yang seharusnya saling menguatkan masih belum maksimal. Dalam mewujudkan visi *“Sumsel Maju Terus untuk Semua”*, diperlukan pola sinergi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator, akademisi sebagai penyedia solusi ilmiah, dunia usaha sebagai penggerak implementasi, komunitas sebagai penerima manfaat sekaligus pengembang inovasi sosial, serta media sebagai penguat penyebaran informasi. Dengan keterhubungan yang kuat antar unsur pentahelix, riset dan inovasi dapat lebih cepat diimplementasikan, relevan dengan kebutuhan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

5.) Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada riset dan inovasi

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada riset dan inovasi masih menjadi tantangan serius di Sumatera Selatan. Selama ini, alokasi anggaran untuk mendukung riset sering kali terbatas dan belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Akibatnya, banyak hasil penelitian yang berpotensi memberikan solusi nyata bagi masalah daerah tidak dapat dikembangkan lebih lanjut karena minim dukungan pendanaan. Selain itu, perencanaan pembangunan juga masih cenderung fokus pada proyek fisik, sementara penguatan pengetahuan dan inovasi belum sepenuhnya ditempatkan sebagai investasi strategis jangka panjang. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih visioner dengan memberikan ruang besar bagi riset dan inovasi sebagai motor pembangunan. Dukungan anggaran yang memadai tidak hanya memperkuat kapasitas peneliti dan lembaga riset, tetapi juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat. Dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai bagian integral dari siklus perencanaan daerah, Sumatera Selatan akan memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sesuai misi 2025–2029.

6.) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang riset dan inovasi

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang riset dan inovasi merupakan tantangan yang perlu segera diatasi. Saat ini, kualitas dan jumlah peneliti maupun tenaga ahli di Sumatera Selatan masih terbatas, sehingga kemampuan menghasilkan riset yang relevan dengan kebutuhan daerah juga

belum optimal. Keterbatasan akses terhadap pelatihan, teknologi, serta jejaring kerja sama global turut memperlambat penguatan kompetensi SDM dalam menghadapi dinamika perubahan yang cepat di era digital dan industri berbasis pengetahuan. Dalam menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan SDM yang komprehensif melalui peningkatan keterampilan teknis, penguasaan metodologi riset, serta pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dan lembaga riset perlu menciptakan program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, termasuk dukungan beasiswa, pelatihan, dan kolaborasi dengan lembaga riset nasional maupun internasional. Dengan SDM yang unggul, riset dan inovasi di Sumatera Selatan akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta pencapaian visi *"SumSel Maju Terus untuk Semua."*

7.) Ketersediaan dan penguatan infrastruktur riset dan inovasi

Ketersediaan dan penguatan infrastruktur riset dan inovasi menjadi tantangan mendasar yang harus dihadapi Sumatera Selatan. Saat ini, banyak lembaga penelitian maupun perguruan tinggi yang masih terbatas dalam fasilitas laboratorium, peralatan modern, hingga akses terhadap basis data riset yang memadai. Kondisi ini membuat kualitas penelitian tidak berkembang secara optimal, bahkan sering kali bergantung pada dukungan eksternal. Padahal, infrastruktur yang kuat merupakan fondasi penting untuk menghasilkan riset yang berkualitas, inovasi yang aplikatif, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan daerah ke depan perlu memberi prioritas pada penguatan sarana dan prasarana riset, baik melalui investasi langsung pemerintah maupun kemitraan dengan dunia usaha. Penyediaan laboratorium modern, pusat data riset terpadu, hingga inkubator inovasi berbasis teknologi akan mendorong ekosistem riset yang lebih produktif. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, hasil riset dan inovasi tidak hanya lahir dari gagasan, tetapi juga mampu diimplementasikan secara nyata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pencapaian misi pembangunan Sumatera Selatan 2025–2029.

3.2 Peluang Dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Mendatang

Pemanfaatan riset dan inovasi ke depan menjadi peluang strategis dalam mendukung pencapaian visi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025–2029, yaitu *"Sumsel Maju Terus untuk Semua."* Visi ini menekankan pentingnya kemajuan yang inklusif dan merata, yang dapat dicapai melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Perkembangan teknologi, digitalisasi, serta meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan memberikan ruang bagi riset untuk berperan lebih besar dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan lokal. Dengan optimalisasi sumber daya lokal serta peningkatan kapasitas SDM kelitbangan, riset dan inovasi dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan Sumsel yang maju, adaptif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini beberapa peluang yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa yang akan datang antara lain:

1.) Arah kebijakan nasional untuk memperkuat riset dan inovasi di daerah

Arah kebijakan nasional yang menekankan penguatan riset dan inovasi memberikan peluang besar bagi Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan potensi daerahnya. Pemerintah pusat telah mendorong transformasi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk melalui kebijakan riset nasional serta integrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan prioritas nasional. Dengan demikian, riset dan inovasi yang dilakukan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendapat dukungan lebih luas dari pemerintah pusat. Keselarasan ini akan mempercepat lahirnya kebijakan yang berbasis bukti, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat peran Sumsel dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara berbasis riset dan inovasi.

2.) Potensi kerja sama lintas Lembaga dalam riset dan inovasi

Potensi kerja sama lintas lembaga dalam riset dan inovasi menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekosistem pembangunan berbasis pengetahuan. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas dapat membentuk jejaring kolaborasi yang saling melengkapi.

Melalui kerja sama ini, keterbatasan sumber daya, baik pendanaan, SDM, maupun infrastruktur, dapat diatasi dengan memanfaatkan keunggulan dan kapasitas masing-masing pihak. Kolaborasi lintas lembaga juga membuka ruang bagi riset yang lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan nyata, seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, maupun inovasi pelayanan publik. Dengan sinergi yang terjalin, hasil riset tidak berhenti pada publikasi semata, melainkan dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerja sama ini sekaligus menjadi wahana pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas SDM, sehingga mendorong terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.

3.) Dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur bagi riset dan inovasi

Dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur merupakan peluang penting dalam memperkuat pemanfaatan riset dan inovasi di masa mendatang. Ketersediaan peneliti, tenaga ahli, serta praktisi yang kompeten dapat menjadi motor penggerak lahirnya ide-ide kreatif dan solusi ilmiah yang relevan dengan tantangan pembangunan. Sinergi antara penguatan kapasitas SDM dengan ketersediaan infrastruktur akan menciptakan ekosistem riset yang lebih dinamis dan berkelanjutan. Dengan dukungan ini, riset tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga mendorong inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan.

3.3 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Diharapkan

Pada sub bab ini menyajikan gambaran mengenai kondisi ekosistem riset dan inovasi yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sumatera Selatan pada akhir periode perencanaan. Kondisi yang diharapkan tersebut berfungsi sebagai arah pembangunan jangka menengah dalam memperkuat kapasitas riset, inovasi, serta pengambilan kebijakan berbasis bukti di daerah. Untuk mencapai ekosistem riset dan inovasi yang ideal, penguatan diarahkan pada dua area utama, yaitu:

- A) Peningkatan kemampuan daerah dalam melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)
- B) Penguatan keseluruhan ekosistem riset dan inovasi yang mendukung pencapaian tema prioritas daerah.

Perumusan kondisi yang diharapkan didasarkan pada hasil identifikasi atas tantangan dan peluang yang dihadapi Provinsi Sumatera Selatan dalam kedua area penguatan tersebut. Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, fokus kondisi yang diharapkan diarahkan pada terwujudnya lingkungan riset dan inovasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing, serta selaras dengan tema prioritas pembangunan yang telah dijelaskan pada Bab 2.

Kemudian untuk memperkuat landasan ilmiah dalam proses perumusan kebijakan dan mendorong pengembangan ekosistem inovasi yang responsif serta kompetitif, diperlukan formulasi kondisi ideal yang menjadi orientasi peningkatan kapasitas daerah. Adapun kondisi yang diharapkan terkait kemampuan daerah dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP) mencerminkan standar capaian yang menjadi orientasi pembangunan. Rumusan tersebut mencakup penguatan aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan layanan inovasi daerah, serta penyempurnaan mekanisme analisis kebijakan yang mendukung penerapan EBP secara konsisten, termasuk peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan uraian mengenai kondisi yang diharapkan pada akhir periode perencanaan terkait faktor penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Kondisi yang Diharapkan Kemampuan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence based policy*)

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi yang Diharapkan
A. Faktor Pendukung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP)		

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi yang Diharapkan
1.	Sumber daya manusia Iptek daerah	Tersedianya SDM Iptek daerah yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan pengembangan inovasi daerah. Pengembangan talenta digital, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah sehingga kualitas SDM Iptek meningkat dan mampu menjawab kebutuhan kebijakan daerah.
2.	Fasilitas pendukung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan dan inovasi daerah	Tersedianya fasilitas riset dan inovasi daerah yang lengkap, berfungsi optimal, dan terintegrasi dengan kelembagaan Iptek yang telah melembaga. Fasilitas pendukung ini secara konsisten diperkuat dan dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti serta mendorong lahirnya inovasi daerah yang aplikatif.
3.	Anggaran riset dan inovasi daerah	Tersedianya anggaran riset dan inovasi daerah yang memadai, berkelanjutan, dan terencana dengan baik, yang bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Dukungan pendanaan ini mampu menjamin keberlangsungan kegiatan riset, pengembangan inovasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti secara efektif.
4.	Program-program riset dan inovasi daerah yang pernah dilaksanakan	Terselenggaranya program riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan, terstruktur, dan terus berkembang dari tahun ke tahun, dengan perluasan jenis program sesuai kebutuhan daerah. Program penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan inovasi yang berdampak nyata, sekaligus mempertahankan dan

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi yang Diharapkan
		meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah pada level sangat inovatif secara nasional.
5.	Kelembagaan Iptek di daerah	Terwujudnya kelembagaan Iptek daerah yang kuat, berfungsi optimal, dan berperan strategis dalam mengoordinasikan serta mengimplementasikan riset dan inovasi daerah. Peran lembaga seperti Balitbangda semakin diperkuat sebagai motor penggerak inovasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, sehingga prestasi daerah sebagai provinsi sangat inovatif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
6.	Jejaring Riset dan Inovasi Daerah (kerjasama dengan mitra)	Terbangunnya jejaring riset dan inovasi daerah yang kuat, aktif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi Pentahelix (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media). Kerja sama dengan berbagai mitra, khususnya perguruan tinggi, dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM Iptek, memperkuat riset, serta menghasilkan inovasi dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan daerah.
B. Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP)		
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan 5 tahun terakhir	Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan secara konsisten dan berkelanjutan setiap tahun, tidak terbatas pada isu tertentu. Rekomendasi disusun berdasarkan kajian data dan analisis yang kuat serta mencakup berbagai sektor strategis daerah, sehingga praktik <i>evidence based policy</i> menjadi bagian integral dalam proses perumusan kebijakan daerah.
2.	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan daerah, yang tercermin dari

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi yang Diharapkan
	dimanfaatkan 5 tahun terakhir	konsistensi tindak lanjut rekomendasi menjadi kebijakan atau produk hukum daerah. Proses perumusan kebijakan secara sistematis menjadikan hasil kajian berbasis bukti sebagai rujukan utama, sehingga penerapan <i>evidence based policy</i> berjalan kuat dan berkelanjutan.
3.	Jumlah inovasi tata kelola pemerintahan daerah 5 tahun terakhir	Terwujudnya pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang stabil dan berkelanjutan dari tahun ke tahun, dengan jumlah inovasi yang terjaga dan tidak berfluktuasi tajam. Inovasi yang dihasilkan bersifat strategis, berkualitas, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan publik daerah.
4.	Jumlah inovasi pelayanan publik; 5 tahun terakhir	Terwujudnya pengembangan inovasi pelayanan publik yang konsisten dan berkelanjutan dari tahun ke tahun, dengan jumlah inovasi yang stabil serta kualitas dan dampak yang meningkat. Inovasi pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi mampu memberikan perbaikan nyata terhadap kualitas layanan, efisiensi birokrasi, dan kepuasan masyarakat.
5.	Jumlah inovasi daerah lainnya (termasuk inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat), 5 tahun terakhir	Meningkatnya inovasi daerah non-pemerintah dan inovasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan, didukung oleh ekosistem inovasi yang inklusif dan kondusif. Partisipasi masyarakat dalam menghasilkan inovasi terus diperkuat sehingga inovasi berkembang secara konsisten, berdampak, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
6.	Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) 5 tahun terakhir (termasuk predikat)	Terjaganya capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah pada predikat Sangat Inovatif secara stabil dan berkelanjutan dengan kecenderungan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Kinerja inovasi daerah

No	Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi yang Diharapkan
		menjadi lebih merata, konsisten, dan berdampak, sehingga fluktuasi nilai dapat diminimalkan dan posisi daerah sebagai provinsi sangat inovatif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Tabel 3. 2 Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi yang Diharapkan Pada Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1.	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan dapat berupa Perda, Perkada/Perbup, dan sebagainya.	(a) Berikan gambaran, apakah (saat ini) ada kebijakan yang menghambat dan atau mendukung Pengembangan kewirausahaan di Sumsel ? (b) Apakah sampai 5 tahun ke depan diperlukan kebijakan baru (berupa Perda atau Pergub atau peraturan jenis lain) untuk Pengembangan kewirausahaan di Sumsel?	Dinas Koperasi dan UKM	(a) Lebih terintegrasi dan kolaborasi (b) Terbitnya Peraturan Gubernur atau Perda yang menjadi payung hukum pengembangan 100.000 wirausaha muda di Sumsel.	
			Dinas Perdagangan	(a) Tersedia Kebijakan terpadu lintas sektor yang mengatur pengembangan kewirausahaan Produk Dalam Negeri dan Produk Luar Negeri. (b) Terbitnya Perda atau Pergub tentang Pengembangan Kewirausahaan	
			Dinas Perindustrian	(a) Adanya kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Perda yang mengatur pengembangan kewirausahaan	
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(a) Tersedianya kajian potensi dan peluang investasi kabupaten/kota (b) Terbitnya peraturan tentang potensi unggulan daerah	
			Balitbangda	(a) Memaksimalkan implementasi kebijakan pengembangan kewirausahaan yang ada saat	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ini sehingga dapat berdampak secara optimal (b) Diterbitkannya kebijakan baru berupa pergub atau perda yang secara eksplisit mendukung pengembangan kewirausahaan	
			Bappeda	Perlu adanya kebijakan baru (Perda/Pergub) yang mendukung untuk keberlanjutan Pengembangan kewirausahaan di Sumsel	
		Apakah ada kebijakan (misalnya perda, pergub, keputusan OPD, dsb) yang mendukung Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Sumsel?	Bappeda	Tersedianya Pergub yang lebih terstruktur terhadap Perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)	
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tersedia Pergub yang lebih terstruktur terhadap Perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa Tanggal 3 Maret 2022
2.	Penataan basis data Riset dan Inovasi	(a) Apakah tersedia basis data yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel	Dinas Koperasi dan UKM	(a) Adanya aplikasi khusus yang terintegrasi (b) - (c) -	
			Dinas Perindustrian	(a) Tersedianya basis data pengembangan kewirausahaan	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(b) Kalau tersedia, dalam bentuk apa basis data tsb (manual/form, tercatat dalam Excel, dsb). (c) Apakah data tsb sudah dalam bentuk digital dan terhubung dengan Satu Data Indonesia?		(b) Tersedianya basis data (manual, form excel) (c) Tersedia data digital	
			Bappeda	(a) Tersedianya basis data yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel (b) Tersedianya data dalam bentuk manual/form excel (c) c) Data yang sudah berbentuk digital dan terhubung dengan Satu Data Indonesia	
			Balitbangda	(a) Dimaksimalkannya pemanfaatan basis data untuk mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Data tidak hanya excel, namun terdapat juga data digital yang terintegrasi dengan sebuah platform (c) Data digital dapat terhubung dengan Satu Data Indonesia	
		(a) Apakah tersedia basis data yang mendukung kebijakan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan? (b) Kalau tersedia, dalam bentuk apa basis data tsb (manual/form, tercatat dalam Excel, dsb).	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(a) Tersedianya aplikasi BKBK dengan database online (b) Aplikasi BKBK yang terealisasi	Aplikasi alur BKBK dari awal pengajuan Kab/Kota sampai dengan proses pencairan.
			Bappeda	(a) Tersedianya aplikasi BKBK dengan database secara online	
3.	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	(a) Apakah di setiap kabupaten/kota di Propinsi	Balitbangda	(a) Tersedianya infrastruktur pendukung inovasi (pusat	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sumsel tersedia infrastruktur berikut: pusat inovasi, inkubator, creative center, kawasan sains dan teknologi (KST), ruang publik kreatif (RPK), PLUT, dsb ? (b) Bagaimana keberfungsian dari infrastruktur (di atas) yang tersedia di setiap Kabupaten/kota? (c) Bagaimana kondisi RTH (ruang terbuka hijau) di setiap kabupaten/kota: jumlah, lokasi, keberfungsian, dan apakah mungkin dikembangkan menjadi RPK (RTH yang dilengkapi WiFi, sarana pertemuan, dan kelembagaan pengelola)?		inovasi, inkubator, creative center, KST, RPK, PLUT, dan sejenisnya) yang merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Seluruh infrastruktur pendukung inovasi di setiap kabupaten/kota berfungsi optimal, dimanfaatkan secara efektif, dan dikelola secara berkelanjutan. (c) RTH di setiap kabupaten/kota terawat dengan baik dan dikembangkan menjadi RPK yang dilengkapi fasilitas digital, ruang pertemuan, serta kelembagaan pengelola.	
			Dinas Koperasi dan UKM	(a) Setiap Kabupaten memiliki infrastruktur berikut: pusat inovasi, inkubator, creative center, kawasan sains dan teknologi (KST), ruang publik kreatif (RPK), PLUT, (b) - (c) -	
			Dinas Perindustrian	(a) Adanya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi (b) Berfungsinya infrastruktur pengembangan kewirausahaan (c) Adanya kondisi RTH menjadi RPK (RTH yang dilengkapi	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				WiFi, sarana pertemuan, dan kelembagaan pengelola.	
			Bappeda	(a) Tersedianya infrastruktur pendukung inovasi (pusat inovasi, inkubator, creative center, KST, RPK, PLUT, dan sejenisnya) di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Infrastruktur pendukung inovasi di setiap kabupaten/kota berfungsi dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas riset, inovasi, dan kewirausahaan. (c) Tersedianya RTH yang memadai, terkelola dengan baik, dan dikembangkan menjadi RPK yang dilengkapi fasilitas digital, ruang pertemuan, serta kelembagaan pengelola di setiap kabupaten/kota.	
4.	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	(a) Apakah tersedia skema anggaran khusus untuk penumbuh kembangan kewirausahaan ? (b) Apakah ada upaya mencari sumber-sumber pendanaan non APBD propinsi Sumsel	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(a) Tidak ada (b) Tidak ada	
			Bappeda	(a) Tidak ada (b) Tidak ada	
			Dinas Koperasi dan UKM	(a) Adanya anggaran edupreneur bagi masyarakat, anak sekolah, mahasiswa, dan calon	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(dana CSR, APBD provinsi, APBN, sumber lain) untuk mendukung Pengembangan kewirausahaan ?		entrepreneur melalui program sultan muda (b) Adanya kerjasama atau MOU jangka panjang dengan program yang jelas	
			Dinas Perindustrian	(a) Tersedia skema anggaran khusus untuk penumbuh kembangan kewirausahaan (b) Adanya upaya untuk mencari sumber pendanaan non APBD	
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(a) Peraturan yang mengatur atau SOP skema pendanaan kewirausahaan (b) Jumlah UMKM yang bermitra dengan BUMN/BUMD	
			Balitbangda	(a) Tersedianya skema anggaran khusus yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung penumbuhkembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Terbangunnya mekanisme pendanaan non-APBD yang terkoordinasi dan berkelanjutan (CSR, APBN, dan sumber lain) untuk mendukung pengembangan kewirausahaan.	
			Biro Perekonomian	(a) Tersedianya skema anggaran khusus yang terencana dan berkelanjutan untuk	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				mendukung penumbuhkembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Terbangunnya mekanisme pendanaan non-APBD yang terkoordinasi dan beragam (CSR, APBN, dan sumber lain) untuk mendukung pengembangan kewirausahaan.	
5.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah saat ini ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel ?	Dinas Koperasi dan UKM	Sistem Single Window Pendataan UMKM Provinsi	
			Dinas Perindustrian	Adanya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual	
			Balitbangda	Tersedianya basis data kekayaan intelektual yang terintegrasi, mutakhir, dan dimanfaatkan secara aktif untuk mendukung pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan.	
			Bappeda	Adanya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel	
			Dinas Perdagangan	Tersedia Kebijakan terpadu lintas sektor yang mengatur pengembangan kewirausahaan produk Dalam Negeri dan Produk Luar Negeri.	
II	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	(a) Bagaimana kondisi/ kesiapan Balitbangda atau OPD lain di Sumsel dalam mendukung Pengembangan kewirausahaan (anggaran, SDM, kemampuan melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan riset dan inovasi)? (b) Apakah Balitbangda atau OPD lain melakukan kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi, khususnya dalam rangka pengembangan kewirausahaan untuk menghasilkan 100.000 pengusaha muda ?	Balitbangda	(a) Balitbangda dan OPD terkait memiliki dukungan anggaran, SDM, dan kapasitas koordinasi yang kuat dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan kewirausahaan. (b) Terbangunnya kerja sama yang terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi hasil antara Balitbangda/OPD dengan BRIN, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan kewirausahaan dan penciptaan pengusaha muda.	
			Bappeda	(a) Target yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat tercapai (b) Dengan adanya 100.000 sultan muda dapat meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi angka pengangguran	
			Dinas Koperasi dan UKM	(a) Hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai teknologi yg membantu pngenmbangan kewirausaan (b) Menjadi program wajib	
			Dinas Perindustrian	(a) - (b) Adanya kerjasama yang berkelanjutan	
			Dinas Pendidikan	(a) Semakin sering melaksanakan kegiatan kewirausahaan	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(b) Menambah sekolah sekolah SMK untuk menjalankan bursa kerja khusus (c) Menambah -	
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(a) Pada Renstra Disnakertrans di tahun 2029 ditargetkan sudah mampu melakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 80 Orang (b) Diharapkan tahun 2029 Disnakertrans dapat melakukan kerjasama dengan BRIN/Swasta/PT	
7.	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Apakah di Propinsi Sumsel saat ini tersedia sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda ?	Balitbangda	Tersedianya sarana pendukung kolaborasi riset dan inovasi yang terintegrasi (website, media koordinasi, dan platform digital) untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda.	
			Bappeda	Ada	
			Dinas Koperasi dan UKM	Ada	
			Dinas Perindustrian	Tersedianya sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	
		Apakah di Propinsi Sumsel saat ini tersedia sarana pendukung (misalnya website, media	Balitbangda	Tersedianya sarana kolaborasi riset dan inovasi yang berfungsi optimal dan dikelola dengan baik untuk	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?		mendukung pelaksanaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	
			Bappeda	Ada	
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi alur BKBK dari awal pengajuan Kab/Kota sampai dengan proses pencairan.	
III	Kemitraan Riset dan Inovasi				
8.	Peningkatan difusi inovasi	Apakah Propinsi Sumsel melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/ penumbuhan kewirausahaan di kabupaten/kota?	Balitbangda	Terlaksananya transfer teknologi yang terstruktur, merata, dan berkelanjutan kepada kabupaten/kota untuk mendukung pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan.	
			Bappeda	Hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai teknologi yg membantu pengembangan kewirausahaan di Kabupaten/Kota	
			Dinas Koperasi dan UKM	Hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai teknologi yg membantu pngenmbangan kewirausaan	
			Dinas Perindustrian	Adanya transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/ penumbuhan kewirausahaan di kabupaten/kota	
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Diharapkan Disnakertrans dapat melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan /penumbuhan kewirausahaan di Kab/Kota	Melalui Program Penempatan Tenaga Kerja, Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Apakah Propinsi Sumsel memiliki kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota?	Balitbangda	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/inovasi yang terstruktur, merata, dan berdampak nyata bagi pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	
			Bappeda	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/inovasi yang terencana, rutin, dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	
			Dinas Koperasi dan UKM	Tersedianya program sosialisasi dan diseminasi hasil riset/inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan bagi pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota.	
			Dinas Perindustrian	Adanya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota	
		Apakah Propinsi Sumsel memiliki kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di setiap kabupaten/kota?	Balitbangda	Tersedianya sosialisasi dan diseminasi hasil riset Bantuan Operasional Desa/Kelurahan yang merata dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota.	
			Bappeda	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset terkait Bantuan Operasional Desa/Kelurahan yang terencana,	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				rutin, dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	
IV	Budaya Riset dan Inovasi				
10.	Promosi dan kampanye inovasi	Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang pogram 100.000 Sultan Muda ?	Balitbangda	Terselenggaranya promosi dan kampanye yang fokus, konsisten, dan berskala luas khusus untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda di Provinsi Sumatera Selatan.	
		Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan?	Dinas Koperasi dan UKM	Menjadi program wajib	
			Dinas Pemuda dan Olahraga	Kegiatan dapat terus dilaksanakan dengan Peningkatan kualitas pelatihan. Peserta pelatihan diharapkan mampu menerapkan hasil pelatihan sehingga dapat meningkatkan produksi dan penjualan	
			Balitbangda	Terselenggaranya promosi dan kampanye UKM wirausaha muda yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan akses pasar di Provinsi Sumatera Selatan.	
		Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	Balitbangda	Terselenggaranya promosi dan kampanye yang terencana, rutin, dan menjangkau seluruh kabupaten/kota mengenai Bantuan Operasional	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan.	
11.	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan lomba inovasi? Apakah lomba inovasi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung Pengembangan 100.000 Sultan Muda ?	Balitbangda	Terselenggaranya lomba inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan serta diarahkan secara khusus untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda di Provinsi Sumatera Selatan.	
			Dinas Koperasi dan UKM	Menjadi Agenda Tahunan dengan Dukungan Anggaran dan Kolaborasi bberpa pihak	
		Apakah ada penyelenggaraan innovation award tentang inovasi pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	Balitbangda	Terselenggaranya innovation award untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan.	
12.	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha baru di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda ?	Balitbangda	Tersedianya program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset dan inovasi di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda.	
			Dinas Koperasi dan UKM	Tersedianya program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset dan inovasi di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda.	
			Dinas Perindustrian	adanya program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha baru di setiap	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda	
13.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah di Propinsi Sumsel ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan kewirausahaan pemuda ?	Balitbangda	Tersedianya inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat serta kearifan lokal yang terstruktur untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.	
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program pengembangan kebudayaan dalam konteks budaya pariwisata dan kearifan lokal adalah konsep pelestarian dan pengembangan budaya yang berakar pada adat tradisi	
			Dinas Koperasi dan UKM	Tersedianya kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal yang terstruktur dan terdokumentasi untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Provinsi Sumatera Selatan.	
		Inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	Balitbangda	Tersedianya inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tersedianya inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terstruktur dan terdokumentasi untuk mendukung pengelolaan	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	
V	Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
14.	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah di Propinsi Sumsel ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda?	Balitbangda	Tersedianya prakarsa riset dan inovasi yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda di Provinsi Sumatera Selatan.	
			Dinas Koperasi dan UKM	Adanya prakarsa riset dan inovasi yang terencana dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda di Provinsi Sumatera Selatan.	
			Dinas Perindustrian	Adanya prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	
		Apakah ada prakarsa riset dan inovasi untuk pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	Balitbangda	Tersedianya prakarsa riset dan inovasi yang terstruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	
			Bappeda	Adanya prakarsa riset dan inovasi yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	
15.	Penyelenggaraan pengembangan klaster	Apakah setiap kabupaten/kota di Propinsi Sumsel dilakukan pembentukan dan	Balitbangda	Terbentuk dan berkembangnya klaster inovasi atau sentra UKM berbasis kelompok usaha di setiap	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	inovasi berbasis produk unggulan daerah	pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM berbasis kelompok usaha untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda ?		kabupaten/kota untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda.	
			Dinas Koperasi dan UKM	Terbentuk dan berkembangnya klaster inovasi atau sentra UKM berbasis kelompok usaha di setiap kabupaten/kota untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda.	
16.	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Apakah program Pengembangan 100.000 Sultan Muda telah dikaitkan dengan kebijakan di masing-masing kabupaten/kota (koherensi kebijakan)?	Balitbangda	Program 100.000 Sultan Muda terintegrasi dan selaras dengan kebijakan serta program pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	
			Bappeda	Program pengembangan 100.000 Sultan Muda dapat tercapai melalui dukungan dari 17 kabupaten kota	
			Dinas Koperasi dan UKM	Program Pengembangan 100.000 Sultan Muda terintegrasi dan selaras dengan kebijakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	
		Apakah ada kohensi/sinkronisasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	Bappeda	Terwujudnya sinkronisasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	
VI	Penyelarasan dengan perkembangan global				
17.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi	Apakah di Propinsi Sumsel ada program/ kegiatan fasilitasi kepada pelaku usaha muda	Dinas Perdagangan	Tersedia kebijakan terpadu lintas sektor yang memenuhi Standardisasi produk.	

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	dalam memenuhi Standarisasi produk masing-masing (seperti: perijinan (BPOM, PIRT, dsb), Kemasan, Label Halal, Komposisi/ingredient), Ukuran Berat Bersih, dsb) ?dalam mendukung tercapainya 100.000 Sultan Muda	Dinas Koperasi dan UKM	Adanya ruang khusus dan SDM yang berperan aktif dan bertanggung jawab melalui pola anggaran	
			Dinas Perindustrian	Ada program/ kegiatan fasilitasi kepada pelaku usaha muda dalam memenuhi Standarisasi produk masing-masing (seperti: perijinan (BPOM, PIRT, dsb), Kemasan, Label Halal, Komposisi/ingredient), Ukuran Berat Bersih, dsb) dalam mendukung tercapainya 100.000 Sultan Muda	
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan berdasarkan kewenangan Prov/kab/kota	
18.	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional yang dilakukan Propinsi Sumsel untuk Pengembangan kewirausahaan pemuda dalam mencapai 100.000 Sultan Muda?	Balitbangda	Terbangunnya kerja sama internasional yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda dalam pencapaian 100.000 Sultan Muda.	
			Dinas Koperasi dan UKM	Terbangunnya kerja sama internasional yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda dalam pencapaian program 100.000 Sultan Muda.	

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Analisis kesenjangan merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi aktual ekosistem riset dan inovasi dengan kondisi ideal yang hendak dicapai. Penilaian ini didasarkan pada enam elemen ekosistem riset dan inovasi beserta sub-elemennya sebagaimana dirumuskan oleh BRIN. Melalui proses tersebut, diperoleh gambaran komprehensif mengenai aspek-aspek yang telah berfungsi secara optimal, area yang masih memerlukan penguatan, serta berbagai faktor penghambat yang perlu ditangani. Hasil analisis kesenjangan ini menjadi landasan penting bagi perumusan strategi dan penyusunan peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga arah pembangunan dapat ditetapkan secara lebih terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

4.1 Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Kemampuan Melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence based policy*)

Sub bab ini menyajikan analisis kesenjangan (*gap analysis*) mengenai kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyusun kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*/EBP) serta mendukung penguatan inovasi daerah. Analisis ini digunakan untuk membandingkan kondisi aktual dengan standar ideal yang diharapkan, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi aspek-aspek krusial yang memerlukan peningkatan demi terciptanya proses perumusan kebijakan yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data.

Fokus analisis mencakup sejumlah faktor pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan meliputi ketersediaan sumber daya manusia IPTEK, fasilitas pendukung penyusunan kajian, alokasi anggaran riset dan inovasi, program riset yang telah dilaksanakan, kelembagaan IPTEK, serta jejaring riset dan inovasi termasuk kerja sama dengan mitra strategis. Faktor-faktor ini

menjadi fondasi utama bagi terselenggaranya proses kajian kebijakan yang terstruktur dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui identifikasi kesenjangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memperoleh pemetaan yang lebih jelas mengenai kekuatan yang sudah dimiliki, tantangan yang masih dihadapi, serta ruang perbaikan yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Temuan ini sekaligus menjadi pijakan bagi perumusan strategi penguatan kapasitas dan pembangunan ekosistem pendukung agar praktik EBP dapat diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, proses kebijakan ke depan dapat lebih terarah, responsif, dan memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Analisis kesenjangan terhadap faktor pendukung ekosistem riset dan inovasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Evaluasi ini membandingkan capaian lima tahun terakhir dengan kondisi ideal yang diharapkan, sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan EBP serta perkembangan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator yang dianalisis mencakup jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan, jumlah inovasi bidang tata kelola, inovasi layanan publik, inovasi lain termasuk inovasi masyarakat, serta nilai dan predikat Indeks Inovasi Daerah (IID). Penilaian atas indikator tersebut memberikan dasar empiris bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan arah penguatan kapasitas kebijakan dan inovasi secara lebih strategis, konsisten, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan Kemampuan Dalam Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence based policy*)

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
A. Faktor Pendukung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP)				
1.	Sumber daya manusia IPTEK daerah	Masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang Iptek, terlihat dari adanya program pengembangan talenta digital.	Tersedianya SDM Iptek daerah yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan pengembangan inovasi daerah. Pengembangan talenta digital, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah sehingga kualitas SDM Iptek meningkat dan mampu menjawab kebutuhan kebijakan daerah.	Kesenjangan terjadi karena kualitas dan kuantitas SDM IPTEK saat ini masih terbatas dan baru didukung oleh program pengembangan talenta digital, sehingga belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Kondisi ini belum sejalan dengan kebutuhan ideal yang menuntut ketersediaan SDM IPTEK yang memadai, terlatih, dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui kerja sama perguruan tinggi serta program peningkatan kapasitas yang terarah.

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
2.	Fasilitas pendukung dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan dan inovasi daerah	Fasilitas riset dan inovasi daerah didukung oleh kelembagaan Iptek yang sudah melembaga.	Tersedianya fasilitas riset dan inovasi daerah yang lengkap, berfungsi optimal, dan terintegrasi dengan kelembagaan Iptek yang telah melembaga. Fasilitas pendukung ini secara konsisten diperkuat dan dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti serta mendorong lahirnya inovasi daerah yang aplikatif.	Kesenjangan terletak pada fungsi dan pemanfaatan fasilitas riset dan inovasi yang meskipun telah didukung kelembagaan IPTEK, namun belum sepenuhnya lengkap, optimal, dan terintegrasi. Kondisi ini belum memenuhi kebutuhan ideal yang mengharuskan fasilitas pendukung dimanfaatkan secara konsisten untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan inovasi daerah yang aplikatif.
3.	Anggaran riset dan inovasi daerah	Anggaran riset dan inovasi daerah dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah. Rincian spesifik jumlah anggaran bervariasi setiap tahunnya.	Tersedianya anggaran riset dan inovasi daerah yang memadai, berkelanjutan, dan terencana dengan baik, yang bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Dukungan pendanaan ini mampu	Kesenjangan muncul akibat belum terjaminnya kecukupan, keberlanjutan, dan perencanaan anggaran riset dan inovasi daerah, meskipun telah bersumber dari APBD dan dana lain yang sah. Kondisi ini belum

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			menjamin keberlangsungan kegiatan riset, pengembangan inovasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti secara efektif.	sejalan dengan kebutuhan ideal yang menuntut dukungan pendanaan yang memadai dan terencana untuk menjamin keberlangsungan riset, inovasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti secara efektif.
4.	Program-program riset dan inovasi daerah yang pernah dilaksanakan	Pada tahun 2025, terdapat program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah dilaksanakan setiap tahunnya dan tahun 2026 terdapat penambahan program baru yaitu Program Riset dan Inovasi	Terselenggaranya program riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan, terstruktur, dan terus berkembang dari tahun ke tahun, dengan perluasan jenis program sesuai kebutuhan daerah. Program penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan inovasi yang berdampak nyata, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks	Kesenjangan terletak pada keberlanjutan dan pengembangan program riset dan inovasi yang masih terbatas pada pelaksanaan rutin dan penambahan program tertentu. Kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal berupa program yang terstruktur, terintegrasi, dan berkembang secara konsisten untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti serta inovasi yang

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			Inovasi Daerah pada level sangat inovatif secara nasional.	berdampak nyata dan berkelanjutan.
5.	Kelembagaan IPTEK di daerah	Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2020-2025 sebagai Provinsi Terinovatif Tingkat Nasional	Terwujudnya kelembagaan Iptek daerah yang kuat, berfungsi optimal, dan berperan strategis dalam mengoordinasikan serta mengimplementasikan riset dan inovasi daerah. Peran lembaga seperti Balitbangda semakin diperkuat sebagai motor penggerak inovasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, sehingga prestasi daerah sebagai provinsi sangat inovatif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.	Kesenjangan muncul antara capaian penghargaan sebagai provinsi terinovatif dan penguatan fungsi kelembagaan IPTEK secara internal. Meskipun telah memperoleh pengakuan nasional, peran kelembagaan IPTEK masih perlu diperkuat agar berfungsi optimal dan strategis dalam mengoordinasikan riset, inovasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti secara berkelanjutan.
6.	Jejaring Riset dan Inovasi Daerah (kerjasama dengan mitra)	Inovasi daerah di Sumatera Selatan didorong melalui kolaborasi model Pentahelix yang melibatkan akademisi, pebisnis,	Terbangunnya jejaring riset dan inovasi daerah yang kuat, aktif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi Pentahelix (akademisi,	Kesenjangan terletak pada tingkat efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi Pentahelix yang meskipun telah

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		pemerintah, komunitas, dan media (ABGCM).	bisnis, pemerintah, komunitas, dan media). Kerja sama dengan berbagai mitra, khususnya perguruan tinggi, dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM Iptek, memperkuat riset, serta menghasilkan inovasi dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan daerah.	berjalan, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini belum sejalan dengan kebutuhan ideal yang menuntut jejaring riset dan inovasi yang lebih kuat, aktif, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas SDM IPTEK, memperkuat riset, serta menghasilkan inovasi dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan daerah.
B. Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (EBP)				
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti masih tergolong rendah, dengan total 2 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2024 dan 2025. Kedua	Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan secara konsisten dan berkelanjutan setiap tahun, tidak terbatas pada isu tertentu. Rekomendasi disusun berdasarkan kajian data	Kesenjangan terletak pada rendahnya jumlah dan konsistensi rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan, yang masih terbatas pada dua rekomendasi dan isu tertentu. Kondisi ini belum

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		rekomendasi tersebut berbentuk naskah akademik rancangan peraturan daerah, yaitu terkait perubahan susunan perangkat daerah dan kebijakan riset dan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik <i>evidence based policy</i> belum berjalan secara konsisten dan masih terbatas pada isu-isu tertentu, sehingga pemanfaatan kajian berbasis data sebagai dasar perumusan kebijakan daerah belum optimal dan belum berkelanjutan	dan analisis yang kuat serta mencakup berbagai sektor strategis daerah, sehingga praktik <i>evidence based policy</i> menjadi bagian integral dalam proses perumusan kebijakan daerah.	sejalan dengan kebutuhan ideal yang menuntut produksi rekomendasi berbasis data secara rutin, lintas sektor, dan berkelanjutan agar <i>evidence based policy</i> terintegrasi dalam proses perumusan kebijakan daerah.
2.	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dimanfaatkan 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti masih terbatas, dengan 2 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti menjadi produk hukum daerah pada tahun 2024 dan 2025. Rekomendasi tersebut telah dimanfaatkan	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan daerah, yang tercermin dari konsistensi tindak lanjut rekomendasi menjadi kebijakan atau produk hukum daerah. Proses perumusan kebijakan	Kesenjangan muncul akibat pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang masih terbatas dan belum konsisten, meskipun sebagian telah ditindaklanjuti menjadi produk hukum. Kondisi ini belum memenuhi kebutuhan

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		secara formal melalui penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan susunan perangkat daerah serta Peraturan Daerah tentang riset dan inovasi. Meskipun menunjukkan adanya keterhubungan antara kajian berbasis bukti dan keputusan kebijakan, tingkat pemanfaatannya masih belum konsisten dan belum mencerminkan praktik <i>evidence based policy</i> yang kuat dan berkelanjutan dalam proses perumusan kebijakan daerah.	secara sistematis menjadikan hasil kajian berbasis bukti sebagai rujukan utama, sehingga penerapan <i>evidence based policy</i> berjalan kuat dan berkelanjutan.	ideal yang mengharuskan setiap rekomendasi berbasis bukti menjadi rujukan utama dan digunakan secara sistematis dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah.
3.	Jumlah inovasi tata kelola pemerintahan daerah 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang dihasilkan mencapai 152 inovasi, sebagaimana tercatat dalam Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Innovative Government Award (IGA)	Terwujudnya pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang stabil dan berkelanjutan dari tahun ke tahun, dengan jumlah inovasi yang terjaga dan tidak berfluktuasi tajam. Inovasi yang	Kesenjangan terlihat pada belum stabilnya pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang masih berfluktuasi antar tahun. Kondisi ini belum sesuai dengan kebutuhan ideal yang menuntut

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		Kementerian Dalam Negeri, serta paparan Gubernur. Capaian ini menunjukkan tingkat aktivitas inovasi yang cukup tinggi, namun masih berfluktuasi antar tahun, dengan penurunan pada 2023 dan lonjakan signifikan pada 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan inovasi tata kelola belum sepenuhnya berjalan stabil dan berkelanjutan, serta masih dipengaruhi oleh dinamika program dan dorongan administratif tahunan.	dihasilkan bersifat strategis, berkualitas, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan publik daerah.	inovasi yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kualitas serta dampak nyata terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik daerah.
4.	Jumlah inovasi pelayanan publik; 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi pelayanan publik yang dihasilkan mencapai 514 inovasi, berdasarkan pelaporan pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam	Terwujudnya pengembangan inovasi pelayanan publik yang konsisten dan berkelanjutan dari tahun ke tahun, dengan jumlah inovasi yang stabil serta kualitas dan dampak yang meningkat. Inovasi pelayanan publik tidak	Kesenjangan terletak pada menurunnya konsistensi dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik meskipun jumlah kumulatifnya tinggi. Kondisi ini belum sejalan dengan kebutuhan ideal yang menuntut

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		Negeri, serta paparan Gubernur. Meskipun secara kumulatif menunjukkan tingkat aktivitas inovasi yang tinggi, jumlah inovasi cenderung menurun dari tahun ke tahun, terutama sejak 2023 hingga 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan dan konsistensi pengembangan inovasi pelayanan publik masih menjadi tantangan, serta memerlukan penguatan strategi agar inovasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata.	hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi mampu memberikan perbaikan nyata terhadap kualitas layanan, efisiensi birokrasi, dan kepuasan masyarakat.	pengembangan inovasi yang stabil, berorientasi pada kualitas dan dampak, serta mampu meningkatkan kinerja layanan dan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.
5.	Jumlah inovasi daerah lainnya (termasuk inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat), 5 tahun terakhir	Dalam lima tahun terakhir, jumlah inovasi daerah lainnya termasuk inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat mencapai 514 inovasi, sebagaimana tercatat dalam Aplikasi Indeks Inovasi	Meningkatnya inovasi daerah non-pemerintah dan inovasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan, didukung oleh ekosistem inovasi yang inklusif dan kondusif. Partisipasi	Kesenjangan muncul pada keberlanjutan inovasi non-pemerintah dan inovasi berbasis masyarakat yang cenderung menurun meskipun partisipasi relatif tinggi. Kondisi

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		Daerah (IID), Innovative Government Award (IGA), serta paparan Gubernur. Capaian ini menunjukkan partisipasi dan aktivitas inovasi yang cukup tinggi, namun trennya cenderung menurun sejak 2024 setelah relatif stabil pada periode 2021–2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberlanjutan inovasi non-pemerintah dan inovasi berbasis masyarakat masih menghadapi tantangan, serta memerlukan penguatan ekosistem dan dukungan agar inovasi dapat berkembang secara konsisten dan berkelanjutan.	masyarakat dalam menghasilkan inovasi terus diperkuat sehingga inovasi berkembang secara konsisten, berdampak, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.	ini belum memenuhi kebutuhan ideal berupa ekosistem inovasi yang inklusif dan konsisten dalam mendukung partisipasi masyarakat serta memastikan inovasi berkembang secara berkelanjutan dan berdampak nyata.
6.	Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) 5 tahun terakhir (termasuk predikat)	Dalam lima tahun terakhir, Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) secara konsisten berada pada predikat Sangat Inovatif, dengan	Terjaganya capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah pada predikat Sangat Inovatif secara stabil dan berkelanjutan dengan	Kesenjangan terlihat pada fluktuasi nilai IID yang menunjukkan belum stabilnya kualitas dan kinerja inovasi

No	Area Faktor Penting dalam menghasilkan EBP	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		rentang nilai antara 75,79 hingga 83,28. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan inovasi daerah. Namun, fluktuasi nilai antar tahun terutama penurunan pada 2024 sebelum kembali meningkat pada 2025 mengindikasikan bahwa kualitas dan kinerja inovasi belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan konsistensi dan keberlanjutan inovasi agar capaian “Sangat Inovatif” dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan merata.	kecenderungan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Kinerja inovasi daerah menjadi lebih merata, konsisten, dan berdampak, sehingga fluktuasi nilai dapat diminimalkan dan posisi daerah sebagai provinsi sangat inovatif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.	daerah, meskipun predikat Sangat Inovatif tetap terjaga. Kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan ideal yang menuntut konsistensi, pemerataan kinerja inovasi, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan untuk mempertahankan capaian tersebut secara stabil.

4.2 Analisis Kesenjangan Tema Prioritas melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi

Sub bab ini menyajikan analisis kesenjangan yang berfokus pada tema prioritas “100.000 Sultan Muda Sumsel” sebagai program strategis penguatan kapasitas sosial-ekonomi melalui ekosistem riset dan inovasi daerah. Analisis ini disusun untuk membandingkan kondisi aktual pelaksanaan program dengan kondisi ideal yang ingin dituju. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada perangkat daerah terkait, sehingga diperoleh informasi empiris mengenai persepsi, tingkat kesiapan, dan kapasitas institusional dalam mendukung implementasi program tersebut. Melalui pendekatan ini, berbagai hambatan, peluang, serta kebutuhan intervensi strategis dapat diidentifikasi secara lebih terarah. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai sejauh mana dukungan riset dan inovasi telah berjalan serta aspek yang masih memerlukan penguatan untuk mempercepat keberhasilan program 100.000 Sultan Muda Sumsel.

Hasil analisis kuesioner menunjukkan sejumlah dimensi penting terkait tema prioritas, seperti kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan program pendukung, serta tingkat kolaborasi antar-perangkat daerah. Temuan tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Identifikasi kesenjangan secara sistematis ini memungkinkan pemerintah daerah merancang langkah-langkah penguatan yang selaras dengan arah pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa implementasi program 100.000 Sultan Muda Sumsel dapat berjalan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 2 Tabel Analisis Kesenjangan Kondisi Saat ini dan Kondisi yang diharapkan Berdasarkan Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
1.	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Kebijakan dapat berupa Perda, Perkada/Perbup, dan sebagainya.	(a) Berikan gambaran, apakah (saat ini) ada kebijakan yang menghambat dan atau mendukung Pengembangan kewirausahaan di Sumsel ?	Dinas Koperasi dan UKM	(a) Sudah terdapat beberapa kebijakan daerah yang mendukung pengembangan kewirausahaan, Namun, implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi lintas sektor dan keterbatasan anggaran pembinaan.	(a) Lebih terintegrasi dan kolaborasi (b) Terbitnya Peraturan Gubernur atau Perda yang menjadi payung hukum pengembangan 100.000 wirausaha muda di Sumsel.	(a) Sudah memiliki kebijakan pengembangan kewirausahaan, namun masih terkendala pada aspek kordinasi lintas sektor dan keterbatasan anggaran sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan dapat menunjang sinergitas dan kolaborasi
		(b) Apakah sampai 5 tahun ke depan diperlukan kebijakan baru (berupa Perda atau Pergub atau peraturan jenis lain) untuk Pengembangan kewirausahaan di Sumsel?	Dinas Perdagangan	(b) Belum ada regulasi khusus yang mengatur ekosistem kewirausahaan secara menyeluruh di tingkat provinsi.		(b) Diperlukan adanya kebijakan yang berupa Pergub atau Perda yang dapat menjadi payung hukum pengembangan 100.000 wirausaha muda di Sumsel
				(a) Belum ada kebijakan yang mengatur pengembangan kewirausahaan (b) Belum ada Perda atau Pergub tentang pengembangan kewirausahaan	(a) Tersedia Kebijakan terpadu lintas sektor yang mengatur pengembangan kewirausahaan Produk Dalam Negeri dan Produk Luar Negeri.	(a) Diperlukan kebijakan terpadu lintas sektor yang dapat mengatur pengembangan kewirausahaan (b) Diharapkan adanya kebijakan berupa Pergub atau Perda yang mendukung

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(b) Terbitnya Perda atau Pergub tentang Pengembangan Kewirausahaan	pengembangan kewirausahaan
			Dinas Perindustrian	(a) Belum ada kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Ya, perlunya Perda atau Pergub atau peraturan jenis lain untuk pengembangan kewirausahaan di Sumsel	(a) Adanya kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Perda yang mengatur pengembangan kewirausahaan	(a) Diperlukan kebijakan yang dapat mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Diharapkan adanya kebijakan berupa Perda yang dapat mengatur pengembangan kewirausahaan
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(a) Terdapat kebijakan yang mendukung riset dalam aspek komoditas unggul setiap daerah untuk dibuat dalam bentuk kajian sampai pada peluang investasi yang siap dijual (b) Perlunya peraturan mengenai komoditas unggulan / potensi unggulan setiap kabupaten/kota.	(a) Tersedianya kajian potensi dan peluang investasi kabupaten/kota (b) Terbitnya peraturan tentang potensi unggulan daerah	(a) Sudah terdapat kebijakan yang mendukung riset dalam aspek komoditas, namun masih diperlukan adanya kajian potensi dan peluang investasi (b) Diperlukan terbitnya peraturan yang mengatur tentang potensi unggulan daerah
			Balitbangda	(a) Sudah ada kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan, namun	(a) Memaksimalkan implementasi kebijakan pengembangan kewirausahaan yang	(a) Kebijakan pengembangan kewirausahaan sudah tersedia, namun implementasinya belum optimal, sehingga diperlukan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				implementasinya belum optimal (b) Iya, diperlukan kebijakan baru baik pergub maupun perda yang secara eksplisit mendukung pengembangan kewirausahaan khususnya terkait program 100.000 Sultan Muda	ada saat ini sehingga dapat berdampak secara optimal (b) Diterbitkannya kebijakan baru berupa pergub atau perda yang secara eksplisit mendukung pengembangan kewirausahaan	penguatan pelaksanaan kebijakan agar berdampak secara maksimal. (b) Kebijakan baru yang secara eksplisit mendukung pengembangan kewirausahaan, khususnya program 100.000 Sultan Muda, belum tersedia, sehingga diperlukan penerbitan pergub atau perda yang secara khusus mengatur dan memperkuat pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan.
			Bappeda	(a) Sudah ada kebijakan yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Sumsel (b) Perlu	Perlu adanya kebijakan baru (Perda/Pergub) yang mendukung untuk keberlanjutan Pengembangan kewirausahaan di Sumsel	Sudah ada kebijakan, namun belum secara khusus mendukung pengembangan kewirausahaan sehingga diperlukan adanya kebijakan baru berupa Perda atau Pergub yang dapat mendukung kewirausahaan secara berkelanjutan
		Apakah ada kebijakan (misalnya perda, pergub, keputusan OPD, dsb) yang mendukung Bantuan Operasional	Bappeda	Sudah ada kebijakan yang mendukung untuk mengatasi permasalahan terbatasnya kemampuan keuangan kabupaten/kota /desa saat ini yaitu melalui kebijakan	Tersedianya Pergub yang lebih terstruktur terhadap Perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)	Sudah ada kebijakan Pergub yang mendukung keterbatasan kemampuan keuangan, namun masih diperlukan kebijakan Pergub yang lebih terstruktur terhadap perencanaan Bantuan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Desa/Kelurahan di Sumsel?		Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus		Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sudah ada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Sumsel	Tersedia Pergub yang lebih terstruktur terhadap Perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)	Sudah ada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Bantuan Operasional, namun masih perlu direvisi agar lebih terstruktur terhadap Perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)
2.	Penataan basis data Riset dan Inovasi	(a) Apakah tersedia basis data yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel (b) Kalau tersedia, dalam bentuk apa basis data tsb (manual/form, tercatat dalam Excel, dsb). (c) Apakah data tsb sudah dalam bentuk digital dan terhubung dengan Satu Data Indonesia?	Dinas Koperasi dan UKM	(a) Ada (b) Excel (c) Belum	(a) Adanya aplikasi khusus yang terintegrasi (b) - (c) -	(a) Sudah ada basis data yang mendukung pengembangan kewirausahaan melalui SIDT dan website, namun masih diperlukan dukungan aplikasi khusus yang dapat terintegrasi (b) - (c) -
			Dinas Perindustrian	(a) Belum tersedia (b) Data yang dimiliki adalah data industri kecil menengah yang menggambarkan jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan investasi. (manual, form excel) (c) Masih data manual belum terhubung dengan SDI	(a) Tersedianya basis data pengembangan kewirausahaan (b) Tersedianya basis data (manual, form excel) (c) Tersedia data digital	(a) Diperlukan adanya basis data yang dapat mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Sudah ada basis data berupa data manual dan form excel, namun masih perlu dimaksimalkan (c) Data yang tersedia masih terkategori manual dan belum terhubung dengan SDI sehingga diperlukan adanya

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						basis data digital yang dapat diakses secara <i>real time</i>
			Bappeda	(a) Tidak ada data khusus terkait list kewirausahaan yang dikeluarkan oleh Bappeda, namun pada RPJMD Prov Sumsel Tahun 2025-2029 sudah diakomodir terkait target rasio kewirausahaan yang harus dicapai oleh Prov Sumsel. (b) Tidak tersedia (c) Belum	(a) Tersedianya basis data yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel (b) Tersedianya data dalam bentuk manual/form excel (c) Data yang sudah berbentuk digital dan terhubung dengan Satu Data Indonesia	(a) Diperlukan basis data yang mendukung Pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sumsel (b) Diperlukan basis data yang dapat berupa manual dan form excel (c) Diperlukan basis data yang sudah berbentuk digital dan dapat terhubung dengan Satu Data Indonesia
			Balitbangda	(a) Sudah ada basis data namun pemanfaatannya masih kurang maksimal (b) Iya, tersedia dalam bentuk excel (c) Data belum terhubung atau terintegrasi dengan Satu Data Indonesia	(a) Dimaksimalkannya pemanfaatan basis data untuk mendukung pengembangan kewirausahaan (b) Data tidak hanya excel, namun terdapat juga data digital yang terintegrasi dengan sebuah platform (c) Data digital dapat terhubung dengan Satu Data Indonesia	(a) Basis data sudah tersedia, namun pemanfaatannya belum maksimal, sehingga diperlukan optimalisasi penggunaan basis data untuk mendukung pengembangan kewirausahaan. (b) Data masih terbatas dalam bentuk Excel, sehingga diperlukan pengembangan data digital yang terintegrasi dalam sebuah platform untuk mendukung pengelolaan data kewirausahaan. (c) Data kewirausahaan belum terhubung dengan Satu Data Indonesia, sehingga

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						diperlukan integrasi data digital agar selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
		(a) Apakah tersedia basis data yang mendukung kebijakan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan? (b) Kalau tersedia, dalam bentuk apa basis data tsb (manual/form, tercatat dalam Excel, dsb).	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(a) Tersedia, tetapi aplikasi masih dalam proses (b) Form Excel	(a) Tersedianya aplikasi BKBK dengan database online (b) Aplikasi BKBK yang terealisasi	(a) Sudah tersedia basis data yang mendukung kebijakan Bantuan Operasional, namun diperlukan peningkatan berupa ketersediaan aplikasi BKBK yang dapat terintegrasi dengan database online (b) Basis data masih dalam bentuk form excel sehingga diperlukan ketersediaan aplikasi BKBK untuk mendukung kebijakan bantuan operasional
			Bappeda	(a) Tidak ada (b) Tidak ada	(a) Tersedianya aplikasi BKBK dengan database secara online	Diperlukan ketersediaan aplikasi BKBK yang terintegrasi dengan database online untuk mendukung kebijakan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan
3.	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	(a) Apakah di setiap kabupaten/kota di Propinsi Sumsel tersedia infrastruktur berikut: pusat inovasi, inkubator, creative center, kawasan sains dan	Balitbangda	(a) Sudah tersedia infrastruktur berupa pusat inovasi, inkubator dan lainnya, namun belum merata di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (b) Sebagian berfungsi dengan optimal, namun	(a) Tersedianya infrastruktur pendukung inovasi (pusat inovasi, inkubator, creative center, KST, RPK, PLUT, dan sejenisnya) yang merata di seluruh	(a) Infrastruktur paten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Sebagian infrastruktur sudah berfungsi optimal, namun sebagian lainnya belum dimanfaatkan secara efektif dan belum dikelola secara maksimal.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		teknologi (KST), ruang publik kreatif (RPK), PLUT, dsb ? (b) Bagaimana keberfungsian dari infrastruktur (di atas) yang tersedia di setiap Kabupaten/kota? (c) Bagaimana kondisi RTH (ruang terbuka hijau) di setiap kabupaten/kota: jumlah, lokasi, keberfungsian, dan apakah mungkin dikembangkan menjadi RPK (RTH yang dilengkapi WiFi, sarana pertemuan, dan kelembagaan pengelola)?		sebagian lagi pemanfaatannya belum efektif (c) Kondisi RTH sebagian terawat, namun sebagian lagi cenderung kurang terawat atau terjaga	kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Seluruh infrastruktur pendukung inovasi di setiap kabupaten/kota berfungsi optimal, dimanfaatkan secara efektif, dan dikelola secara berkelanjutan. (c) RTH di setiap kabupaten/kota terawat dengan baik dan dikembangkan menjadi RPK yang dilengkapi fasilitas digital, ruang pertemuan, serta kelembagaan pengelola.	(c) Sebagian RTH belum terawat dan dikelola dengan baik, sehingga belum optimal dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai RPK yang mendukung aktivitas kreatif dan kolaboratif.
			Dinas Koperasi dan UKM	(a) Sudah terbentuk Inkubator bisnis di setiap kabupaten.kota melalui Dinas Koperasi & UKM. (b) Tetapi karena keterbatasan SDM maka lembaga tsb sebagian besar tidak berjalan. (c) -	(a) Setiap Kabupaten memiliki infrastruktur berikut: pusat inovasi, inkubator, creative center, kawasan sains dan teknologi (KST), ruang publik kreatif (RPK), PLUT, (b) - (c) -	(a) Sudah tersedia inkubator bisnis di setiap kabupaten/kota, namun masih diperlukan penguatan infrastruktur berupa pusat inovasi creative center, kawasan sains dan teknologi (KST), ruang publik kreatif (RPK), dan PLUT, (b) - (c) -

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Dinas Perindustrian	(a) Belum tersedia (b) - (c) -	(a) Adanya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi (b) Berfungsinya infrastruktur pengembangan kewirausahaan (c) Adanya kondisi RTH menjadi RPK (RTH yang dilengkapi WiFi, sarana pertemuan, dan kelembagaan pengelola.	(a) Diperlukan adanya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi (b) Diperlukan infrastruktur yang dapat berfungsi menunjang pengembangan kewirausahaan (c) Diperlukan adanya ruang terbuka publik yang berupa RTH, dilengkapi <i>Wifi</i> , sarana pertemuan dan kelembagaan pengelola
			Bappeda	(a) Tidak tersedia (b) Tidak tersedia (c) Tidak tersedia	(a) Tersedianya infrastruktur pendukung inovasi (pusat inovasi, inkubator, creative center, KST, RPK, PLUT, dan sejenisnya) di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Infrastruktur pendukung inovasi di setiap kabupaten/kota berfungsi dan dimanfaatkan secara optimal untuk	(a) Saat ini belum tersedia infrastruktur pendukung inovasi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Infrastruktur pendukung inovasi belum tersedia, sehingga belum terdapat fungsi dan pemanfaatan yang mendukung riset dan inovasi daerah. (c) Belum tersedia RTH yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan menjadi RPK, sehingga belum mendukung penyediaan ruang publik kreatif di kabupaten/kota. -

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					mendukung aktivitas riset, inovasi, dan kewirausahaan. (c) Tersedianya RTH yang memadai, terkelola dengan baik, dan dikembangkan menjadi RPK yang dilengkapi fasilitas digital, ruang pertemuan, serta kelembagaan pengelola di setiap kabupaten/kota.	
4.	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	(a) Apakah tersedia skema anggaran khusus untuk penumbuh kembangan kewirausahaan ?	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(a) Tidak ada (b) Tidak ada	(a) Tidak ada (b) Tidak ada	
			Bappeda	(a) Tidak tersedia (b) Tidak ada	(a) Tidak ada (b) Tidak ada	
		(b) Apakah ada upaya mencari sumber-sumber pendanaan non APBD propinsi Sumsel (dana CSR, APBD provinsi, APBN, sumber lain) untuk mendukung Pengembangan kewirausahaan ?	Dinas Koperasi dan UKM	(a) Ada tapi belum maksimal (b) Ada dengan pihak terkait seperti lembaga keuangan non perbankan dan perbankan, kampus dan lembaga pelatihan kerja	(a) Adanya anggaran edupreneur bagi masyarakat, anak sekolah, mahasiswa, dan calon entrepreneur melalui program sultan muda (b) Adanya kerjasama atau MOU jangka panjang dengan program yang jelas	(a) Diperlukan anggaran edupreneur bagi masyarakat, anak sekolah, mahasiswa, dan calon entrepreneur melalui program sultan muda (b) Sudah ada sumber pendanaan lain dari lembaga keuangan non perbankan dan perbankan, namun masih perlu ditingkatkan melalui kolaborasi dengan beberapa stakeholder dan adanya

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						kerjasama MoU jangka panjang dengan program yang jelas
			Dinas Perindustrian	(a) Tersedia (b) APBN	(a) Tersedia skema anggaran khusus untuk penumbuh kembangan kewirausahaan (b) Adanya upaya untuk mencari sumber pendanaan non APBD	(a) Sudah ada skema anggaran namun masih diperlukan skema anggaran khusus yang dapat dimaksimalkan untuk pengembangan kewirausahaan (b) Diperlukan upaya untuk mencari sumber pendanaan non APBN karena saat ini hanya bergantung pada APBN
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(a) Lebih kepada kerjasama/pembinaan UMKM melalui sistem OSS RBA (b) Sebagian kecil melalui sub kegiatan kewirausahaan	(a) Peraturan yang mengatur atau SOP skema pendanaan kewirausahaan (b) Jumlah UMKM yang bermitra dengan BUMN/BUMD	(a) Diperlukan adanya peraturan khusus atau SOP yang mengatur skema pendanaan kewirausahaan (b) Sudah ada umber pendanaan non APBN, namun hanya sebatas melalui sub kegiatan kewirausahaan sehingga diperlukan mitra UMKM yang berasal dari BUMN/BUMD
			Balitbangda	(a) Belum tersedia anggaran khusus untuk pengembangan kewirausahaan (b) Ada, melalui program CSR baik dari perusahaan BUMN, BUMD, maupun swasta	(a) Tersedianya skema anggaran khusus yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung penumbuhkembangan kewirausahaan di	(a) Saat ini belum tersedia anggaran khusus untuk pengembangan kewirausahaan, sehingga dukungan pembiayaan masih belum terencana secara optimal.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Provinsi Sumatera Selatan. (b) Terbangunnya mekanisme pendanaan non-APBD yang terkoordinasi dan berkelanjutan (CSR, APBN, dan sumber lain) untuk mendukung pengembangan kewirausahaan.	(b) Upaya pendanaan non-APBD sudah ada melalui program CSR, namun belum terintegrasi dalam skema pendanaan yang terencana dan berkelanjutan.
			Biro Perekonomian	(a) Tidak tersedia anggaran khusus untuk bidang kewirausahaan (b) Melakukan pembinaan terhadap BUMD untuk menyalurkan sebagian dana CSR kepada UMKM	(a) Tersedianya skema anggaran khusus yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung penumbuhkembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan. (b) Terbangunnya mekanisme pendanaan non-APBD yang terkoordinasi dan beragam (CSR, APBN, dan sumber lain) untuk mendukung pengembangan kewirausahaan.	(a) Saat ini tidak tersedia anggaran khusus untuk bidang kewirausahaan, sehingga dukungan pembiayaan masih bersifat terbatas dan belum terencana secara khusus. (b) Upaya pendanaan non-APBD sudah dilakukan melalui pembinaan BUMD untuk penyaluran dana CSR, namun belum terintegrasi dalam skema pendanaan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk pengembangan kewirausahaan.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah saat ini ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel ?	Dinas Koperasi dan UKM	Ada tapi belum maksimal. Beberapa kegiatan inventarisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (merk, hak cipta, paten, Kekayaan Intelektual Komunal/ KIK, indikasi geografis, dsb.) sedang dan rutin dilakukan di Sumatera Selatan, khususnya oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan bersama perangkat daerah dan mitra (Dekranasda, Dinas Koperasi/UKM, perguruan tinggi, dsb.)	Sistem Single Window Pendataan UMKM Provinsi	Sudah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual, namun pemanfaatannya belum maksimal sehingga diperlukan ketersediaan sistem single window pendataan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan
			Dinas Perindustrian	Sudah pernah dilakukan fasilitasi terkait pendaftaran merk dagang tahun 2019. Untuk saat ini hanya pendampingan untuk NIB, PIRT.	Adanya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual	Sudah dilakukannya inventarisasi data kekayaan intelektual, namun hanya melalui pendampingan NIB dan PIRT sehingga perlu diperkuatnya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual yang lebih berkelanjutan
			Balitbangda	Sudah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual	Tersedianya basis data kekayaan intelektual yang terintegrasi, mutakhir, dan dimanfaatkan secara aktif untuk mendukung pengembangan	Kegiatan inventarisasi kekayaan intelektual sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengembangan kewirausahaan.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan.	
			Bappeda	Tidak ada	Adanya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan di Propinsi Sumsel	Diperlukan adanya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual dalam rangka pengembangan kewirausahaan
			Dinas Perdagangan	Sudah terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan	Tersedia Kebijakan terpadu lintas sektor yang mengatur pengembangan kewirausahaan produk Dalam Negeri dan Produk Luar Negeri.	Sudah ada program atau kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual, namun masih diperlukan adanya kebijakan Adanya kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual
II	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi					
6.	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	(a) Bagaimana kondisi/ kesiapan Balitbangda atau OPD lain di Sumsel dalam mendukung Pengembangan kewirausahaan (anggaran, SDM, kemampuan melakukan koordinasi dengan pihak lain yang	Balitbangda	(a) Balitbangda siap mendukung penuh pengembangan kewirausahaan melalui kebijakan yang berlaku atau berdasarkan kajian perencanaan (b) Balitbangda bekerjasama dengan pihak akademisi perguruan tinggi dan BRIN dalam rangka pengembangan kewirausahaan	(a) Balitbangda dan OPD terkait memiliki dukungan anggaran, SDM, dan kapasitas koordinasi yang kuat dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan kewirausahaan. (b) Terbangunnya kerja sama yang terstruktur, berkelanjutan, dan	(a) Balitbangda sudah siap mendukung melalui kebijakan dan kajian perencanaan, namun masih diperlukan penguatan berkelanjutan pada aspek anggaran, SDM, dan mekanisme koordinasi lintas pihak. (b) Kerja sama dengan perguruan tinggi dan BRIN sudah berjalan, namun belum sepenuhnya terstruktur dan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		terkait dengan riset dan inovasi)? (b) Apakah Balitbangda atau OPD lain melakukan kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi, khususnya dalam rangka pengembangan kewirausahaan untuk menghasilkan 100.000 pengusaha muda ?			berorientasi hasil antara Balitbangda/OPD dengan BRIN, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan kewirausahaan dan penciptaan pengusaha muda.	berorientasi pada target hasil yang terukur dalam pengembangan kewirausahaan.
			Bappeda	(a) Bappeda mendukung pengembangan kewirausahaan melalui perencanaan yang tertuang didalam dokumen perencanaan daerah (b) Bappeda bekerjasama dengan akademisi melalui FGD, penyusunan kajian, buku Saku Investasi, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	(a) Target yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat tercapai (b) Dengan adanya 100.000 sultan muda dapat meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi angka pengangguran	(a) Bappeda mendukung pengembangan kewirausahaan sesuai yang tertuang di dalam dokumen perencanaan daerah dan diharapkan target yang dituju dapat tercapai (b) Sudah ada kerjasama dengan akademisi melalui FGD, penyusunan kajian dan lainnyya dan diharapkan hadirnya 100.000 sultan muda dapat meningkatkan ekonomi lokal
			Dinas Koperasi dan UKM	(a) Dinas Koperasi & UKM mendukung pengembangan kewirausahaan terkait dengan riset dan inovasi	(a) Hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai teknologi yg membantu pngenmbangan kewirausaan	(a) Dinas Koperasi dan UKM mendukung pengembangan kewirausahaan melalui mitra riset dan diharapkan hasil riset inovasi dapat dimanfaatkan untuk

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(b) Literasi dan edukasi untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur muda	(b) Menjadi program wajib	membantu pengembangan kewirausahaan (b) Sudah ada kerjasama melalui kegiatan pengembangan entrepreneur dan diharapkan program tersebut menjadi wajib sehingga dapat berkelanjutan
			Dinas Perindustrian	(a) - (b) Ya	(a) - (b) Adanya kerjasama yang berkelanjutan	(a) - (b) Sudah adanya kerjasama, namun bersifat sementara sehingga diperlukan kerjasama yang berkelanjutan untuk mengembangkan kewirausahaan
			Dinas Pendidikan	(a) Dinas Pendidikan melalui Pendidikan Vokasi melaksanakan kegiatan kewirausahaan bagi siswa SMK (b) Dinas Pendidikan melalui pendidikan vokasi memiliki bursa kerja khusus (BKK) di 17 Kabupaten/Kota (c) Dinas Pendidikan melalui pendidikan vokasi memiliki kerjasama dengan industri	(a) Semakin sering melaksanakan kegiatan kewirausahaan (b) Menambah sekolah sekolah SMK untuk menjalankan bursa kerja khusus (c) Menambah -	(a) Sudah ada kegiatan kewirausahaan melalui pendidikan vokasi, namun masih diperlukan peningkatan frekuensi dan keberlanjutan kegiatan agar dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan semakin optimal. (b) Sudah ada kerja sama pendidikan vokasi dengan industri serta keberadaan BKK di 17 kabupaten/kota, namun masih diperlukan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						perluasan cakupan dengan menambah sekolah-sekolah SMK yang menjalankan BKK untuk memperkuat pengembangan kewirausahaan menuju 100.000 pengusaha muda.
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(a) Disnakertrans memiliki UPTD BLKPPKT yang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi (b) Disnakertrans belum melakukan kerjasama dengan BRIN/Swasta /PT untuk pengembangan kewirausahaan	(a) Pada Renstra Disnakertrans di tahun 2029 ditargetkan sudah mampu melakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 80 Orang (b) Diharapkan tahun 2029 Disnakertrans dapat melakukan kerjasama dengan BRIN/Swasta/PT	(a) Sudah ada pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh UPTD BLKPPKT, namun masih dibutuhkan peningkatan kapasitas pelatihan agar dapat mencapai target Renstra tahun 2029, yaitu mampu melatih 80 orang dalam satu periode. (b) Diperlukan langkah untuk mendorong Disnakertrans mulai melakukan kerja sama dengan BRIN, swasta, dan perguruan tinggi guna memperkuat dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan dan pencapaian target 100.000 pengusaha muda.
7.	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di	Apakah di Propinsi Sumsel saat ini tersedia sarana pendukung (misalnya	Balitbangda	Belum tersedianya sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan	Tersedianya sarana pendukung kolaborasi riset dan inovasi yang terintegrasi (website,	Saat ini belum tersedia sarana pendukung kolaborasi riset dan inovasi, sehingga koordinasi dan sinergi antar pemangku

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda ?		kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	media koordinasi, dan platform digital) untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda.	kepentingan belum berjalan optimal.
			Bappeda	Belum ada	Ada	Diperlukan ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan muda
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Ada	Diperlukan ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan muda
			Dinas Perindustrian	Belum	Tersedianya sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	Diperlukan ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan muda
		Apakah di Propinsi Sumsel saat ini tersedia sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam	Balitbangda	Sudah ada sarana pendukung (misalnya website, media koordinasi, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka Bantuan Operasional Desa/Kelurahan, namun	Tersedianya sarana kolaborasi riset dan inovasi yang berfungsi optimal dan terkelola dengan baik untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	Sarana pendukung sudah tersedia, namun pelaksanaannya belum optimal, sehingga pemanfaatannya dalam mendukung kolaborasi riset dan inovasi masih terbatas.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		rangka Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?		pelaksanaannya belum optimal		
			Bappeda	Belum ada	Ada	Diperlukan ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka bantuan operasional Desa/Kelurahan
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tersedia, tetapi Aplikasi masih dalam on proses	Aplikasi alur BKBK dari awal pengajuan Kab/Kota sampai dengan proses pencairan.	Sudah ada sarana pendukung melalui aplikasi, namun masih dalam proses dan diharapkan aplikasi dapat dimaksimalkan untuk mempermudah proses pencairan
III Kemitraan Riset dan Inovasi						
8.	Peningkatan difusi inovasi	Apakah Propinsi Sumsel melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/ penumbuhan kewirausahaan di kabupaten/kota?	Balitbangda	Sudah ada, namun transfer teknologi khusus dalam pengembangan kewirausahaan masih terbatas	Terlaksananya transfer teknologi yang terstruktur, merata, dan berkelanjutan kepada kabupaten/kota untuk mendukung pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan.	Transfer teknologi sudah dilakukan, namun masih terbatas dan belum merata, sehingga dampaknya terhadap pengembangan kewirausahaan di kabupaten/kota belum optimal.
			Bappeda	Sudah dilakukan oleh OPD terkait	Hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai teknologi yg membantu pengembangan kewirausahaan di Kabupaten/Kota	Sudah ada transfer teknologi yang dilakukan oleh OPD terkait, namun masih diperlukan optimalisasi agar hasil riset dan inovasi dapat benar-benar dimanfaatkan sebagai teknologi pendukung pengembangan kewirausahaan di Kabupaten/Kota.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Dinas Koperasi dan UKM	Iya	Hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai teknologi yg membantu pngembangan kewirausahaan	Sudah ada upaya transfer teknologi, namun masih dibutuhkan penguatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi sehingga teknologi tersebut dapat secara nyata membantu pengembangan kewirausahaan di daerah.
			Dinas Perindustrian	Belum	Adanya transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/ penumbuhan kewirausahaan di kabupaten/kota	Diperlukan implementasi transfer teknologi secara langsung untuk mendukung pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan di Kabupaten/Kota.
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disnakertrans belum melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan/penumbuhan kewirausahaan di Kab/Kota	Diharapkan Disnakertrans dapat melakukan transfer teknologi khususnya dalam Pengembangan /penumbuhan kewirausahaan di Kab/Kota	Diperlukan langkah agar Disnakertrans mulai melakukan transfer teknologi untuk pengembangan/penumbuhan kewirausahaan, termasuk melalui Program Penempatan Tenaga Kerja dan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.
9.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Risetdan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Apakah Propinsi Sumsel memiliki kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota?	Balitbangda	Sudah pernah dilakukan kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota, namun dampaknya belum signifikan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/inovasi yang terstruktur, merata, dan berdampak nyata bagi pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	Kegiatan sosialisasi dan diseminasi sudah pernah dilakukan, namun dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja pelaku usaha.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bappeda	Tidak ada	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/inovasi yang terencana, rutin, dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	Saat ini tidak tersedia kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/inovasi bagi pelaku usaha di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Tersedianya program sosialisasi dan diseminasi hasil riset/inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan bagi pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota.	Kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/inovasi belum tersedia, sehingga pemanfaatan hasil riset oleh pelaku usaha belum berjalan.
			Dinas Perindustrian	Belum	Adanya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota	Diperlukan diadakannya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/inovasi bagi pelaku usaha di setiap kabupaten/kota
		Apakah Propinsi Sumsel memiliki kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di setiap kabupaten/kota?	Balitbangda	Sudah pernah dilakukan kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tentang Bantuan Operasional, namun masih terbatas dan belum merata	Tersedianya sosialisasi dan diseminasi hasil riset Bantuan Operasional Desa/Kelurahan yang merata dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota.	Sosialisasi dan diseminasi sudah dilakukan, namun masih terbatas dan belum merata di seluruh kabupaten/kota.
			Bappeda	Tidak ada	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset terkait Bantuan	Kegiatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset belum tersedia, sehingga diperlukan pelaksanaan yang terencana,

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Operasional Desa/Kelurahan yang terencana, rutin, dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	rutin, dan menjangkau seluruh kabupaten/kota belum dapat terwujud.
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	
IV Budaya Riset dan Inovasi						
10.	Promosi dan kampanye inovasi	Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang pogram 100.000 Sultan Muda ?	Balitbangda	Sudah pernah diselenggarakannya promosi dan kampanye melalui sosialisasi 12 program strategis kepala daerah, namun belum ada promosi secara khusus tentang 100.000 sultan muda sumsel	Terselenggaranya promosi dan kampanye yang fokus, konsisten, dan berskala luas khusus untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda di Provinsi Sumatera Selatan.	Promosi dan kampanye sudah dilakukan secara umum, namun belum ada promosi khusus yang terfokus pada program 100.000 Sultan Muda.
		Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan?	Dinas Koperasi dan UKM	Sudah ada	Menjadi program wajib	Sudah ada kegiatan promosi dan kampanye kewirausahaan, namun masih diperlukan penguatan agar kegiatan tersebut ditetapkan sebagai program wajib sehingga pelaksanaannya lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan.
			Dinas Pemuda dan Olahraga	Melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda di Kabupaten/Kota	Kegiatan dapat terus dilaksanakan dengan Peningkatan kualitas pelatihan. Peserta pelatihan diharapkan	Sudah ada pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan, namun masih dibutuhkan peningkatan kualitas pelatihan serta pendampingan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					mampu menerapkan hasil pelatihan sehingga dapat meningkatkan produksi dan penjualan	agar peserta mampu menerapkan hasil pelatihan secara nyata untuk meningkatkan produksi dan penjualan.
			Balitbangda	Sudah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan	Terselenggaranya promosi dan kampanye UKM wirausaha muda yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan akses pasar di Provinsi Sumatera Selatan.	Promosi dan kampanye sudah diselenggarakan, namun belum sepenuhnya dilakukan secara berkelanjutan dan terukur dampaknya terhadap penguatan UKM wirausaha muda.
		Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan promosi dan kampanye tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	Balitbangda	Belum pernah diselenggarakannya promosi dan kampanye tentang Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	Terselenggaranya promosi dan kampanye yang terencana, rutin, dan menjangkau seluruh kabupaten/kota mengenai Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan.	Promosi dan kampanye Bantuan Operasional Desa/Kelurahan belum pernah diselenggarakan, sehingga diperlukan pelaksanaan promosi dan kampanye yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung pemahaman dan implementasi Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
11.	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah di Propinsi Sumsel pernah diselenggarakan lomba inovasi? Apakah lomba inovasi tersebut dapat diarahkan untuk	Balitbangda	Belum pernah menyelenggarakan secara khusus terkait lomba inovasi dalam mendukung 100.000 sultan muda sumsel	Terselenggaranya lomba inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan serta diarahkan secara khusus untuk mendukung pencapaian program	Belum pernah diselenggarakan lomba inovasi yang secara khusus diarahkan untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		mendukung Pengembangan 100.000 Sultan Muda ?	Dinas Koperasi dan UKM	Ada	100.000 Sultan Muda di Provinsi Sumatera Selatan. Menjadi Agenda Tahunan dengan Dukungan Anggaran dan Kolaborasi bberpa pihak	Lomba inovasi belum diselenggarakan secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai agenda tahunan, sehingga diperlukan penguatan perencanaan, dukungan anggaran, serta kolaborasi lintas pihak untuk mendukung pengembangan 100.000 Sultan Muda.
		Apakah ada penyelenggaraan innovation award tentang inovasi pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	Balitbangda	Belum pernah diselenggarakannya innovation award tentang inovasi pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	Terselenggaranya innovation award untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan.	Belum pernah diselenggarakan innovation award terkait inovasi pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
12.	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha baru di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda ?	Balitbangda	Sudah ada, namun hanya sebatas penumbuhan wirausaha baru	Tersedianya program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset dan inovasi di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda.	Program sudah ada, namun masih terbatas pada penumbuhan wirausaha baru dan belum berbasis riset serta inovasi secara optimal.
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Tersedianya program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset dan inovasi di setiap	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset belum tersedia, sehingga diperlukan inisiasi dan

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda.	pelaksanaan program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda.
			Dinas Perindustrian	Ada kegiatan terkait penumbuhan wirausaha baru	adanya program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha baru di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda	Belum dilakukan inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait pengembangan kewirausahaan pemuda.
13.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah di Propinsi Sumsel ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan kewirausahaan pemuda ?	Balitbangda	Belum dilakukannya kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan kewirausahaan pemuda	Tersedianya inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat serta kearifan lokal yang terstruktur untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal belum dilakukan, sehingga diperlukan inventarisasi dan kodefikasi yang terstruktur untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tidak ada	Program pengembangan kebudayaan dalam konteks budaya pariwisata dan kearifan lokal adalah konsep pelestarian dan pengembangan budaya yang ber akar pada adat tradisi	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal belum tersedia, sehingga diperlukan penguatan inventarisasi dan kodefikasi kearifan lokal agar program pengembangan kebudayaan dapat mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Tersedianya kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal yang terstruktur dan terdokumentasi untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Provinsi Sumatera Selatan.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal belum tersedia, sehingga diperlukan penyusunan kodefikasi yang terstruktur dan terdokumentasi untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
		Inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	Balitbangda	Belum ada Inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	Tersedianya inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	Belum tersedia inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tidak ada	Tersedianya inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terstruktur dan terdokumentasi untuk mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	Inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal belum tersedia, sehingga diperlukan penyusunan inventarisasi dan kodefikasi yang terstruktur untuk mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
V	Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah					
14.	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan	Apakah di Propinsi Sumsel ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda?	Balitbangda	Belum ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	Tersedianya prakarsa riset dan inovasi yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan	Saat ini belum terdapat prakarsa riset dan inovasi yang secara khusus diarahkan untuk mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah untuk promosi produk unggulan daerah				Muda di Provinsi Sumatera Selatan.	
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Adanya prakarsa riset dan inovasi yang terencana dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian program 100.000 Sultan Muda di Provinsi Sumatera Selatan.	Prakarsa riset dan inovasi belum tersedia, sehingga diperlukan inisiasi dan pelaksanaan riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda.
			Dinas Perindustrian	belum mulai	Adanya prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pencapaian 100.000 Sultan Muda	Prakarsa riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda belum dimulai, sehingga diperlukan inisiasi dan pelaksanaan prakarsa riset dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
		Apakah ada prakarsa riset dan inovasi untuk pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan ?	Balitbangda	Belum ada prakarsa riset dan inovasi untuk pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan	Tersedianya prakarsa riset dan inovasi yang terstruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	Belum terdapat prakarsa riset dan inovasi yang diarahkan untuk pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
			Bappeda	Belum ada	Adanya prakarsa riset dan inovasi yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	Prakarsa riset dan inovasi belum tersedia, sehingga diperlukan inisiasi dan pelaksanaan riset dan inovasi untuk mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah setiap kabupaten/kota di Propinsi Sumsel dilakukan pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM berbasis kelompok usaha untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda ?	Balitbangda	Belum ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM berbasis kelompok usaha yang secara khusus untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda	Terbentuk dan berkembangnya klaster inovasi atau sentra UKM berbasis kelompok usaha di setiap kabupaten/kota untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda.	Belum terdapat pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM yang secara khusus diarahkan untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda.
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Terbentuk dan berkembangnya klaster inovasi atau sentra UKM berbasis kelompok usaha di setiap kabupaten/kota untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda.	Pembentukan dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM belum tersedia, sehingga diperlukan inisiasi dan pengembangan klaster inovasi atau sentra UKM untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda di setiap kabupaten/kota.
16.	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Apakah program Pengembangan 100.000 Sultan Muda telah dikaitkan dengan kebijakan di masing-masing kabupaten/kota (koherensi kebijakan)?	Balitbangda	Iya, program pengembangan 100.000 Sultan muda merupakan salah satu dari 12 program strategis Gubernur Sumatera Selatan	Program 100.000 Sultan Muda terintegrasi dan selaras dengan kebijakan serta program pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	Program 100.000 Sultan Muda telah ditetapkan sebagai program strategis provinsi, namun belum sepenuhnya diarusutamakan dan dioperasionalkan dalam kebijakan kabupaten/kota.
			Bappeda	12 Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan termasuk program 100.000 Sultan Muda sudah disosialisasikan ke 17 Kabupaten Kota	Program pengembangan 100.000 Sultan Muda dapat tercapai melalui dukungan dari 17 kabupaten kota	Program 100.000 Sultan Muda telah disosialisasikan ke 17 kabupaten/kota, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan daerah, sehingga diperlukan penguatan dukungan kebijakan dari seluruh

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Program Pengembangan 100.000 Sultan Muda terintegrasi dan selaras dengan kebijakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.	kabupaten/kota agar pencapaian program 100.000 Sultan Muda dapat terwujud. Koherensi kebijakan belum tersedia, sehingga diperlukan penyalarsan dan integrasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan program 100.000 Sultan Muda.
		Apakah ada kohensi/sinkronisasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan?	Bappeda	Belum ada	Terwujudnya sinkronisasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.	Sinkronisasi kebijakan belum tersedia, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan penyalarsan kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Bantuan Operasional Desa/Kelurahan.
VI Penyalarsan dengan perkembangan global						
17.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah di Propinsi Sumsel ada program/ kegiatan fasilitasi kepada pelaku usaha muda dalam memenuhi Standarisasi produk masing-masing (seperti: perijinan (BPOM, PIRT, dsb), Kemasan, Label Halal, Komposisi/ingredient),	Dinas Perdagangan	Terdapat Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan terkait Pengawasan Perijinan, Kemasan, Label, dsb	Tersedia kebijakan terpadu lintas sektor yang memenuhi Standardisasi produk.	Diperlukan kebijakan atau program terpadu lintas sektor yang mampu menyatukan berbagai program pengawasan perizinan, kemasan, dan label agar standardisasi produk dapat dipenuhi secara menyeluruh.
			Dinas Koperasi dan UKM	Sudah ada	Adanya ruang khusus dan SDM yang berperan aktif dan bertanggung jawab melalui pola anggaran	Sudah ada program yang memfasilitasi untuk standarisasi produk, namun masih dibutuhkan ruang khusus, SDM yang berperan aktif, serta

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Ukuran Berat Bersih, dsb) ?dalam mendukung tercapainya 100.000 Sultan Muda				dukungan pola anggaran yang terstruktur untuk memastikan fasilitasi standarisasi produk berjalan optimal.
			Dinas Perindustrian	Iya, Sudah ada	Ada program/ kegiatan fasilitasi kepada pelaku usaha muda dalam memenuhi Standarisasi produk masing-masing (seperti: perijinan (BPOM, PIRT, dsb), Kemasan, Label Halal, Komposisi/ingredient), Ukuran Berat Bersih, dsb) dalam mendukung tercapainya 100.000 Sultan Muda	Sudah ada program yang memfasilitasi untuk standarisasi produk, namun masih diperlukan peningkatan program fasilitasi yang secara eksplisit diarahkan untuk mendukung pencapaian target 100.000 Sultan Muda.
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terdapat program pelayanan penanaman modal untuk memfasilitasi perizinan UMKM untuk penerbitan NIB, dan kegiatan fasilitasi para UMKM mengenai sertifikasi halal,haki,dsb.	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan berdasarkan kewenangan Prov/kab/kota	Sudah ada program yang memfasilitasi untuk standarisasi produk, namun masih diperlukan peningkatan jumlah penerbitan izin dan non-izin sesuai kewenangan Provinsi/Kabupaten /Kota sebagai tindak lanjut dari layanan fasilitasi perizinan dan sertifikasi yang telah tersedia.
18.	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional yang dilakukan Propinsi Sumsel untuk Pengembangan	Balitbangda	Belum ada kerjasama internasional yang dilakukan Propinsi Sumsel untuk Pengembangan kewirausahaan pemuda	Terbangunnya kerja sama internasional yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung	Belum terdapat kerja sama internasional yang diarahkan untuk pengembangan kewirausahaan pemuda dalam

TEMA: 100.000 Sultan Muda Sumsel			Responden/OPD	Kondisi Saat Ini (2025)	Kondisi Yang Diharapkan (2029)	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kewirausahaan pemuda dalam mencapai 100.000 Sultan Muda?		dalam mencapai 100.000 Sultan Muda	pengembangan kewirausahaan pemuda dalam pencapaian 100.000 Sultan Muda.	mendukung pencapaian 100.000 Sultan Muda.
			Dinas Koperasi dan UKM	Belum ada	Terbangunnya kerja sama internasional yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda dalam pencapaian program 100.000 Sultan Muda.	Kerja sama internasional belum tersedia, sehingga diperlukan inisiasi dan pengembangan kerja sama internasional untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda dalam mencapai 100.000 Sultan Muda.

BAB V

STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

5.1 Strategi Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence based policy*)

Pada bagian ini diuraikan strategi untuk meningkatkan kemampuan Provinsi Sumatera Selatan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Strategi tersebut diarahkan pada optimalisasi berbagai faktor pendukung, meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia IPTEK daerah, penyediaan fasilitas pendukung analisis kebijakan dan inovasi, kecukupan dan keberlanjutan anggaran riset, keberlanjutan program riset dan inovasi, penguatan kelembagaan IPTEK, serta perluasan jejaring riset dan inovasi dengan mitra strategis. Faktor-faktor ini menjadi fondasi utama dalam memastikan proses perumusan kebijakan daerah berjalan secara terukur, sistematis, dan berbasis data.

Perumusan strategi ini juga mempertimbangkan capaian kemampuan daerah dalam lima tahun terakhir, mencakup jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan dan dimanfaatkan, pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, inovasi daerah lainnya, serta dinamika Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Melalui penguatan dan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek-aspek tersebut, Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas analisis kebijakan dan mendorong inovasi yang lebih adaptif, efektif, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian pembangunan daerah.

Tabel 5. 1 Strategi Daerah dan Arah Kebijakan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1.	Penguatan kapasitas SDM IPTEK dan analisis kebijakan daerah	Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM IPTEK, peneliti, analisis kebijakan, dan perencana

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
		melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, pengembangan talenta digital, serta kemitraan dengan perguruan tinggi guna mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti secara konsisten.
2.	Penguatan kelembagaan IPTEK sebagai penggerak <i>evidence based policy</i>	Memperkuat peran kelembagaan IPTEK, khususnya Balitbangda, sebagai koordinator riset dan inovasi daerah yang terintegrasi dengan proses perencanaan dan perumusan kebijakan, sehingga hasil kajian riset secara sistematis dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan daerah.
3.	Optimalisasi program riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan	Menyelenggarakan program riset dan inovasi daerah yang terstruktur, lintas sektor, dan berkelanjutan dengan orientasi pada kebutuhan strategis daerah, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang relevan dan berdampak nyata.
4.	Penguatan pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan daerah	Mendorong mekanisme formal yang mewajibkan penggunaan hasil kajian dan naskah akademik sebagai dasar penyusunan kebijakan dan produk hukum

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
		daerah, guna meningkatkan konsistensi penerapan <i>evidence based policy</i> dalam proses pengambilan keputusan.
5.	Pengembangan jejaring riset dan inovasi berbasis kolaborasi Pentahelix	Mengoptimalkan kerja sama riset dan inovasi dengan akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk memperkuat kualitas kajian, memperluas perspektif kebijakan, serta meningkatkan relevansi rekomendasi kebijakan berbasis bukti terhadap kebutuhan daerah.
6.	Penyediaan dan penguatan fasilitas pendukung riset dan analisis kebijakan	Menyediakan dan mengoptimalkan fasilitas riset, data, dan analisis kebijakan yang terintegrasi dengan kelembagaan IPTEK, sehingga proses penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
7.	Penguatan dukungan anggaran riset dan kebijakan berbasis bukti	Menjamin ketersediaan anggaran riset dan inovasi daerah yang memadai, berkelanjutan, dan terencana melalui APBD dan sumber pendanaan lain yang sah, guna mendukung keberlangsungan riset serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti secara optimal.

5.2 Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Melalui Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) dan/atau Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah

Mendorong pengembangan produk unggulan daerah (PUD) melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Setiap pihak berperan sesuai kapasitasnya untuk bersama-sama mengembangkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar. Komoditas yang telah ditetapkan sebagai PUD meliputi Padi, Jagung, Cabai, Bawang Merah, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa, Sapi, Ikan (Ikan Patin, Lele, Nila, Mas, Gurame, dan Gabus), Udang, Wisata Alam, serta Kerajinan dan Produk Kreatif yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing. Strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pengembangan ini telah disusun selaras dengan komponen ekosistem riset dan inovasi, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	Mendorong pengembangan industri hilir, memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal, serta memfasilitasi inovasi dan diversifikasi produk untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional dan global.
2.	Memperkuat kelembagaan dan ekosistem inovasi daerah	Membangun jejaring riset dan inovasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas serta memperkuat

		sistem pendukung inovasi dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan.
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk produk unggulan	Mendorong penerapan prinsip ramah lingkungan dalam proses produksi, memperkuat regulasi pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik ekonomi hijau.
4.	Meningkatkan akses pasar dan promosi produk unggulan daerah	Mengembangkan platform pemasaran digital, memperluas jaringan distribusi, memperkuat branding daerah, serta mengikutsertakan produk unggulan dalam pameran dan promosi tingkat nasional maupun internasional.
5.	Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kewirausahaan daerah	Melaksanakan pelatihan teknis dan manajerial bagi pelaku UMKM, mendorong regenerasi pelaku usaha muda, serta membangun pusat pelatihan terpadu untuk pengembangan produk unggulan daerah.

Kemudian Adapun strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan isu yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang. Pendekatan ini mengacu pada kerangka pembangunan ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi. Salah satu persoalan utama yang dihadapi Provinsi Sumatera Selatan hingga dua dekade ke depan adalah masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, yang berdampak

pada lambatnya percepatan pembangunan daerah. Melalui upaya sistematis dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi, diharapkan isu-isu prioritas tersebut dapat ditangani secara lebih efektif. Strategi dan arah kebijakan yang disusun telah diselaraskan dengan unsur-unsur utama dalam ekosistem riset dan inovasi, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.3

Tabel 5. 3 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting	Memperluas program perlindungan sosial, meningkatkan akses pangan bergizi, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga miskin berbasis komunitas dan kewirausahaan lokal.
2.	Mengoptimalkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan hilirisasi komoditas unggulan	Mendorong penerapan pertanian modern berbasis teknologi, memperkuat rantai pasok dan industri pengolahan hasil pertanian, serta memperluas kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah.
3.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur publik	Meningkatkan akses dan kualitas sekolah serta fasilitas kesehatan di seluruh wilayah, memperkuat kapasitas tenaga pendidik dan tenaga medis, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi.

4.	Memperkuat ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana daerah	Meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan, memperkuat tata kelola sumber daya alam berbasis mitigasi risiko, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan pengelolaan lingkungan.
5.	Meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan investasi dan transformasi ekonomi berkelanjutan	Menyederhanakan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur ekonomi dan kawasan industri, mendorong pengembangan energi terbarukan, serta memfasilitasi pelaku usaha lokal agar siap menghadapi transisi ekonomi hijau.
6.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal untuk mendukung pembangunan daerah	Mendorong reformasi birokrasi berbasis digital, memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan ekonomi dan pelayanan publik.

BAB VI

PETA JALAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pada bab ini menguraikan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka mencapai kondisi yang diharapkan dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah sebagai bagian dari upaya mendukung tema prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu menciptakan 100.000 Sultan Muda Sumsel. Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai dokumen strategis yang merupakan dokumen turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memberikan arah, panduan, serta landasan terstruktur bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi. Peta jalan ini berfungsi sebagai kerangka kerja integratif yang menyatukan berbagai komponen penting, mulai dari kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, pendanaan, jejaring kemitraan, hingga regulasi, agar bergerak secara terpadu menuju pembangunan daerah yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based development*). Melalui penyusunan peta jalan ini, diharapkan Provinsi Sumatera Selatan mampu membangun ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan, serta relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal, sekaligus selaras dengan dinamika dan perkembangan global.

Secara tematik, peta jalan ini difokuskan pada upaya penguatan kapasitas generasi muda, kewirausahaan, serta inovasi daerah dalam rangka mendukung terwujudnya 100.000 Sultan Muda Sumsel. Peta jalan ini memuat tahapan dan langkah strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun pertama hingga tahun kelima sebagai bagian dari upaya sistematis dalam menumbuhkan wirausaha muda yang inovatif, produktif, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Dalam implementasinya, peta jalan ini disusun dengan mengacu pada kerangka ekosistem riset dan inovasi daerah yang mencakup enam elemen utama, yaitu: (1) kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi daerah, (2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, (3) kemitraan riset dan inovasi, (4) budaya riset dan inovasi, (5) keterpaduan atau koherensi riset dan inovasi di daerah, serta (6) penyelarasan dengan perkembangan global. Keenam elemen tersebut menjadi fondasi utama dalam merancang setiap tahapan pelaksanaan peta jalan agar berjalan secara sinergis, terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, peta jalan ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan strategis dalam bidang riset dan inovasi, tetapi juga menjadi alat pengendali dan pengarah pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, kewirausahaan muda, dan inovasi. Kehadirannya diharapkan mampu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang dalam RIPJ PID berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD, mendukung penciptaan Sultan Muda Sumsel, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat ekonomi lokal, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan secara berkelanjutan. Adapun tujuan utama penyusunan peta jalan (*road map*) 100.000 Sultan Muda Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan arah dan pedoman strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD.
- b) Mendorong percepatan lahirnya pengusaha muda (Sultan Muda) yang inovatif dan berdaya saing, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sebagai basis pengembangan usaha.
- c) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya daerah dalam mendukung riset, inovasi, dan kewirausahaan, melalui penguatan kebijakan, infrastruktur, pendanaan, serta kemitraan multipihak.
- d) Mewujudkan keterpaduan dan koherensi program riset dan inovasi daerah, agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan lintas perangkat daerah berjalan selaras, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
- e) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, melalui pengembangan ekosistem kewirausahaan muda berbasis inovasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 6. 1 Langkah-Langkah Strategis Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Tersedianya hasil Kajian Naskah Akademis/Kebijakan untuk Perda/Pergub dalam rangka mencapai 100.000 Sultan Muda	Pengumpulan data awal dan penyusunan kerangka kajian NA/ kebijakan pendukung regulasi 100.000 Sultan Muda.	- Penyusunan dan pengesahan dokumen kajian di tingkat kabupaten/kota untuk harmonisasi regulasi daerah. - Penyelarasan substansi kajian dengan kebutuhan aktual program.	Pemutakhiran kajian NA/Kebijakan untuk penguatan Pergub dan sinkronisasi antarperangkat daerah.	Penyempurnaan regulasi berbasis hasil monitoring penerapan Pergub 100.000 Sultan Muda di daerah.	Evaluasi implementasi kajian NA di seluruh kabupaten/kota dan penerbitan rekomendasi regulasi lanjutan.
	Tersedianya produk hukum terkait pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan regulasi dan penyusunan dasar produk hukum penetapan terkait program.	Penyusunan produk hukum teknis pendukung layanan pembinaan, sertifikasi, dan kemitraan usaha.	Harmonisasi dan revisi produk hukum penetapan agar sesuai dengan dinamika pengembangan peserta.	Penyusunan produk hukum lanjutan yang mendukung pelembagaan ekosistem 100.000 Sultan Muda.	Evaluasi efektivitas seluruh produk hukum dan penetapan regulasi penyempurnaan jangka panjang.
	Dilaksanakannya sosialisasi Pergub tentang 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan, wilayah sasaran, dan OPD pendukung untuk pelaksanaan sosialisasi.	- Pelaksanaan sosialisasi sesuai target - Pengumpulan umpan balik awal	- Penguatan kualitas materi dan metode sosialisasi - Penyesuaian konten berdasarkan	Perluasan jangkauan sosialisasi ke lebih banyak komunitas dan kelompok pemuda	Evaluasi menyeluruh pelaksanaan sosialisasi selama 5 tahun dan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			untuk peningkatan proses sosialisasi	evaluasi tahun sebelumnya		pencapaian total ±550 dokumen. Penyusunan rekomendasi keberlanjutan dan penyempurnaan mekanisme sosialisasi.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	Identifikasi kebutuhan data, metadata, dan standar interoperabilitas untuk Database 100.000 Sultan Muda.	Penyusunan dokumen statistik sektoral sesuai standar SDI	Penerapan standar data dan interoperabilitas untuk memperkuat integrasi database lintas-OPD.	Optimalisasi pemutakhiran data sektoral berbasis standar SDI	Evaluasi keseluruhan pemenuhan standar data dan penyempurnaan format database 100.000 Sultan Muda.
	Tersedianya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi dalam rangka mencapai 100.00 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan penataan basis data riset dan inovasi yang mendukung 100.000 Sultan Muda.	Penyusunan dokumen fasilitasi/pembinaan penataan basis data	Pelaksanaan pembinaan OPD terkait untuk harmonisasi data riset dan inovasi.	Penguatan mekanisme integrasi dan validasi data riset dan inovasi	Evaluasi pelaksanaan pembinaan dan penyusunan rekomendasi penguatan basis data riset dan inovasi.
	Tersedianya basis data usaha mikro 100.000 Sultan Muda	Identifikasi sumber data, kebutuhan variabel, dan format pendataan usaha mikro calon Sultan Muda.	Penyusunan dokumen awal pendataan usaha mikro sesuai prinsip SDI	Penyelarasan data UMKM lintas kabupaten/kota dan integrasi dengan sistem provinsi.	Optimalisasi pemutakhiran data usaha mikro berbasis SDI	Evaluasi dan finalisasi database usaha mikro 100.000 Sultan Muda untuk digunakan dalam perencanaan lanjutan.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang diberi fasilitas sebagai ruang publik kreatif bagi 100.000 Sultan Muda	Identifikasi lokasi potensial RTH yang dapat dikembangkan sebagai ruang publik kreatif.	• Penataan awal awal RTH prioritas (5 Ha) dengan zonasi ruang publik kreatif. • Penyediaan fasilitas dasar (jalur pedestrian, penerangan, titik kumpul).	Pengembangan fasilitas pendukung aktivitas kreatif (panggung mini, area komunitas, dinding mural, area UMKM).	Pemantapan fungsi RTH sebagai ruang publik kreatif dan integrasi dengan kegiatan komunitas pemuda.	Evaluasi pemanfaatan RTH kreatif dan penyempurnaan sarana sesuai kebutuhan 100.000 Sultan Muda.
	Tersedianya akses internet yang terpasang di ruang publik/RTH	Pemetaan kebutuhan titik wifi dan infrastruktur jaringan di RTH prioritas.	Instalasi jaringan internet dasar dan hotspot publik di RTH tahap pertama.	Perluasan jaringan internet pada RTH tambahan serta peningkatan kapasitas bandwidth.	Optimalisasi layanan internet publik dengan sistem monitoring penggunaan.	Evaluasi kualitas layanan internet dan peningkatan area cakupan untuk keberlanjutan.
	Terbentuknya Inkubator pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi calon wirausaha muda dan pemetaan kebutuhan inkubasi per sektor	Pembentukan inkubator dasar dan onboarding batch pertama 1.000 peserta.	Pengembangan layanan inkubasi (pelatihan bisnis, pendampingan, klinik perizinan, akses pembiayaan).	Penguatan kemitraan dengan industri, UMKM besar, dan perguruan tinggi untuk scale-up peserta inkubasi.	Evaluasi kinerja inkubator dan penyempurnaan model inkubasi untuk keberlanjutan dan dampak ekonomi.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan	Tersedianya fasilitas skema anggaran untuk mencapai 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan pendanaan dan pemetaan sumber pembiayaan potensial.	• Penyusunan dokumen skema pendanaan dasar • Konsultasi awal dengan OPD dan lembaga keuangan untuk memastikan kelayakan skema.	• Integrasi kemitraan dengan lembaga pembiayaan (bank, fintech, CSR). • Penyempurnaan skema pendanaan	Implementasi penuh skema pendanaan kepada peserta program	• Evaluasi keberlanjutan skema pendanaan • Penyusunan rekomendasi optimalisasi dan perluasan sektor penerima manfaat

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				sektor prioritas wirausaha muda. • Uji coba penyaluran dana terbatas		
	Tersedianya fasilitas anggaran terhadap 100.000 Sultan Muda	Penyusunan peta kebutuhan pendanaan awal dan dokumen alokasi anggaran dasar untuk 100.000 Sultan Mud	• Penyesuaian dokumen anggaran berdasarkan evaluasi kebutuhan peserta dan prioritas program. • Penguatan koordinasi OPD pengampu pendanaan program.	Optimalisasi dokumen anggaran untuk mendukung ekspansi peserta dan penambahan layanan pembinaan.	Penyelarasan dokumen pendanaan dengan kemitraan eksternal dan peluang pembiayaan tambahan.	Evaluasi menyeluruh efektivitas penyaluran anggaran serta penyusunan dokumen keberlanjutan pendanaan jangka panjang.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya fasilitas perlindungan KI terhadap 100.000 Sultan Muda	Identifikasi potensi produk/karya peserta yang memenuhi kriteria KI	• Penyusunan mekanisme pendampingan dan standar layanan KI. • Pelatihan dasar terkait KI bagi peserta dan fasilitator.	• Fasilitasi pendaftaran KI (merek, hak cipta, desain industri) untuk peserta terpilih. • Penyusunan laporan tahunan perlindungan KI	• Penguatan kemitraan dengan Kemenkumham dan lembaga terkait untuk percepatan pendaftaran KI. • Perluasan jenis KI yang dapat difasilitasi (indikasi geografis, kekayaan komunal, dll).	• Evaluasi keseluruhan perlindungan KI • Penyempurnaan sistem pendampingan dan penyusunan rekomendasi keberlanjutan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					Integrasi layanan KI dalam inkubator 100.000 Sultan Muda	
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kerjasama dalam negeri dengan <i>stakeholder</i> untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi calon mitra dalam negeri (UMKM besar, perusahaan nasional, lembaga pemerintah, komunitas wirausaha).	- Penandatanganan kerjasama dasar dengan beberapa mitra prioritas. - Penyusunan mekanisme pemanfaatan kemitraan bagi peserta program.	- Perluasan kemitraan strategis untuk dukungan pelatihan, pemasaran, dan pembiayaan - Pelaksanaan kolaborasi konkret dalam bentuk program pembinaan bersama.	Penguatan sistem koordinasi dan monitoring kinerja kemitraan	Evaluasi efektivitas seluruh kemitraan dan penyempurnaan model kolaborasi untuk keberlanjutan program.
	Terjalannya kerjasama riset dengan BRIN/Perguruan Tinggi untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi topik riset strategis dan pemetaan perguruan tinggi/BRIN yang relevan.	- Perumusan nota kesepahaman awal dengan BRIN/ Universitas - Penyusunan rencana riset pendukung untuk pengembangan kapasitas 100.000 Sultan Muda.	- Pelaksanaan riset kolaboratif (kajian kewirausahaan muda, teknologi produksi, pasar digital). - Penyusunan laporan awal riset	Pemanfaatan hasil riset sebagai rekomendasi untuk perbaikan program dan inkubasi.	Pemanfaatan hasil riset sebagai rekomendasi untuk perbaikan program dan inkubasi.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Memfungsikan pusat inovasi/ inkubator untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	Tersedianya inkubasi yang mendapat fasilitas pengembangan	Identifikasi unit usaha potensial dan pemetaan kebutuhan inkubasi.	• Seleksi 20 unit usaha untuk batch pertama • Penyediaan fasilitas dasar (pelatihan bisnis, mentoring, akses pasar)	• Pendampingan lanjutan untuk 20–40 unit usaha termasuk pelatihan teknologi, peningkatan SDM, dan fasilitasi pemasaran. • Monitoring perkembangan usaha secara berkala	Peningkatan fasilitas inkubasi seperti akses pembiayaan, uji coba teknologi produksi, dan desain produk.	Evaluasi kinerja inkubasi dan penguatan model inkubasi untuk skala usaha menengah.
	Terbentuknya inkubator yang mendapat fasilitas pengembangan	Identifikasi kebutuhan fasilitas inovasi dan pemetaan kapasitas inkubator.	• Pengadaan fasilitas pendukung early-stage (ruang kerja, internet, pelatihan dasar). • Penyusunan SOP operasional inkubator	• Optimalisasi fungsi inkubator melalui penambahan fasilitas pengembangan (coaching intensif, layanan desain & teknologi). • Pelaksanaan program pembinaan reguler	• Integrasi layanan inkubator dengan program besar 100.000 Sultan Muda (pemasaran digital, teknologi produksi, branding). • Penguatan SDM pengelola inkubator	Evaluasi efektivitas inkubator dan penyusunan rekomendasi perbaikan layanan.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan	Tersedianya portal pelayanan Pemda yang terintegrasi untuk mendukung 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan layanan digital untuk mendukung aktivitas 100.000 Sultan Muda.	• Integrasi layanan dasar (perizinan sederhana, informasi program, pendaftaran kegiatan).	• Penambahan fitur layanan lanjutan seperti monitoring bantuan, pengajuan proposal, dan pusat informasi usaha.	• Optimalisasi kinerja portal melalui peningkatan kecepatan, keamanan, dan aksesibilitas.	• Evaluasi keseluruhan kinerja dan pemanfaatan portal. • Penyempurnaan layanan berbasis

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
kemampuan daerah.			Penyusunan alur layanan dan manual penggunaan portal	Uji coba pemanfaatan portal oleh peserta	Pendampingan penggunaan portal untuk peserta program	masukan pengguna untuk keberlanjutan program.
	Tersedianya fasilitas pelatihan website terhadap 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan pelatihan website dan pemetaan kemampuan digital peserta.	- Pelaksanaan pelatihan dasar pembuatan website (profil usaha, landing page sederhana). - Penyusunan modul pelatihan standar (materi, video, template).	- Pelatihan lanjutan: optimasi website, integrasi media sosial, dan dasar SEO. - Pendampingan pembuatan website bagi kelompok usaha prioritas. - Publikasi hasil pelatihan melalui laporan diseminasi	Penguatan kemampuan peserta dalam pemeliharaan website, update konten, dan keamanan digital.	- Evaluasi efektivitas pelatihan dan efektivitas website yang dibuat peserta. - Penyempurnaan program pelatihan untuk meningkatkan kemandirian digital wirausaha muda.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Terbentuknya kemitraan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi potensi koperasi lintas kabupaten/kota serta unit usaha yang siap bermitra dengan 100.000 Sultan Muda.	- Pembentukan 85 kemitraan awal untuk ruang kolaborasi, pemasaran produk, dan akses permodalan. - Sosialisasi model kemitraan koperasi bagi peserta	- Perluasan kemitraan hingga mencakup koperasi sektor produksi, perdagangan, dan jasa. - Penguatan skema kemitraan berbasis kebutuhan wirausaha muda (akses pasar,	Penguatan kelembagaan kemitraan melalui monitoring, standardisasi peran mitra, dan kolaborasi program koperasi dengan pemerintah daerah.	- Evaluasi efektivitas seluruh kemitraan koperasi. - Penyempurnaan model kemitraan untuk keberlanjutan dan peningkatan dampak program.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				pelatihan, pendampingan).		
	Tersedianya fasilitas kerjasama riset 100.000 Sultan Muda	Pemetaan kebutuhan riset dan identifikasi lembaga/peneliti potensial yang dapat berkolaborasi.	• Pelaksanaan pelatihan kerjasama riset dasar untuk meningkatkan literasi riset peserta. • Penyusunan mekanisme koordinasi riset antar pihak terkait.	• Implementasi kerjasama riset tematik (pasar, produk, teknologi tepat guna). • Penerbitan laporan hasil supervisi dan pendampingan riset.	Pendalaman riset lanjutan berbasis rekomendasi tahun sebelumnya dan pemanfaatannya untuk program inkubasi.	Evaluasi keseluruhan kerjasama riset dan penyusunan roadmap riset lanjutan untuk mendukung keberlanjutan program.
Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya fasilitas pelatihan inovasi 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan pelatihan inovasi dan pemetaan teknologi prioritas.	• Pelaksanaan pelatihan dasar inovasi (desain produk, teknologi sederhana, inovasi proses). • Pengembangan modul pelatihan inovasi	• Pelatihan inovasi lanjutan: prototipe, uji teknologi, standardisasi produk. • Pendampingan penerapan inovasi bagi peserta	• Integrasi hasil pelatihan inovasi dengan program inkubasi dan akses permodalan. • Penguatan kapasitas teknis SDM pendamping	Evaluasi program pelatihan inovasi serta penyusunan rekomendasi inovasi unggulan yang siap dikembangkan lebih lanjut.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya fasilitas diseminasi inovasi 100.000 Sultan Muda	Identifikasi inovasi peserta yang potensial untuk didiseminasikan dan pemetaan kanal diseminasi.	• Pelaksanaan diseminasi dasar (sosialisasi inovasi, publikasi awal, forum berbagi praktik baik).	• Penguatan diseminasi melalui gelar inovasi, video showcase, dan publikasi digital. • Pendampingan peserta dalam	Pengembangan kanal diseminasi terpadu (portal inovasi, kolaborasi dengan media, dan event pemerintah daerah).	Evaluasi pemanfaatan diseminasi dan penyempurnaan strategi untuk memperluas jangkauan inovasi 100.000 Sultan Muda.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			• Penyusunan materi diseminasi standar.	mempresentasikan inovasinya		
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi	Tersedianya fasilitas promosi terhadap 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan promosi UMKM peserta dan pemetaan kanal promosi yang tersedia di Pemda serta mitra.	• Pengembangan paket fasilitas promosi (booth, katalog produk, media digital). • Pendampingan promosi bagi peserta prioritas awal.	• Perluasan fasilitas promosi melalui kerja sama event daerah dan marketplace lokal. • Produksi materi promosi terpadu (foto produk, video singkat, katalog digital).	• Integrasi fasilitas promosi dengan portal 100.000 Sultan Muda dan kanal promosi OPD lain. • Optimalisasi promosi melalui kolaborasi komunitas dan media pemerintah.	• Evaluasi dampak fasilitas promosi terhadap peningkatan omzet. • Penyempurnaan model promosi berbasis digital dan kolaborasi multipihak.
Apresiasi prestasi inovasi	Terselenggaranya inovasi award bagi 100.000 Sultan Muda	Penyusunan konsep dasar Inovasi Award dan kriteria penilaian untuk wirausaha muda.	Pelaksanaan Inovasi Award perdana dan publikasi pemenang sebagai role model.	• Pengembangan kategori penilaian baru (teknologi, kreativitas, dampak sosial). • Pendampingan lanjutan bagi penerima penghargaan.	Kolaborasi dengan BRIN/PT dalam kurasi inovasi dan penjurian.	Evaluasi penyelenggaraan 5 tahun, dokumentasi best practices, dan penyempurnaan format award.
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Tersedianya fasilitas inkubasi bagi 100.000 Sultan Muda	Pemetaan fasilitas inkubasi yang tersedia dan kebutuhan inkubasi peserta.	Pelaksanaan inkubasi dasar: manajemen usaha, keuangan, pemasaran digital.	• Penguatan inkubasi lanjutan: desain produk, perizinan, distribusi. • Kemitraan inkubator dengan	Integrasi layanan inkubasi dengan Rumah Kemasan, Creative Center, dan fasilitas Pemda lainnya.	Evaluasi efektivitas inkubator dan rekomendasi peningkatan kapasitas layanan.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				komunitas wirausaha daerah.		
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Dilaksanakannya kodifikasi Teknologi Masyarakat/ Kearifan Lokal 100.000 Sultan Muda	Pemetaan awal teknologi/kearifan lokal yang relevan bagi wirausaha muda.	Pengumpulan data lapangan dan dokumentasi praktik kearifan lokal prioritas.	Penyusunan naskah kodifikasi dan uji penerapan dalam model usaha mikro.	- Diseminasi hasil kodifikasi kepada peserta melalui pelatihan dan workshop. - Kolaborasi pihak lokal (tokoh masyarakat, perajin, komunitas budaya).	Evaluasi pemanfaatan kearifan lokal dalam usaha peserta dan penyempurnaan dokumen kodifikasi.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Dilaksanakannya riset untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan riset prioritas (pasar, kapasitas usaha muda, peluang sektor unggulan).	Pelaksanaan riset tematik awal dan penyusunan laporan berbasis data kebutuhan peserta.	- Riset lanjutan yang fokus pada model bisnis, digitalisasi, dan potensi skala usaha. - Diseminasi hasil riset kepada OPD dan peserta program	Integrasi hasil riset dengan kebijakan dan program pengembangan usaha di tingkat provinsi.	Evaluasi lima tahun hasil riset dan penyusunan rekomendasi penguatan ekosistem usaha muda.
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Dikembangkan dan terbentuknya klaster inovasi 100.000 Sultan Muda	Pemetaan sektor unggulan dan potensi klaster inovasi wirausaha muda di daerah.	Penyusunan desain awal klaster inovasi dan identifikasi peran aktor (pemerintah, UMKM, akademisi, industri).	- Pembentukan klaster inovasi awal dan penyusunan dokumen rencana aksinya. - Fasilitas kolaborasi pelaku usaha dalam klaster.	Pengembangan aktivitas klaster: inkubasi kolaboratif, akses pasar, dan pendampingan inovasi.	Evaluasi kinerja klaster dan perbaikan model ekosistem inovasi untuk keberlanjutan program.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan 100.000 Sultan Muda	Pemetaan pemangku kepentingan dan penyusunan forum koordinasi lintas OPD, akademisi, dan mitra.	Pelaksanaan koordinasi rutin dan penyusunan dokumen sinkronisasi program awal.	• Penguatan kolaborasi melalui pembagian peran antar-pemangku kepentingan. • Penyelarasan program lintas sektor untuk mendukung peserta 100.000 Sultan Muda.	Integrasi koordinasi dalam perencanaan daerah dan penguatan mekanisme monitoring bersama.	Evaluasi menyeluruh kolaborasi lima tahun dan penyusunan rekomendasi model koordinasi berkelanjutan.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Dilaksanakannya sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan jenis sertifikasi dan standar usaha mikro untuk peserta 100.000 Sultan Muda.	• Pelaksanaan sertifikasi dasar (NIB, Standar Usaha, Izin Higiene, dll). • Pendampingan pemenuhan persyaratan teknis bagi usaha mikro prioritas.	• Fasilitasi sertifikasi lanjutan (P-IRT, Halal, Laik Hygiene). • Monitoring penerapan standar usaha bagi peserta tersertifikasi.	• Peningkatan cakupan usaha mikro yang mengikuti sertifikasi. • Integrasi layanan sertifikasi dengan lembaga terkait untuk percepatan proses.	• Evaluasi efektivitas sertifikasi & standarisasi yang telah diterapkan. • Penyempurnaan mekanisme pendampingan untuk keberlanjutan sertifikasi usaha.
	Tersedianya fasilitas kemudahan perizinan bagi 100.000 Sultan Muda	Identifikasi kebutuhan jenis izin usaha dan kendala OSS-RBA yang dihadapi peserta.	• Fasilitasi pembuatan NIB & perizinan dasar. • Pelatihan penggunaan OSS-RBA bagi peserta prioritas	• Pendampingan penyelesaian izin risiko menengah-tinggi. • Penataan layanan "helpdesk legalitas" untuk percepatan penerbitan izin	Memperluas cakupan layanan perizinan melalui klinik usaha terpadu.	• Evaluasi kualitas layanan perizinan dan tingkat keberhasilan legalitas usaha peserta. • Penyusunan rekomendasi penyederhanaan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
						layanan untuk keberlanjutan.
	Dilaksanakannya pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan bagi 100.000 Sultan Muda	Identifikasi jenis aplikasi pembukuan yang paling sesuai untuk usaha mikro peserta (misal: SiApik, BukuKas, dan sejenisnya).	• Pelatihan dasar penggunaan aplikasi pembukuan. • Pendampingan pencatatan keuangan awal bagi kelompok sasaran.	• Penguatan literasi keuangan dan integrasi aplikasi dengan kebutuhan usaha. • Monitoring transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan kelompok dampingan.	• Perluasan pendampingan ke kelompok usaha baru dan peningkatan kualitas pencatatan keuangan kelompok lama. • Penguatan mentoring bagi peserta yang telah rutin mencatat transaksi.	• Evaluasi efektivitas penggunaan aplikasi pembukuan pada kelompok sasaran. • Penyempurnaan modul pendampingan keuangan sebagai standar pembinaan rutin.
Penguatan kerjasama internasional	Terjalinnnya kerjasama dengan luar negeri dalam pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi potensi mitra internasional dan peluang kerja sama yang relevan untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda.	• Penjajakan kerja sama dengan lembaga internasional melalui FGD, pertemuan virtual, dan desk diplomacy. • Penyusunan draft dokumen kerja sama yang diarahkan pada dukungan inkubasi, pelatihan, dan pemasaran global.	• Penandatanganan kerja sama dengan mitra internasional terpilih. • Implementasi awal program kolaborasi seperti mentoring global dan pembukaan akses pasar luar negeri.	• Perluasan jejaring kerja sama dengan negara atau lembaga internasional baru. • Penguatan kemitraan yang telah berjalan melalui program pendampingan lanjutan.	• Evaluasi efektivitas seluruh kerja sama internasional yang telah ditandatangani. • Penyempurnaan model kerja sama untuk mendukung keberlanjutan ekosistem global 100.000 Sultan Muda.
	Tersedianya produk 100.000 Sultan muda yang berstandar internasional	Identifikasi potensi produk unggulan peserta yang	• Penyusunan pedoman penyesuaian	• Uji kelayakan dan sertifikasi standar	• Ekspansi pembinaan standar internasional kepada lebih banyak	• Evaluasi penerapan standar internasional pada produk peserta.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		berpeluang memenuhi standar internasional (ISO, HACCP, GMP, dan lainnya).	standar internasional untuk produk prioritas. • Pendampingan pemenuhan standar dasar untuk produk unggulan terpilih.	internasional bagi produk yang siap. • Pengujian kualitas produk melalui lembaga berstandar global.	pelaku 100.000 Sultan Muda. • Fasilitasi peningkatan kualitas produksi untuk memenuhi permintaan internasional.	• Penyempurnaan panduan pengembangan produk berstandar global untuk keberlanjutan.
	Tersedianya fasilitas pelatihan dengan luar negeri dalam pengembangan 100.000 Sultan Muda	Identifikasi tema pelatihan internasional yang relevan dan lembaga luar negeri yang dapat menjadi mitra penyelenggara.	• Penetapan mitra internasional untuk pelatihan. • Penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan wirausaha muda Sumsel.	• Pelaksanaan pelatihan internasional pertama, baik secara daring maupun luring. • Seleksi peserta dan pembekalan pra-pelatihan	• Peningkatan cakupan pelatihan dengan menambah sesi lanjutan atau kelas tematik. • Pendampingan penerapan ilmu pelatihan ke dalam usaha peserta.	• Evaluasi penyelenggaraan pelatihan internasional dan dampaknya terhadap pengembangan usaha. • Penyusunan rekomendasi penyempurnaan program pelatihan global untuk keberlanjutan.

6.1 Rencana Aksi Tema Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel

Rencana aksi penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan dibangun melalui enam elemen utama ekosistem inovasi. Setiap elemen memuat rangkaian kegiatan strategis, indikator kinerja, target tahunan, serta sasaran akhir yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas Sultan Muda, meningkatkan pemanfaatan teknologi, serta memperluas akses pasar dan kemitraan. Rencana aksi ini disusun untuk memastikan bahwa ekosistem pendukung mulai dari kebijakan, kelembagaan, SDM, hingga jejaring inovasi berfungsi secara terpadu guna mempercepat lahirnya 100.000 pelaku usaha muda yang produktif, kreatif, dan berdaya saing di Sumatera Selatan. Berikut ini ringkasan penjelasan dari setiap elemen ekosistem riset dan inovasi daerah sebagai landasan pengembangan 100.000 Sultan Muda Sumsel.

1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

Penguatan kebijakan dan infrastruktur riset menjadi dasar penting dalam mendukung lahirnya 100.000 Sultan Muda di Sumatera Selatan. Pemerintah provinsi perlu menyediakan regulasi yang mempermudah pengembangan kewirausahaan muda, akses permodalan, serta fasilitas inovasi seperti inkubator bisnis, laboratorium produksi, dan pusat pelatihan teknologi. Pemantapan kebijakan ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif agar para Sultan Muda dapat mengakses informasi, teknologi, serta sumber daya yang diperlukan untuk membangun usaha yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah

Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi elemen krusial untuk mendukung pemberdayaan 100.000 wirausaha muda. Melalui penguatan peran OPD, lembaga inkubasi, lembaga keuangan daerah, dan institusi pendidikan, Sumatera Selatan dapat menyediakan layanan pendampingan usaha, pelatihan teknis, hingga konsultasi bisnis yang lebih terstruktur. Optimalisasi daya dukung kelembagaan ini memastikan Sultan Muda mendapatkan akses terhadap kompetensi manajerial, keterampilan

teknologi, dan dukungan administratif yang memadai untuk mengembangkan usaha sejak tahap rintisan hingga skala tumbuh.

3. Kemitraan dalam Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Kolaborasi lintas pihak menjadi landasan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 100.000 Sultan Muda. Kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, BUMD, lembaga riset, serta komunitas wirausaha diperlukan untuk membuka jalan bagi transfer teknologi, pembinaan usaha, pembukaan akses pasar, dan peluang investasi. Model kemitraan yang baik akan membantu menciptakan rantai nilai yang terintegrasi, mempermudah akses logistik, memperkuat pemasaran digital, serta memastikan setiap Sultan Muda dapat memanfaatkan dukungan ekosistem secara optimal.

4. Budaya Riset dan Inovasi Daerah

Pembentukan budaya inovasi dan kreativitas menjadi fondasi dalam mendorong tumbuhnya wirausaha muda yang kompetitif. Pemerintah provinsi perlu menumbuhkan semangat eksperimen, adopsi teknologi, serta keberanian mencoba model bisnis baru di kalangan generasi muda. Budaya inovasi ini dapat diperkuat melalui lomba inovasi, inkubasi kreatif, pelatihan digital, serta kampanye literasi kewirausahaan yang melibatkan sekolah, kampus, dan komunitas lokal. Dengan budaya yang mendukung inovasi, para Sultan Muda akan lebih siap menghadapi tantangan pasar dan mengembangkan usaha berbasis solusi.

5. Koherensi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah

Koherensi kebijakan diperlukan untuk memastikan seluruh program 100.000 Sultan Muda berjalan secara selaras, terukur, dan tepat sasaran. Penyelarasan kebijakan kewirausahaan muda dengan RPJMD, kebijakan ekonomi kreatif, program pengentasan kemiskinan, serta strategi transformasi digital akan memperkuat sinergi antar OPD dan meminimalkan duplikasi program. Melalui kebijakan yang terintegrasi, intervensi yang diberikan kepada Sultan Muda dapat lebih sistematis mulai dari tahap edukasi, inkubasi, penguatan usaha, hingga ekspansi pasar.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Pengembangan 100.000 Sultan Muda perlu diselaraskan dengan dinamika global agar wirausaha muda Sumsel mampu bersaing dalam ekonomi modern. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital, ekonomi hijau, keberlanjutan, dan tren bisnis global akan memperluas peluang inovasi bagi para pelaku usaha muda. Penyelarasan ini mencakup peningkatan literasi digital, pemanfaatan platform global, orientasi ekspor bagi produk unggulan lokal, serta integrasi konsep usaha ramah lingkungan. Dengan mengikuti arah perkembangan global, Sultan Muda Sumsel akan memiliki basis kompetitif yang lebih kuat dan berorientasi masa depan.

Tabel 6. 2 Matriks Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah 100.000 Sultan Muda Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Elemen 1 : Kebijakan dan infrastruktur RID										
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan / Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	4.01.05.1.01.00 04	Tersedianya hasil Kajian Naskah Akademis/Kebijakan untuk Perda/Pergub dalam rangka mencapai 100.000 Sultan Muda	510 Dokumen	510 Dokumen	510 Dokumen	510 Dokumen	510 Dokumen	Implementasi Kebijakan Pergub tentang 100.000 Sultan Muda	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Prov Sumsel
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan / Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	4.01.05.1.01.00 02	Tersedianya produk hukum terkait pengembangan 100.000 Sultan Muda	780 Dokumen	780 Dokumen	780 Dokumen	780 Dokumen	780 Dokumen	Produk Hukum dalam rangka mencapai 100.000 Sultan Muda	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Prov Sumsel
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan / Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	4.01.05.1.01.00 03	Dilaksanakannya sosialisasi Pergub tentang 100.000 Sultan Muda	110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen	Sosialisasi Pergub tentang 100.000 Sultan Muda	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Prov Sumsel
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	2.20.02.1.01.00 11	Persentase kegiatan statistik sektoral yang	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Database 100.000 Sultan Muda	Dinas Kominfo Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Provinsi/ Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)							
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan/ Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	5.05.02.1.01.00 12	Tersedianya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi dalam rangka mencapai 100.00 Sultan Muda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi 100.000 Sultan Muda	Balitbangda Prov Sumsel
	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	2.20.02.1.01.00 16	Tersedianya basis data usaha mikro 100.000 Sultan Muda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Terbangunnya database pelaku usaha mikro 100.000 Sultan Muda	Dinas Kominfo Prov Sumsel
Pengembang an infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi/ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH	2.11.04.1.01.00 04	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang diberi fasilitas sebagai ruang publik kreatif bagi 100.000 Sultan Muda	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	Fasilitas RTH sebagai ruang publik kreatif bagi 100.000 Sultan Muda	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi/ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04.1.01.00 04	Tersedianya akses internet yang terpasang di ruang publik/RTH	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	Akses internet publik yang berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat di ruang publik/RTH.	Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan Prov Sumsel
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.00 01	Terbentuknya Inkubator pengembangan 100.000 Sultan Muda	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	Inkubator 100.000 Sultan Muda beroperasi penuh sebagai pusat pembinaan dan pengembangan wirausaha muda.	Dinas Koperasi & UKM
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.05.02.1.03.00 01	Tersedianya fasilitas skema anggaran untuk mencapai 100.000 Sultan Muda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Skema pendanaan yang berjalan dan mendukung pelaksanaan program 100.000 Sultan Muda.	Balitbangda Prov Sumsel
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan/ Penelitian dan	5.05.02.1.02.00 06	Tersedianya fasilitas anggaran terhadap 100.000 Sultan Muda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Pembiayaan program 100.000 Sultan Muda tersalurkan dan digunakan sesuai kebutuhan.	Balitbangda Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Pengembangan Kesehatan									
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Fasilitas Hak Kekayaan Intelektua	5.05.02.1.04.00 05	Tersedianya fasilitas perlindungan KI terhadap 100.000 Sultan Muda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Pelindungan Kekayaan Intelektual bagi peserta 100.000 Sultan Muda terlaksana melalui layanan pendaftaran dan pendampingan KI.	Balitbangda Prov Sumsel
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung RID										
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Invensi dan Inovasi/ Fasilitas dan Pembinaan untuk Penguatan kemitraan antar kelembagaan	5.05.03.1.02.00 02	Tersedianya kerjasama dalam negeri dengan <i>stakeholder</i> untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Kemitraan dalam negeri aktif berjalan dan mendukung program 100.000 Sultan Muda.	Balitbangda Prov Sumsel
	Invensi dan Inovasi/ Fasilitas dan Pembinaan untuk Penguatan kemitraan antar kelembagaan	5.05.03.1.02.00 02	Terjalannya kerjasama riset dengan BRIN/Perguruan Tinggi untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Kolaborasi riset dengan BRIN/Perguruan Tinggi terlaksana dan menghasilkan dukungan akademik bagi 100.000 Sultan Muda.	Balitbangda Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Memfungsikan pusat inovasi/ inkubator untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah/ Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.17.08.1.01.00 01	Tersedianya inkubasi yang mendapat fasilitas pengembangan	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	Program inkubasi berfungsi dan menerima fasilitas pengembangan untuk memperkuat peserta.	Dinas Koperasi & UKM Prov Sumsel
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5.05.02.1.04.00 03	Terbentuknya inkubator yang mendapat fasilitas pengembangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Inkubator beroperasi efektif dengan dukungan fasilitas pengembangan untuk pembinaan wirausaha muda.	Balitbangda Prov Sumsel
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	2.16.03.1.02.00 21	Tersedianya portal pelayanan Pemda yang terintegrasi untuk mendukung 100.000 Sultan Muda	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	Portal layanan terintegrasi Pemda berjalan optimal sebagai sarana pendukung 100.000 Sultan Muda.	Dinas Kominfo Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi / Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi	5.05.02.1.04.00 04	Tersedianya fasilitas pelatihan website terhadap 100.000 Sultan Muda	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Pelatihan pembuatan dan pengelolaan website terselenggara dan dimanfaatkan oleh peserta 100.000 Sultan Muda.	Balitbangda Prov Sumsel
Elemen 3 : Kemitraan RID										
Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins	2.17.06.1.01.00 06	Terbentuknya kemitraan 100.000 Sultan Muda	85 Unit Usaha	85 Unit Usaha	85 Unit Usaha	85 Unit Usaha	85 Unit Usaha	Kemitraan 100.000 Sultan Muda berjalan aktif dan mendukung pengembangan wirausaha muda.	Dinas Koperasi & UKM Prov Sumsel
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan/ Bimbingan Teknis dan Supervisi di	5.05.03.1.01.00 04	Tersedianya fasilitas kerjasama riset 100.000 Sultan Muda	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	Fasilitas kerjasama riset dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan inovasi dalam	Balitbangda Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan								program 100.000 Sultan Muda.	
Peningkatan difusi inovasi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi / Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5.05.02.1.04.00 01	Tersedianya fasilitas pelatihan inovasi 100.000 Sultan Muda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Fasilitas kerjasama riset dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan inovasi dalam program 100.000 Sultan Muda.	Balitbangda Prov Sumsel
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan	5.05.02.1.04.00 03	Tersedianya fasilitas diseminasi inovasi 100.000 Sultan Muda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Diseminasi inovasi terlaksana dan memperluas pemanfaatan hasil inovasi peserta 100.000 Sultan Muda.	Balitbangda Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Daerah yang Bersifat Inovatif									
Elemen 4 : Budaya RID										
Promosi dan kampanye inovasi	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.17.08.1.01.00 01	Tersedianya fasilitas promosi terhadap 100.000 Sultan Muda	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	Fasilitas promosi dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan visibilitas peserta 100.000 Sultan Muda.	Dinas Koperasi & UKM Prov Sumsel
Apresiasi prestasi inovasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan / Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5.05.02.1.01.00 04	Terselenggaranya inovasi award bagi 100.000 Sultan Muda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Inovasi Award terlaksana sebagai ajang apresiasi dan pemacu kreativitas peserta 100.000 Sultan Muda.	Balitbangda Prov Sumsel
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,	2.17.07.1.01.00 01	Tersedianya fasilitas inkubasi bagi 100.000 Sultan Muda	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	Layanan inkubasi berjalan efektif dalam mendukung pengembangan usaha peserta	Dinas Koperasi & UKM

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan								100.000 Sultan Muda.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5.05.02.1.04.0002	Dilaksanakannya kodifikasi Teknologi Masyarakat/ Kearifan Lokal 100.000 Sultan Muda	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Kodifikasi Teknologi Masyarakat/Kearifan Lokal terdokumentasi dan mendukung pengembangan inovasi dalam program 100.000 Sultan Muda.	Balitbangda Prov Sumsel
Elemen 5 : Koherensi Kebijakan Riset dan Inovasi										

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi / Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5.05.02.1.04.0004	Dilaksanakannya riset untuk pengembangan 100.000 Sultan Muda	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Hasil riset tersedia dan digunakan sebagai dasar pengembangan program 100.000 Sultan Muda.	Balitbangda Prov Sumsel
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) / Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem	3.31.04.1.01.0001	Dikembangkan dan terbentuknya klaster inovasi 100.000 Sultan Muda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Klaster inovasi 100.000 Sultan Muda berfungsi sebagai ekosistem kolaboratif untuk pengembangan wirausaha muda.	Dinas Perindustrian Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Informasi Industri Nasional (SIINas									
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan / Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	5.05.02.1.01.00 13	Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan 100.000 Sultan Muda	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	Koordinasi lintas pemangku kepentingan berjalan efektif dan memperkuat pelaksanaan program 100.000 Sultan Muda.	Balitbangda Prov Sumsel
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global										
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Fasilitasi Sertifikasi	2.17.07.1.01.00 11	Dilaksanakannya sertifikasi dan standardisasi Usaha Mikro 100.000 Sultan Muda	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	Usaha Mikro 100.000 Sultan Muda tersertifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan.	Dinas Koperasi & UKM Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	dan Standardisasi Usaha									
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.1.02.0007	Tersedianya fasilitas kemudahan perizinan bagi 100.000 Sultan Muda	2500 izin/non izin	2500 izin/non izin	2500 izin/non izin	2500 izin/non izin	2500 izin/non izin	Layanan kemudahan perizinan berfungsi optimal dan mempercepat legalitas usaha peserta 100.000 Sultan Muda.	DPMPTSP Prov Sumsel
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	2.17.06.1.01.0004	Dilaksanakannya pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan bagi 100.000 Sultan Muda	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	Peserta 100.000 Sultan Muda mampu mengelola pembukuan usaha melalui sistem aplikasi secara efektif.	Dinas Koperasi & UKM Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
Penguatan kerjasama internasional	Fasilitasi Kerja Sama Daerah- / Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	4.01.03.1.03.00 01	Terjalannya kerjasama dengan luar negeri dalam pengembangan 100.000 Sultan Muda	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	Kemitraan internasional aktif memberikan dukungan dan peluang pengembangan bagi 100.000 Sultan Muda.	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.05.02.1.03.00 01	Tersedianya produk 100.000 Sultan muda yang berstandar internasional	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Produk peserta 100.000 Sultan Muda memenuhi standar internasional dan siap bersaing di pasar global.	Balitbangda Prov Sumsel
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan/ Bimbingan Teknis dan Supervisi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, Kerjasama	5.05.03.1.01.00 04	Tersedianya fasilitas pelatihan dengan luar negeri dalam pengembangan 100.000 Sultan Muda	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	Pelatihan internasional terselenggara dan meningkatkan kapasitas global peserta 100.000 Sultan Muda.	Balitbangda Prov Sumsel

Elemen / sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode SIPD	Indikator	Target					Sasaran Akhir	OPD
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
	Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan									

BAB VII

PENUTUP

Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan bagian penting dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Dokumen ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung salah satu program strategis Kepala Daerah terpilih, yaitu 100.000 Sultan Muda Sumsel. Program strategis ini menekankan penguatan kapasitas generasi muda Sumatera Selatan agar menjadi inovator, pelaku usaha, dan penggerak ekonomi daerah yang adaptif dan berdaya saing.

Pada dokumen ini menggunakan pendekatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang meliputi enam elemen utama: (a) kebijakan infrastruktur riset dan inovasi; (b) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi; (c) kemitraan riset dan inovasi; (d) budaya riset dan inovasi; (e) keterpaduan dan koherensi riset dan inovasi; serta (f) penyelarasan dengan perkembangan global. Kerangka analisis ini memberikan dasar yang sistematis dalam menilai kesiapan daerah dalam mendukung percepatan lahirnya 100.000 Sultan Muda Sumsel melalui peningkatan literasi teknologi, pengembangan talenta muda, penguatan inkubasi inovasi, dan perluasan jejaring kolaborasi.

Pada bab VII merangkum rencana aksi yang telah diselaraskan dengan program dan kegiatan/sub kegiatan yang disesuaikan dengan kode Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari rencana strategis perangkat daerah yang terkait. Rencana aksi tersebut memuat program-program strategis yang berorientasi pada penciptaan ekosistem inovasi yang kondusif bagi generasi muda, termasuk penguatan kapasitas SDM, pengembangan pusat inovasi dan inkubasi, fasilitasi kewirausahaan teknologi, serta integrasi peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas inovasi, dan sektor usaha. Dengan demikian, RIPJ PID menjadi pedoman strategis dalam memperkuat arah pembangunan

IPTEK yang berorientasi pada pemberdayaan generasi muda sebagai motor penggerak ekonomi masa depan. Dokumen ini mendorong terwujudnya sinergi antar-sektor, kolaborasi antar-lembaga, serta percepatan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Penyusunan dan implementasi dokumen ini memerlukan komitmen dan kolaborasi aktif dari seluruh perangkat daerah terkait. Keberhasilan pencapaian program strategis 100.000 Sultan Muda Sumsel hanya dapat diwujudkan apabila seluruh OPD, lembaga pendidikan, pelaku usaha, komunitas, serta masyarakat bergerak secara terpadu dalam mendukung ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui kerja sama dan sinergi yang kuat, diharapkan terbangun generasi muda Sumatera Selatan yang inovatif, kreatif, mandiri, dan siap berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

REFERENSI

- Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. J., Barki, K., & Alamsyah. (2023). Implementation of Community Empowerment Approach to Improve The Quality of Community Life Through Regional Potential-Based Economic Development. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.95>
- Alam, S., Putra, F. Al, & Mustafa, L. O. (2022). Strategi Pembangunan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Daerah di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Publicuho*, 5(4), 1277–1293. <https://doi.org/doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80> STRATEGI
- Alfitri, A. R., & Nawangsari, E. R. (2025). Analisis Penentuan Produk Unggulan Daerah (PUD) Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 5403–5412. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.7954>
- Budiyanto, H. (2023). Analisis Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kendal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i1.1091>
- Firdaus, I. (2022). Dukungan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mengakselerasi Aktivitas Riset Energi Baru Terbarukan di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 411–434. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.986>
- Handini, N., Darwina, M., Yudistiras, & Pangestoeti, W. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(5), 964–986. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793>
- Hasanah, N., Syah, E., & Ningsih, K. (2025). Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah: Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Mixed-Method. *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 769–787. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2333>
- Hasibuan, E. Y., & Rukiah. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomin Provinsi Sumatera Utara. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 627–642. <https://doi.org/10.24952/profjes.v2i1.10118>
- Hidayat, A. F. (2024). Optimalisasi Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah di Kota Tasikmalaya. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 945–950. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.357> 2721-2246
- Marcal, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 40–47. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>

- Rohmah, J. (2025). Peran Pembangunan Ekonomi dalam Membentuk Sumber Daya Manusia yang Unggul di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(3), 70–87. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4403>
- Suhandi, Wijayanto, H., & Olde, S. (2020). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 13(01), 85–94.
- Suhardi, P. P. (2025). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.393>
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.